



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Karakteristik lokasi dan wilayah

2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Aspek geografi dan demografi merupakan salah satu aspek kondisi kewilayahan yang mutlak diperhatikan sebagai ruang dan subyek pembangunan. Aspek geografi memberikan gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah. Sedangkan gambaran kondisi demografi, antara lain mencakup perubahan penduduk, komposisi dan populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu. Dari uraian ini diharapkan dapat terpetakan potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan Kabupaten Pulang Pisau lima tahun kedepan.

Kabupaten Pulang Pisau merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten ini mempunyai wilayah dengan luas 998.001 Ha atau sekitar 6,50 % dari luas Kalimantan Tengah (15.356.400 Ha).

Secara administrasi pemerintahan Kabupaten Pulang Pisau dikepalai oleh Bupati dan Wakil Bupati yang juga membawahi koordinasi atas wilayah administrasi kecamatan yang dikepalai oleh Camat. Jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Pulang Pisau sebanyak 8 kecamatan yang terdiri dari 95 desa dan 4 kelurahan. Ibukota Kabupaten Pulang Pisau terletak di **Pulang Pisau**.



Secara administratif wilayah Kabupaten Pulang Pisau berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara : Berbatasan Kabupaten Kabupaten Gunung Mas
- b. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya
- c. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Kapuas
- d. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Laut Jawa.

Luas wilayah masing-masing kecamatan ditampilkan pada Tabel 2.1 dan Bagan 2.1

Tabel 2.1

Banyaknya Kecamatan dan Desa Menurut Kabupaten/Kota di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017

No.	Nama Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Persentase (%) terhadap Luas Pulang Pisau	Jumlah Desa/ Kelurahan
1.	Kahayan Kuala	Bahaur Basantan	132.124	13,24	12
2.	Sebangau Kuala	Sebangau Permai	442.254	44,31	8
3.	Pandih Batu	Pangkoh Hilir	43.873	4,40	16
4.	Maliku	Maliku Baru	42.561	4,26	15
5.	Kahayan Hilir	Pulang Pisau	55.640	5,58	7
6.	Jabiren Raya	Jabiren	111.232	11,15	8
7.	Kahayan Tengah	Bukit Rawi	109.475	10,97	14
8.	Banama Tingang	Bawan	60.842	6,10	15
Jumlah			998.001	100,00	95

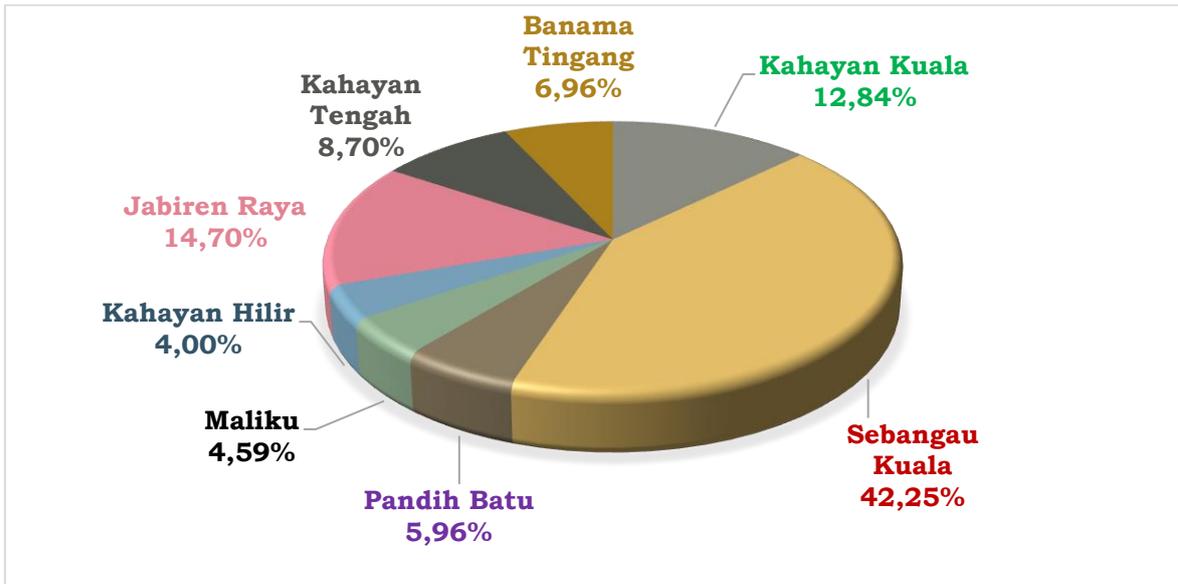
Sumber: Kabupaten Pulang Pisau Dalam Angka 2018

Kecamatan Sebangau Kuala merupakan wilayah kabupaten terluas di Kabupaten Pulang Pisau dengan luas 442.254 Ha atau sekitar 44,31

persen terhadap luas wilayah Kabupaten Pulang Pisau. Sedangkan wilayah terkecil di Kabupaten Pulang Pisau adalah Kecamatan Maluku yaitu seluas 42.561 Ha atau 4,26 persen terhadap luas wilayah Kabupaten Pulang Pisau.

Bagan 2.1

Persentase Luas Kecamatan terhadap Luas Pulang Pisau



2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

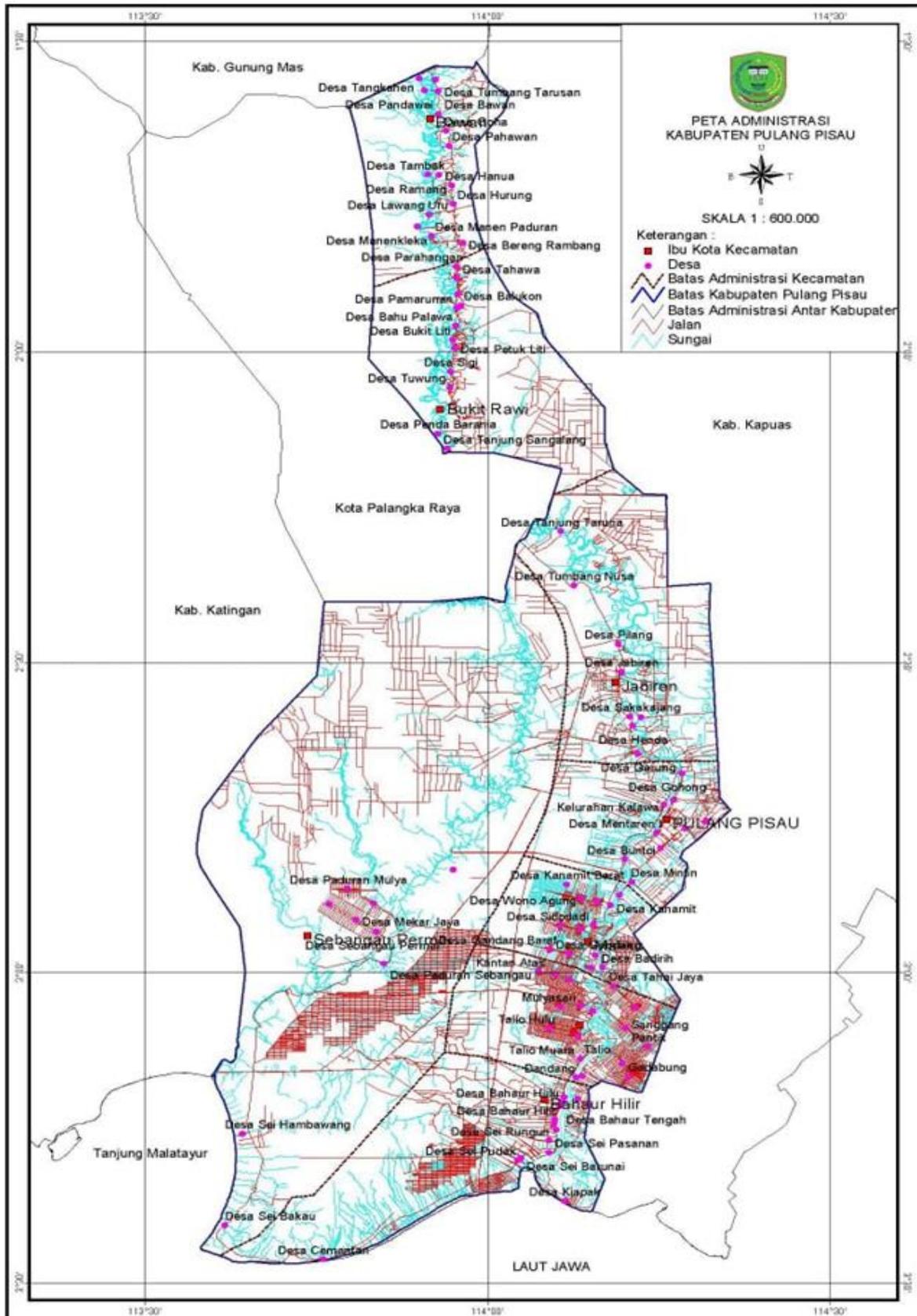
Secara Geografis Kabupaten Pulang Pisau terletak di daerah khatulistiwa, yaitu antara 10° sampai 0° Lintang Selatan dan 110° sampai 120° Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Pulang Pisau memiliki potensi strategis dalam konstelasi wilayah yang lebih luas, yaitu:

1. Terletak di jalan trans Kalimantan, sehingga dapat memberikan dampak yang besar terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan Kabupaten Pulang Pisau pada masa yang akan datang.
2. Kabupaten Pulang Pisau yang secara geografis berdekatan dengan Kota Palangka Raya sebagai



ibukota Provinsi Kalimantan Tengah, merupakan daerah penyangga atau hinterland bagi pengembangan wilayah ibukota Provinsi Kalimantan Tengah.

3. Implikasi tidak langsung mengakibatkan Pulang Pisau sebagai ibukota Kabupaten Pulang Pisau, menjadi wilayah yang berfungsi sebagai pintu masuk bagi pola dan jalur pergerakan kegiatan penduduk menuju ibukota Provinsi Kalimantan Tengah. Peta wilayah Administrasi Kabupaten Pulang Pisau disajikan pada Gambar 2.1 berikut :



Gambar 2.1

Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Pulang Pisau

Sumber: RTRW Kabupaten Pulang Pisau 2018-2038



2.1.1.3. Topografi

Kondisi Topografi wilayah Kabupaten Pulang Pisau terdiri dari:

1. Bagian Utara, yang merupakan daerah perbukitan, dengan ketinggian antara 50-100 m dari permukaan air laut, yang mempunyai sudut elevasi 8°-15°, serta mempunyai daerah pegunungan dengan tingkat kemiringan $\pm 15^\circ - 25^\circ$
2. Bagian Selatan, terdiri atas pantai/pesisir, rawa dengan ketinggian 0-5 m dari permukaan laut dengan elevasi 0°-8° serta dipengaruhi oleh pasang surut dan merupakan daerah yang mempunyai intensitas banjir yang cukup besar. Kabupaten Pulang Pisau memiliki perairan yang meliputi danau, rawa-rawa, dan dilintasi jalur sungai besar, yaitu Sungai Kahayan dan Sungai Sebangau.

Ketinggian wilayah Kabupaten Pulang Pisau bervariasi antara 0 – 100 meter dari permukaan laut. Ada 6 (enam) kecamatan yang terletak di daerah dataran rendah dengan ketinggian 0 - 25 meter di atas permukaan air laut (dpl), yaitu Kecamatan Kahayan Kuala, Kecamatan Sebangau Kuala, Kecamatan Pandih Batu, Kecamatan Maliku, Kecamatan Kahayan Hilir dan Kecamatan Jabiren Raya. Dua kecamatan lainnya berada pada ketinggian 25 – 100 meter di atas permukaan laut (dpl), yaitu Kecamatan Kahayan Tengah dan Kecamatan Banama Tingang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.2.



Tabel 2.2
Tinggi Ibukota Kecamatan di Atas Permukaan Air Laut
Menurut Kecamatan di Kabupaten Pulang Pisau

No	Nama Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Tinggi Rata-Rata mdpl (m)
1	Kahayan Kuala	Bahaur Basantan	0-25
2	Sebangau Kuala	Sebangau Permai	0-25
3	Pandih Batu	Pangkoh Hilir	0-25
4	Maliku	Maliku Baru	0-25
5	Kahayan Hilir	Pulang Pisau	0-25
6	Jabiren Raya	Jabiren	0-25
7	Kahayan Tengah	Bukit Rawi	25-50
8	Banama Tingang	Bawan	50-100

Sumber: Kabupaten Pulang Pisau Dalam Angka Tahun 2018

2.1.1.4. Geologi dan Tanah

Berdasarkan peta geologi formasi geologi yang ada di wilayah Kabupaten Pulang Pisau, tersusun atas formasi aluvium *Qa) yang terbentuk sejak zaman Holosen dan formasi Batuan Api (Trv). Formasi Aluvium (Qa) merupakan formasi yang tersusun dari bahan-bahan liat kaolinit dan debu bersisipan pasir, gambut, kerakal dan bongkahan lepas, merupakan endapan sungai dan rawa. Sementara formasi Batuan Gunung Api (Trv) merupakan formasi yang tersusun dari batuan breksi gunung api berwarna kelabu kehijauan dengan komponennya terdiri dari andesit, basal dan rijang. Bahan-bahan ini terkumpul dengan basal yang berwarna coklat kemerahan.

Jenis tanah yang ada di wilayah Kabupaten Pulang Pisau juga mengikuti pola kondisi topografinya. Di bagian Selatan, jenis tanah yang dominan adalah tanah gambut dan tanah aluvial, terutama pada bagian Selatan Kabupaten Pulang Pisau yang kondisi drainasenya kurang bagus. Sedangkan jenis tanah yang ada di bagian utara



didominasi tanah podsoil dan aluvial. Pada daerah-daerah pinggir sungai umumnya didominasi oleh tanah aluvial yang berasal dari endapan sungai.

2.1.1.5. Hidrologi

Kabupaten Pulang Pisau memiliki perairan yang meliputi danau, rawa-rawa, dan dilintasi jalur sungai. Sungai yang termasuk wilayah Kabupaten Pulang Pisau, yaitu :

- a. Sungai Kahayan dengan panjang 626 km;
- b. Sungai Sebangau dengan panjang 180 km;
- c. Sungai Anjir Kalampan dengan panjang \pm 14,6 km, yang menghubungkan Mandomai Kecamatan Kapuas Barat (Kabupaten Kapuas) dan Pulang Pisau mengarah ke Palangka Raya. Sungai Anjir Kalampan yang masuk wilayah Kabupaten Pulang Pisau sepanjang 6,5 km;
- d. Sungai Anjir Basarang dengan panjang \pm 24 km, menghubungkan Kuala Kapuas (Kabupaten Kapuas) dengan wilayah Kabupaten Pulang Pisau. Sungai Anjir Basarang yang masuk Wilayah Kabupaten Pulang Pisau sepanjang 7 km;
- e. Sungai Terusan Raya dengan panjang \pm 18 km yang menjadi jalur transportasi sungai dari Kuala Kapuas ke Bahaur Kecamatan Kahayan Kuala melalui Terusan Batu. Sungai Terusan Raya yang masuk wilayah Kabupaten Pulang Pisau sepanjang 6 km;
- f. Daerah pantai / pesisir Laut dengan bentangan pantai sepanjang \pm 153,4 km dari timur ke barat.



Tabel 2.3

Nama Sungai Menurut Panjangnya di Kabupaten Pulang Pisau

No	Nama Sungai	Panjang (km)
1	Sungai Kahayan	626,00
2	Sungai Sebangau	180,00
3	Sungai Anjir Kalampan	6,50
4	Sungai Anjir Basarang	7,00
5	Sungai Terusan Raya	6,00

Sumber: Kabupaten Pulang Pisau Dalam Angka Tahun 2018

2.1.1.6. Klimatologi

Kabupaten Pulang Pisau pada umumnya termasuk daerah yang beriklim tropis dengan kelembaban yang cukup tinggi, suhu udara berkisar antara 26,5⁰C – 27,5⁰C dengan suhu rata-rata maksimum 32,5⁰C dan minimum 22,9⁰C. Sebagai daerah yang beriklim tropis, wilayah Kabupaten Pulang Pisau rata-rata mendapat penyinaran matahari diatas 50%. Berdasarkan klasifikasi Oldeman (1975), tipe iklim wilayah Kabupaten Pulang Pisau termasuk tipe iklim B1, yaitu wilayah dengan bulan basah terjadi antara 7 – 9 bulan (curah hujan > 200 mm/bulan) dan bulan kering (curah hujan < 100 mm/bulan kurang dari 2 bulan. Hujan terjadi hampir sepanjang tahun dan curah hujan terbanyak jatuh pada bulan Oktober - Desember serta Januari - Maret yang berkisar antara 2.000 – 3.500 mm setiap tahun, sedangkan bulan kering jatuh pada bulan Juni – September.



Tabel 2.4
Rata-rata Suhu Udara dan Kelambaban Relatif Setiap Bulan
Di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016

Bulan	Suhu Udara (Celcius)			Rata-Rata Kelembaban Relatif (%)
	Maks	Min	Rata-Rata	
Januari	35,4	23,2	27,7	83,8
Februari	34,8	23,0	27,1	86,9
Maret	35,6	21,0	28,0	84,6
April	35,2	24,0	28,2	84,6
Mei	35,1	23,1	28,6	83,7
Juni	34,2	23,0	27,7	83,4
Juli	34,8	22,2	27,8	81,8
Agustus	35,2	21,4	27,9	79,1
September	34,5	22,5	27,4	81,9
Oktober	35,3	23,0	27,7	81,3
November	35,0	23,2	27,8	83,3
Desember	34,7	22,3	27,2	83,8

Sumber: Kabupaten Pulang Pisau Dalam Angka Tahun 2018

Tabel 2.5
Rata-rata Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Setiap Bulan
Di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016

Bulan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan
Januari	323	21
Februari	476	24
Maret	255	15
April	308	18
Mei	285	20
Juni	166	10
Juli	191	10
Agustus	76	5
September	209	12
Oktober	314	15
November	401	16
Desember	232	27

Sumber: Kabupaten Pulang Pisau Dalam Angka Tahun 2018



2.1.1.7. Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.6025/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2017 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah Sampai Dengan Tahun 2016 yang telah diolah secara spasial oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau maka didapat luasan kawasan hutan sebagai berikut :

- Areal Penggunaan lainnya dengan luas : 2.135,17 km²
- Hutan Lindung dengan luas : 2.404,72 km²
- Hutan Produksi dengan luas : 2.459,97 km²
- Hutan Produksi Konversi dengan luas : 297,35 km²
- Hutan Produksi Terbatas dengan luas : 99,76 km²
- KSA/KPA dengan luas : 189,70 km²
- Sungai dengan luas : 129,90 km²
- Taman Nasional dengan luas : 1.976,42 km²

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan analisis mengenai kondisi wilayah Kabupaten Pulang Pisau maka dapat disimpulkan potensi wilayah yang layak dikembangkan, yaitu sebagai berikut :

a. Pertanian

Kecamatan yang memiliki potensi untuk pengembangan kawasan tanam pangan (padi, jagung, kedelai dan sebagainya) terkonsentrasi di Kecamatan Pandih batu dan Kecamatan Maluku dimana nilai produksi untuk komoditas tersebut terbesar nomor dua untuk wilayah



Kalimantan Tengah. Hortikultura yang meliputi (buah-buahan dan sayur-sayuran) terkonsentrasi di Kecamatan Maliku dan Kecamatan Pandih Batu.

Dari beberapa komoditas di atas dapat disajikan dalam tabel dibawah ini antara lain luas panen, produktivitas dan produksi mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.6
Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2017

No	Uraian	Satuan	Capaian (tahunan)				
			2013	2014	2015	2016	2017
A. Tanaman Pangan							
1	Luas Panen Tanaman Pangan						
	- Padi	Ha	34,576	43,831	47,594	52,335	49,228
	- Jagung	Ha	146	100	829	984	411
	- Kedelai	Ha	192	12	317	1,074	1,859
	- Kacang Tanah	Ha	48	11	25	56	22
	- Ubi Kayu	Ha	317	349	338	463	351
	- Ubi Jalar	Ha	207	85	151	117	55
2	Produktivitas Tanaman Pangan						
	- Padi	Ton/ha	3.48	3.72	3.83	3.07	3.19
	- Jagung	Ton/ha	3.22	3.28	3.29	3.28	3.34
	- Kedelai	Ton/ha	1.17	1.00	1.07	1.37	1.19
	- Kacang Tanah	Ton/ha	1.13	1.18	1.12	1.14	1.09
	- Ubi Kayu	Ton/ha	11.97	12.01	11.96	17.53	52.01
	- Ubi Jalar	Ton/ha	7.10	7.08	8.96	9.26	11.40
3	Produksi Tanaman Pangan						
	- Padi	Ton	120,459	163,219	182,285	160,676	157,256
	- Jagung	Ton	470	328	2,272	3,230	1,374
	- Kedelai	Ton	225	12	338	1,468	2,217
	- Kacang Tanah	Ton	54	13	28	64	24
	- Ubi Kayu	Ton	3,795	4,192	4,042	8,124	18,254
	- Ubi Jalar	Ton	1,470	602	1,353	1083	627
B. Hortikultura							
1.	Luas Panen Tanaman Hortikultura						
	- Buah-Buahan	Pohon	833,694	777,705	626,575	273,133	14,162
	- Sayur-Sayuran	Ha	676	21,671	10,955	11,524	3,195



No	Uraian	Satuan	Capaian (tahunan)				
			2013	2014	2015	2016	2017
2.	Produktivitas Hortikultura						
	- Buah-Buahan	Ku	0.10	0.23	0.33	0.44	0.60
	- Sayur-Sayuran	Ku	4.2	2.06	5.05	3.46	6.49
3.	Produksi Hortikultura						
	- Buah-Buahan	Ku	82,085	178,520	205,257	118,881	84,194
	- Sayur-Sayuran	Ku	3,219	44,916	55,273	39,854	20,729

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018

b. Perkebunan

Komoditas utama yang menjadi produksi tanaman perkebunan di Pulang Pisau antara lain :

- Karet
- Kelapa dalam
- Kelapa sawit
- Kopi

Dari beberapa komoditi diatas dapat disajikan dalam tabel dibawah ini antara lain luas tanam, luas panen, produksi dan produktivitas mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.7
Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Sektor Perkebunan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2017

No	Uraian	Satuan	Capaian (tahunan)				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Luas Tanam (TBM)						
	- Karet	Ha	14,416.00	13,612.00	11,326.50	15,698.00	14,297.00
	- Kelapa Dalam	Ha	1,102.00	906.00	342.00	363.00	280.00
	- Kelapa Sawit	Ha	986.00	1,210.00	1,463.00	2,005.00	2,568.00
	- Kopi	Ha	115.00	92.00	96.00	10.50	10.00
2.	Luas Panen (TM)						
	- Karet	Ha	17,714.00	18,671.00	20,861.50	21,725.50	22,458.00



No	Uraian	Satuan	Capaian (tahunan)				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Kelapa Dalam	Ha	6,776.00	5,738.00	5,452.00	5,074.50	4,841.50
	- Kelapa Sawit	Ha	-	-	535.00	903.000	1,536.00
	- Kopi	Ha	198.00	146.00	208.00	275.00	233.50
3.	Produksi						
	- Karet	Ton	14,021.80	13,863.22	13,962.17	21,390.56	20,861.75
	- Kelapa Dalam	Ton	6,994.77	6,351.28	5,584.92	5,495.12	5,924.68
	- Kelapa Sawit	Ton	-	-	498.08	2,031.57	4,499.00
	- Kopi	Ton	121.44	119.40	176.90	236.03	184.90
4.	Produktifvas						
	- Karet	Kg/Ha	791.57	742.50	669.28	984.58	928.92
	- Kelapa Dalam	Kg/Ha	1,032.29	1,106.88	1,024.38	1,082.89	1,223.73
	- Kelapa Sawit	Kg/Ha	-	-	0.93	2,249.80	2,929.04
	- Kopi	Kg/Ha	613.33	817.81	850.48	858.27	791.86

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018

c. Peternakan

Kabupaten Pulang Pisau merupakan salah satu penghasil ternak terbanyak di Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya ternak sapi potong dan ayam pedaging dimana menjadi daerah penyuplai terbanyak untuk Kota Palangkaraya. Jumlah sapi potong di Kabupaten Pulang Pisau tahun 2017 sebanyak 8.629 ekor dengan penyebaran terbanyak di Kecamatan Maluku dan Kecamatan Pandih Batu. Sedangkan untuk ayam pedaging tercatat sebanyak 1.877.486 ekor yang dihasilkan di Kabupaten Pulang Pisau pada tahun 2017, dimana penyebaran terbanyak tercatat di Kecamatan Kahayan Hilir dan Kecamatan Jabiren Raya. Pengembangan peternakan di Kabupaten Pulang Pisau berskala kecil ataupun usaha rumah tangga sementara lahan yang tersedia sangat cocok untuk usaha ini. Melihat potensi dan peluang investasi yang ada di daerah ini masih sangat potensial untuk pengembangan terutama untuk penggemukan sapi potong, kerbau, kambing, babi dan



unggas. Pengelompokan kecamatan berdasarkan potensi pengembangan peternakan adalah :

- Sapi Potong : Kecamatan Maluku dan Kecamatan Pandih Batu
- Kerbau : Kecamatan maliku dan Kecamatan Kahayan Hilir
- Kambing : Kecamatan Maluku dan Kecamatan Pandih Batu
- Babi : Kecamatan Kahayan Tengah dan kecamatan Banama Tingang
- Ayam Broiler : Kecamatan Jabiren

Dari beberapa jenis ternak diatas dapat disajikan dalam tabel dibawah ini antara lain populasi ternak dan produksi daging mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.8
Populasi dan Produksi Sektor Peternakan
Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2017

No	Jenis Ternak	Satuan	Capaian (tahunan)					
			2013	2014	2015	2016	2017	
1.	Populasi Ternak							
	- Sapi Potong	Ekor	7,206	9,062	8,825	9,293	8,629	
	- Kerbau	Ekor	4	45	15	15	-	
	- Kambing	Ekor	8,873	9,771	8,397	8,817	6,642	
	- Babi	Ekor	7,815	9,181	6,996	7,346	8,229	
	- Ayam Buras	Ekor	288,898	317,171	129,427	132,663	181,658	
	- Itik	Ekor	9,831	12,904	11,373	11,744	8,172	
	- Ayam Broiler	Ekor	525,000	864,151	916,082	1,045,622	2,087,455	
2.	Produksi Daging							
	- Sapi Potong	Kg	76,873	76,873	61,742	64,142	77,518	
	- Kambing	Kg	16,420	6,186	6,366	6,502	2,694	
	- Babi	Kg	155,632	114,383	74,685	76,236	27,576	
	- Ayam Buras	Kg	193,834	240,259	98,041	100,492	88,964	
	- Itik	Kg	5,384	7,067	6,229	6,384	6,535	
	- Ayam Broiler	Kg	787,500	1,296,227	1,374,123	1,568,433	216,525	

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018



d. Perikanan

Perairan Umum (Sungai dan Danau)

Kabupaten Pulang Pisau memiliki Daerah Aliran Sungai (DAS) yang meliputi sungai dan anak sungai dengan panjang 825,5 km, di Daerah Aliran Sungai tersebut terbagi menjadi 5 (lima) buah aliran sungai antara lain :

- Sungai Kahayan
- Sungai Sebangau;
- Sungai Anjir Kalampan;
- Sungai Anjir Basarang; dan
- Sungai Terusan Raya.

Kawasan ini mempunyai potensi untuk perikanan budidaya, tangkap dan daerah konservasi (*closed season*) atau daerah *reservart* serta dapat pula menjadi bisnis agro wisata. Ikan air tawar di Kabupaten Pulang Pisau didominasi oleh Cybrlinidae 50 jenis (47,6%), Balitoridae 30 jenis (12,38%) dan Cabitadae 7 jenis (6,7%).

Kawasan Pesisir dan Laut

Wilayah pesisir di Kabupaten Pulang terdapat di Kecamatan Kahayan Kuala dan Kecamatan Sebangau Kuala dengan panjang mencapai $\pm 153,6$ km. Kabupaten Pulang Pisau juga berbatasan langsung dengan Laut Jawa, sehingga mempunyai potensi untuk mengembangkan perikanan laut. Dua kecamatan di atas memiliki potensi perikanan laut yaitu dengan produksi perikanan laut terbesar ada di Kecamatan Kahayan Kuala. Dengan adanya potensi perikanan tersebut, diharapkan mampu memicu munculnya serta berkembangnya industri hilirisasi untuk warga lokal, seperti industri ikan asin dan industri makanan lainnya dengan bahan baku perikanan laut. Pada akhirnya, keadaan ini menjadi *multiplier effect* yang mampu menyerap tenaga kerja serta memberikan nilai



tambah untuk perekonomian di Kabupaten Pulang Pisau. Pada tahun 2013 sampai tahun 2017 jumlah Produksi Perikanan Laut Kabupaten Pulang Pisau dilihat pada tabel 2.9 berikut ini :

Tabel 2.9
Tabel Produksi dan Konsumsi Perikanan Kabupaten Pulang Pisau
Tahun 2013-2017

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1	Produksi					
	Produksi Perikanan (Ton)	23.469,82	23.731,99	22.249,55	23.058,02	23.493,99
	Target Daerah (Ton)	18.147,94	21.099,21	25.050,64	27.275,53	29.500,42
	Presentase Produksi Perikanan (%)	129,32	112,48	88,82	84,54	79,64
2	Konsumsi					
	Konsumsi Ikan (Kg)	35,96	44,41	32,68	32,67	31,86
	Target Daerah (Kg)	37,86	37,98	39,11	40,29	41,5
	Persentase Konsumsi Ikan (%)	94,98	116,93	83,56	81,09	76,77

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018

e. Kehutanan

Luas hutan Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan SK.6025/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.10
Luas Hutan Kabupaten Pulang Pisau
Berdasarkan SK.6025/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2017

No	Jenis Hutan	Luas (Km ²)
1	Hutan Lindung(HL)	2.404,72
2	Hutan Produksi (HP)	2.459,97
3	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	99,76
4	Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK)	297,35
5	Hutan Suaka Alam / Taman Nasional :	
	- KSA/KPA	189,70
	- Taman Nasional Sebangau	1.976,42

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pulang Pisau Tahun 2018



Sub sektor kehutanan mengalami penurunan karena adanya pengetatan *illegal logging*/moratorium perijinan HPH yang berdampak pada penurunan hasil hutan terutama kayu-kayu log. Selain itu potensi hasil hutan non kayu yang lain yaitu rotan yang bisa dikelola sebagai bahan industri kerajinan/mebel dan lain-lain.

Tabel 2.11
Luas Kawasan Hutan dan Perairan Menurut Kecamatan di Kabupaten Pulang Pisau (hektar) Tahun 2015

Kecamatan	Hutan Lindung (Km ²)	Taman Nasional (Km ²)	Hutan Produksi (Km ²)	Hutan Produksi Konversi (Km ²)	Area Penggunaan Lainnya (Km ²)	Sungai	KSA/KPA (Km ²)	Hutan Produksi Terbatas (Km ²)
1	2	3	4	5	7	8	9	10
Kahayan Kuala	438,65	-	605,66	-	164,78	23,77	54,48	21,49
Sebangau Kuala	647,31	1,970,75	1,320,10	-	162,74	10,94	21,61	-
Pandih Batu	55,80	-	77,97	-	300,26	14,26	-	4,46
Maliku	24,10	-	28,69	-	279,15	9,54	-	70,12
Kahayan Hilir	197,70	5,67	64,22	-	271,17	13,98	-	3,68
Jabiren Raya	646,30	0,01	15,07	-	421,78	29,03	-	-
Kahayan Tengah	394,86	-	154,94	164,63	251,55	14,72	113,61	-
Banama Tingang	-	-	193,33	132,72	283,74	13,66	-	-
P. Pisau	2.404,72	1.976,42	2.459,97	297,35	2.135,17	129,90	189,70	99,76

Sumber: Kabupaten Pulang Pisau Dalam Angka Tahun 2018

f. Industri

Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Pulang Pisau, perkembangan sektor industri di sampai dengan tahun 2017 masih belum berkembang secara signifikan, Hal ini tergambar dari jumlah perusahaan industri manufaktur yang berdiri sebanyak 240 usaha dan hanya mampu menyerap tenaga kerja 631 orang. Hal ini tentunya masih memerlukan perhatian pemerintah daerah sehingga penyediaan lapangan kerja di sektor industri manufaktur dapat lebih meningkat. Adapun jenis industri manufaktur



tersebut sebagian besar terdiri dari industri rumah tangga di bidang pengolahan makanan yang sebanyak 118 usaha, serta industri kerajinan tangan sebanyak 78 usaha.

Tabel 2.12
Jumlah Perusahaan, Tenaga Kerja, Nilai Bahan Baku, Nilai Investasi, dan Nilai Produksi Menurut Klasifikasi Industri di Kabupaten Pulang Pisau, Tahun 2017

Klasifikasi Industri	Perusahaan	Tenaga Kerja	Nilai Investasi (Rp)	Nilai Produksi (Rp)	Nilai Bahan Baku
Makanan	118	260	320.988.000	5.251.534.000	309.734.000
Sandang	-	-	-	-	-
Kimia dan Bahan Bangunan	44	202	418.405.000	4.180.930.000	338.072.000
Logam, Mesin dan Elektronika	-	-	-	-	-
Kerajinan	78	169	82.500.000	1.746.232.000	47.500.000
Pulang Pisau	240	631	821.893.000	11.178.696.000	695.306.000

Sumber: Kabupaten Pulang Pisau Dalam Angka Tahun 2018

Kabupaten Pulang Pisau juga merupakan salah satu sentra produksi dan penghasil rotan di Provinsi Kalimantan Tengah, namun industri rotan sekarang ini mengalami penurunan hal ini merupakan dampak dari kebijakan larangan ekspor rotan oleh pemerintah pusat. Pemerintah melarang kegiatan ekspor, baik dalam bentuk mentah, rotan asalan, maupun setengah jadi. Kebijakan ini diterbitkan untuk mendorong hilirisasi industri. Di Kabupaten Pulang Pisau salah satu upaya yang dilakukan pemerintah daerah adalah mengaktifkan kembali usaha masyarakat pengrajin anyaman rotan yang merupakan ciri khas masyarakat Suku Dayak. Berikut adalah industri kecil dan menengah produk anyaman rotan per 30 Juni 2018.



Tabel 2.13
Produk Anyaman Rotan Industri Kecil dan Menengah Per 30 Juni 2018

No.	Nama Perusahaan	Nama Pemilik	Alamat	Kapabilitas Produksi		Nilai Produksi (Rp.000)	% Pemasaran Ekspor
				Jumlah	Satuan		
1.	Nurmila	Nurmila	Bereng Kalingu, Kec. Kahayan Hilir	564	Buah	38.400	0
2.	Wiwin Kusmentie	Wiwin Kusmentie	Bereng Kalingu, Kec. Kahayan Hilir	564	Buah	38.400	0
3.	Sumbu Kurung	Ratna	H.M Sanusi	800	Buah	31.000	0
4.	Jawet Sama Arep	Maryenie	Singaruntuh	1550	Buah	125.350	0
5.	Jawet Bersama	Sahdin	Trans Kalimantan	455	Buah	447.600	0
6.	Uwei Pabelom	Tutie	Singaruntuh	2052	Buah	126.600	0
7.	Jawet Itah	Albidurianto	Gohong	2760	Buah	354.000	0
8.	Pahari	Marlinie	Singaruntuh	545	Buah	97.600	0

Sumber : Dinas Perindagkop UMKM Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018

Kerajinan anyaman rotan ini diolah menjadi beberapa produk antara lain berbagai macam jenis tas, tikar, topi, kursi, hiasan dinding, tempat tissue, tempat pulpen, keranjang dan produk-produk lainnya sesuai dengan pesanan dari konsumen dengan motif khas Dayak Ngaju serta pilihan warna dan ukuran yang bermacam-macam serta model dan design yang disesuaikan dengan keinginan konsumen. Lokasi bahan baku industri rotan di Kabupaten Pulang Pisau terletak pada Desa Pilang, Desa Gohong, Kelurahan Kalawa dan Desa Bukit Rawi. Kendala industri anyaman rotan ini adalah kebutuhan pelengkap anyaman, misalnya kulit belum dapat mencukupi kebutuhan.

Selain industri anyaman rotan, industri pangan merupakan salah satu industri yang sedang dikembangkan di Pulang Pisau. Jumlah pelaku industri kecil dan menengah produk pangan tahun 2017 tercatat sebanyak 122, pemilik dengan bentuk badan usaha perorangan yang tersebar pada beberapa kecamatan. Lebih lanjut dapat disimak pada tabel berikut :



Tabel 2.14
Jumlah Pelaku Industri Kecil dan Menengah Produk Pangan
Tahun 2017

No.	Kecamatan	Jumlah (Badan Usaha)	Bentuk Badan Usaha
1.	Kahayan Hilir	15	PO
2.	Maliku	64	PO
3.	Pandih Batu	37	PO
4.	Kahayan Kuala	6	PO

Sumber : Dinas Perindagkop UMKM Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018

Program pengembangan pangan secara luas atau *food estate* sedang dikembangkan untuk menjaga ketersediaan pasokan pangan di daerah dan akhirnya mampu menjaga kestabilan harga pangan. *Food Estate* mendekatkan sentra produksi bahan pangan dengan konsumen, sehingga kebutuhan pangan lebih terjangkau.

g. Pariwisata

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pariwisata merupakan industri jasa, berkaitan dengan transportasi, tempat tinggal, makanan, minuman, dan jasa lainnya seperti bank, asuransi, keamanan. Pariwisata menawarkan tempat istirahat, budaya, petualangan. Kabupaten Pulang Pisau sebagai bagian dari keindahan alam Indonesia selalu berusaha menggali dan mengembangkan potensi wilayah dalam bidang pariwisata. Luasnya wilayah Kabupaten Pulang Pisau yaitu 998.001 Ha tentu memiliki potensi alam yang besar. Potensi alam tersebut menciptakan daya tarik untuk dijadikan sebagai objek wisata. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor andalan untuk menghasilkan PAD. Kabupaten Pulang Pisau memiliki potensi wisata antara lain :



a. Wisata Alam :

Yang dimaksud dengan potensi wisata alam adalah keadaan, jenis flora dan fauna suatu daerah, bentang alam seperti pantai, hutan, pegunungan dan lain-lain (keadaan fisik suatu daerah). Potensi Wisata Alam di Kabupaten Pulang Pisau antara lain :

- a. Pantai Cemantan di Kecamatan Kahayan Kuala
- b. Danau Sabuah di desa Tuwung, Kecamatan Kahayan Tengah,
- c. Danau Batu di desa Tuwung, Kecamatan Kahayan Tengah
- d. Danau Lais di daerah Kahayan Tengah
- e. Pulau Mintin di Desa Mintin, Kecamatan Kahayan Hilir
- f. Danau Bagantung di desa Tanjung Pusaka Kecamatan Jabiren Raya
- g. Hutan Desa Tangkahan di Desa Tangkahan, Kecamatan Banama Tingang
- h. Taman Nasional Sebangau, di Kecamatan Sebangau Kuala
- i. Pulau Selat Nusa di Kecamatan Jabiren raya

b. Wisata Sejarah

- a. Rumah Betang Buntoi di desa Buntoi ,Kecamatan Kahayan Hilir
- b. Situs Rumah Bersejarah “Matal Uning” dan “Djaga Bahen”
 - Rumah Tua Matal Uning terletak di Desa Bereng Kecamatan Kahayan Hilir,
 - Rumah Tua Djaga Bahen .
- c. Pasah Patahu, adalah tempat pemujaan kepada leluhur penjaga/pemelihara desa dari pengaruh jahat. Pasah patahu ditempatkan ditengah desa atau ditempatkan di tempat yang aman. Di Kabupaten Pulang Pisau terdapat 3 (tiga) lokasi pasha patahu.



Antara lain pada Kecamatan Kahayan Hilir, Kecamatan Jabiren dan Kecamatan Kahayan Tengah.

d. Sandung, adalah tempat menyimpan tulang orang yang sudah meninggal. Di Kabupaten Pulang Pisau memiliki beberapa sandung, diantaranya :

1. Sandung Tamanggung Lawak Surya Jaya Pati
2. Sandung Saha
3. Sandung Ngabe Bire
4. Sandung Silay

c. Wisata Buatan Manusia

Potensi wisata manusia juga sebagai daya tarik wisata berupa, pementasan tarian, pementasan atau pertunjukan seni budaya suatu daerah.

a. Taman Sumbu Kurung

Taman “Sumbu Kurung” adalah Taman ditepi Sungai Kahayan yang memiliki pesona tersendiri karena disana kita dapat menikmati keindahan panorama sungai dan daya tarik tersendiri sebagai wisata keluarga dengan melepas matahari terbenam di sore hari. Letak Taman Sumbu Kurung di Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir. Taman Sumbu Kurung merupakan taman kota yang sangat berpotensi untuk dikembangkan sebagai pusat objek pariwisata di Kabupaten Pulang Pisau.

Untuk mempertahankan serta meningkatkan daya tarik tersebut taman sumbu kurung tidak cukup dengan kondisi saat ini, diperlukan sebuah perencanaan pengembangan pariwisata ini untuk lebih memiliki nilai lebih sebagai daya tarik tersebut diantaranya dengan perencanaan



pengembangan Pariwisata Taman “Sumbu Kurung” melalui Wisata Susur Sungai, Wisata Kuliner dan Wisata Budaya di Kabupaten Pulang Pisau

Dalam membangun destinasi pariwisata dibutuhkan biaya yang sangat besar dalam mendukung sarana dan prasarana, terutama akses menuju tempat wisata tersebut. Kendala yang dihadapi Pemerintah daerah saat ini adalah dengan luasnya wilayah yang tersebar akses kemudahan menuju ke tempat wisata tersebut belum optimal. Dalam rangka meningkatkan pendapatan nasional dan penciptaan lapangan kerja dan kesempatan usaha masyarakat, destinasi pariwisata dapat dikembangkan dengan seluas-luasnya. Selain itu, pariwisata juga berperan dalam pemerataan pendapatan dan mendukung perkembangan dan pelestarian seni budaya dan keindahan alam di Kabupaten Pulang Pisau. Untuk mewujudkan hal tersebut Pemerintah Daerah telah berusaha mengeluarkan berbagai kebijakan di bidang Pariwisata untuk menarik turis datang, baik dari dalam negeri (turis domestik) maupun dari luar negeri (turis asing).

Berdasarkan RTRW Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018-2038 wilayah Kabupaten Pulang pisau telah dibagi menjadi beberapa kawasan strategis pengembangan. Kawasan strategis sendiri merupakan kawasan yang di dalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang di wilayah sekitarnya, kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya, dan atau peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kawasan strategis Kabupaten Pulang Pisau meliputi :

1. Kawasan strategis berdasarkan pertimbangan aspek ekonomi meliputi :



- a. Kawasan Perkotaan Pulang Pisau dan Perkotaan Bahaur;
 - b. Kawasan Minapolitan di Kecamatan Kahayan Hilir, Kecamatan Jabiren Raya dan Kecamatan Kahayan Kuala;
 - c. Kawasan Agropolitan di semua Kecamatan di Kabupaten;
 - d. Kawasan Industri di Kecamatan Jabiren Raya, Kecamatan Kahayan Hilir dan Kecamatan Kahayan Kuala;
 - e. Kawasan pesisir di Kecamatan Sebangau Kuala dan Kecamatan Kahayan Kuala.
2. Kawasan strategis berdasarkan pertimbangan aspek sosial budaya berupa kawasan budaya dayak di desa Pangkoh Kecamatan Pandih Batu dan Desa Bukit Rawi Kecamatan Kahayan Tengah.
 3. Kawasan strategis berdasarkan pertimbangan aspek daya dukung lingkungan meliputi
 - a. Kawasan Ekosistem Air Hitam di Kecamatan Kahayan Kuala; dan
 - b. Kawasan Hutan Kota Bereng Kecamatan Kahayan Hilir.

Pembagian kawasan strategis di wilayah Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan RTRW Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018-2038 adalah sebagai berikut :



h. Daya Dukung dan Daya Tampung (Berdasarkan KLHS RPJMD Kabupaten Pulang Pisau 2018-2023)

Perumusan skenario merupakan alternatif proyeksi terhadap kondisi lingkungan hidup dan capaian tujuan pembangunan berkelanjutan dengan menggunakan analisis secara *Business as Usual* (BAU) terhadap tren perubahan kondisi lingkungan dan pencapaian target TPB pada tahun 2023 berdasarkan kinerja Kabupaten Pulang Pisau yang telah dilakukan selama ini. Kondisi lingkungan hidup terutama terkait dengan status daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta jasa ekosistem di Kabupaten Pulang Pisau. Proyeksi secara umum dilakukan dengan pendekatan linier berdasarkan tren yang terjadi saat ini serta *gap* terhadap indikator dalam TPB nasional dalam Perpres No.59 tahun 2017 yang merupakan target sampai dengan 2030.

Kabupaten Pulang Pisau sebelumnya telah menyusun KLHS Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2009 – 2029 yang di dalamnya menghitung proyeksi kondisi lingkungan hidup sampai dengan tahun rencana yaitu 2029. Proyeksi kondisi lingkungan hidup tersebut didasarkan pada rencana tata ruang yang dibuat baik dalam rencana struktur ruang maupun rencana pola ruang. Proyeksi lingkungan hidup pada penyusunan KLHS RPJMD ini menggunakan pendekatan spasial yang sama dengan KLHS Revisi RTRW tetapi dilakukan sampai tahun 2023 sesuai dengan periode RPJMD Kabupaten Pulang Pisau. Berikut adalah proyeksi kondisi lingkungan hidup Kabupaten Pulang Pisau sampai dengan tahun 2023 :

1. Daya Dukung Air

Berdasarkan analisis, potensi air hujan yang dapat dimanfaatkan dapat mencapai 0,5 milyar m³ per



tahun. Begitu juga, air tanah cukup potensial keberadaanya untuk dimanfaatkan sebagai sumber air baku. Sekalipun ketersediaan air tanah di beberapa kawasan tidak memenuhi baku mutu air minum, tetapi di banyak kawasan kualitasnya memadai. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa Kabupaten Pulang Pisau memiliki potensi sumber daya sebesar 660, 77 juta m³ per tahun.

Kebutuhan air di Kabupaten Pulang Pisau tahun 2017 adalah Hasil perhitungan $DA = 134.876 \times 1.600 \text{ m}^3 = 215.801.600 \text{ m}^3$, dimana separuhnya (107.900.800 m³) adalah untuk memenuhi kebutuhan domestik dan separuhnya lagi (107.900.800 m³) adalah untuk menghasilkan pangan. Berdasarkan proyeksi penduduk dari BPS Kalteng tahun 2020, jumlah penduduk Pulang Pisau mencapai 18.054 jiwa. 2023 dan 2030 maka kebutuhan air adalah 204.885 m³.

Tabel 2.15
Daya Dukung Air Kabupaten Pulang Pisau
Pada Tahun 2023

Uraian	Tahun		
	2017	2023	2030
1	2	3	4
Jumlah Penduduk	128.902	173.730	246.090
Kebutuhan air	215.801.600	277.968.724	393.744.000
Ketersediaan air	665.610.313	665.610.313	665.610.313
Air untuk Pertanian	107.900.800	138.984.362	196.872.000
Daya dukung air	3,08	2,39	1,69

Sumber : Perhitungan Tim KLHS RPJMD Kabupaten Pulang Pisau, 2018

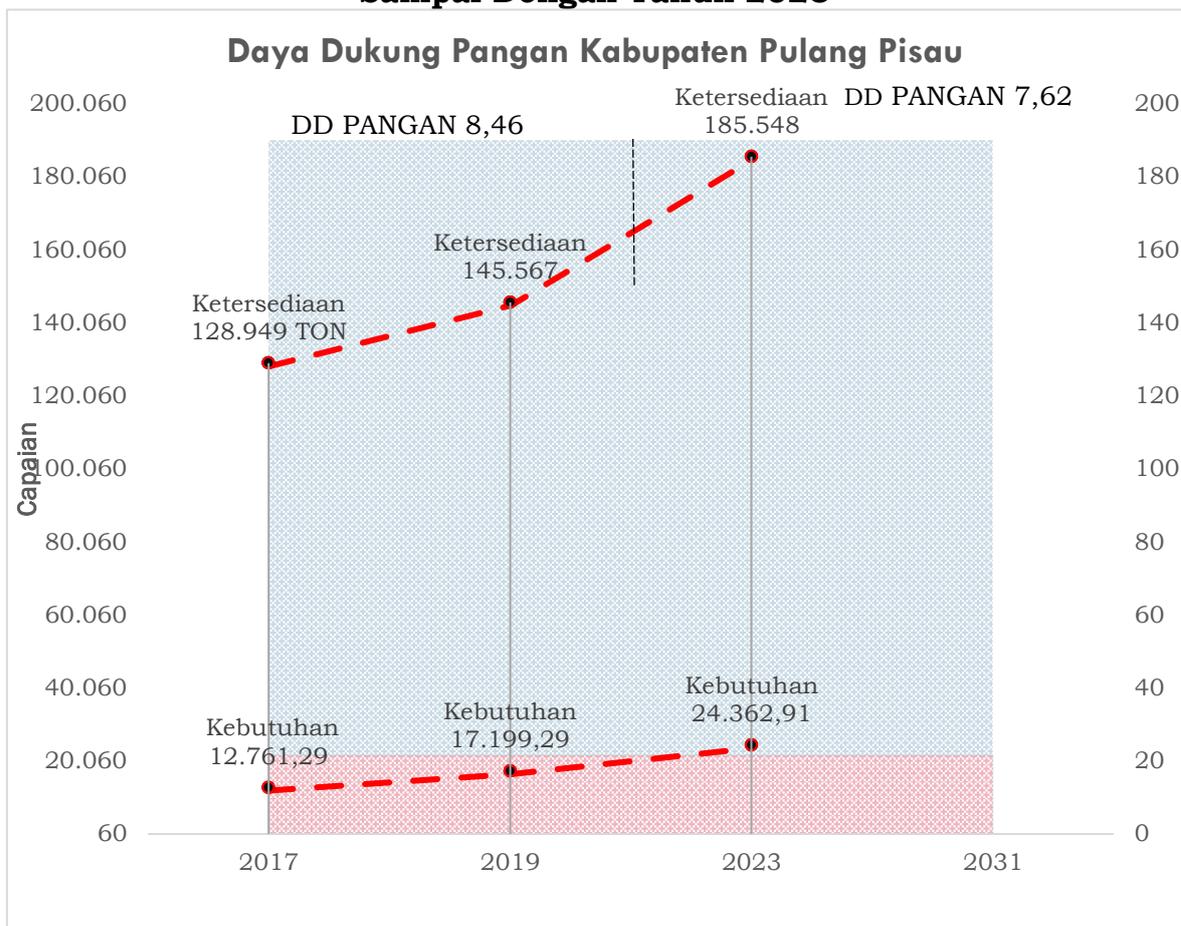
2. Daya Dukung Pangan

Kabupaten Pulang Pisau merupakan kabupaten dengan produksi padi terbesar ke-2 di Provinsi Kalimantan Tengah, setelah Kabupaten Kapuas. Produksi padi Kabupaten Pulang Pisau pada tahun



2017 mencapai 185.298 ton. Selain komoditi padi, komoditi kacang kedelai dan jagung merupakan dua komoditi tanaman pangan yang mengalami peningkatan drastis pada tahun 2017. Perkembangan ini disebabkan adanya program Upaya Khusus (Upsus) oleh Pemkab Pulang Pisau untuk meningkatkan produksi jagung dan kedelai. Adapun program tersebut dilaksanakan melalui gerakan penerapan pengelolaan tanaman terpadu (GPPTT) di beberapa kecamatan. Secara lengkap daya dukung pangan Kabupaten Pulang Pisau disajikan pada Bagan berikut :

Bagan 2.2
Daya Dukung Pangan Kabupaten Pulang Pisau
Sampai Dengan Tahun 2023





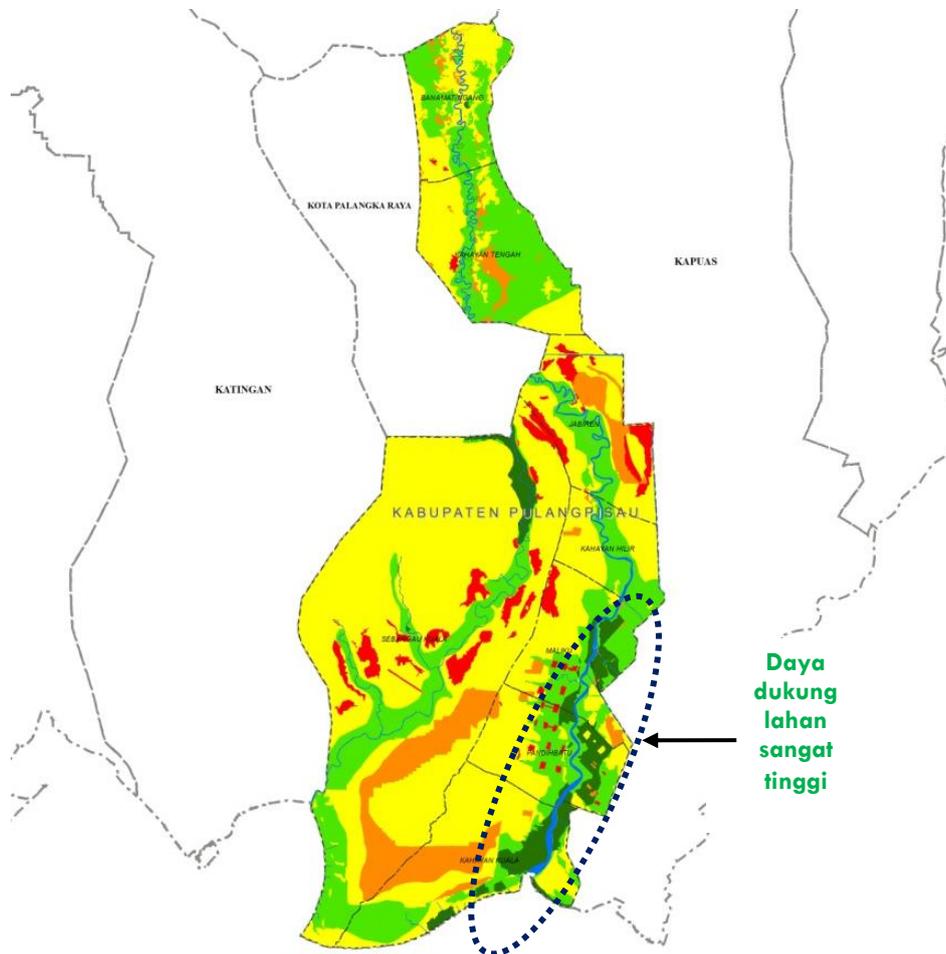
3. Daya Tampung Lahan

Daya tampung lahan merupakan kombinasi antara faktor alam dari kondisi eko region Pulang Pisau dengan kondisi tutupan lahan yang ada saat ini. Pulang Pisau terletak di atas dua kubah gambut besar yang terdiri dari tanah organik sisa-sisa tanaman mati dan membusuk dalam kondisi tergenang. Lahan gambut mencakup lebih dari 64% luas kabupaten, meliputi sebagian besar wilayah tengah dan Selatan. Kedalamannya berkisar antara 0,5 m hingga lebih dari 10 m, dan menyimpan cadangan karbon dalam jumlah yang signifikan.

Kurang lebih 70% wilayah Pulang Pisau adalah kawasan hutan yang diklasifikasikan antara lain sebagai hutan produksi, taman nasional atau wilayah konservasi. Sedangkan sisa wilayah yang tidak tergolong kawasan hutan diklasifikasikan sebagai areal penggunaan lain, mencakup pemukiman, perkebunan, peternakan, pertanian tanaman pangan, dan wilayah transmigrasi.

Terkait dengan lahan untuk budidaya khususnya pertanian tanaman pangan, luas lahan sawah di Kabupaten Pulang Pisau sebesar 92.262 hektar, tegal/kebun sebesar 32.331 hektar, ladang/huma sebesar 5.910 hektar, dan sementara tidak digunakan sebesar 34.427 hektar dengan sistem non irigasi. Namun demikian kemampuan produksi beras rata-rata 6 (enam) kali lipat dari kebutuhan akan pangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa daya dukung lahan/wilayah dalam keadaan surplus. Peta Daya

Dukung Lahan Kabupaten Pulang Pisau digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.3

Peta Daya Dukung Lahan Kabupaten Pulang Pisau

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Pulang Pisau 2018-2023

4. Daya Tampung Air

Berdasarkan hasil identifikasi kualitas air sungai di Pulang Pisau oleh Dinas Lingkungan Hidup dari tahun 2015 – 2017 menunjukkan adanya fluktuasi kondisi yang ditunjukkan oleh status mutu setiap sungai. Jika merujuk pada kondisi pada 3 (tiga) tahun terakhir tersebut maka ada beberapa sungai yang memiliki kondisi sedang –berat. Pengelolaan sungai-sungai tersebut tentunya harus mendapatkan



perhatian pada masa yang akan datang akibat meningkatnya beban cemar yang masuk baik dari kegiatan industri maupun rumah tangga.

Berdasarkan hasil identifikasi kualitas air yang sungai di Pulang Pisau oleh Dinas Lingkungan Hidup di Sungai Kahayan. Pengujian Kualitas Air Sungai Kahayan Sampel air Sungai Kahayan yang diuji kualitas airnya diambil dari 7 (tujuh) kecamatan yang menjadi titik pengambilan maka didapat kesimpulan Parameter yang memiliki nilai tidak memenuhi baku mutu bersifat fluktuatif. Pangkoh memiliki nilai parameter yang tidak memenuhi baku mutu paling banyak, yaitu sebanyak 7 (tujuh) parameter. Bawan dan Bahaur memiliki nilai yang tidak memenuhi baku mutu sebanyak 5 (lima) parameter. Bukit Rawi, Jabiren, Pulang Pisau dan Maluku memiliki nilai yang tidak memenuhi baku mutu sebanyak 4 (empat) parameter.

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Kabupaten Pulang Pisau mempunyai potensi rawan bencana antara lain :

- Kebakaran Hutan dan Lahan ;
- Kebakaran pemukiman ;
- Banjir Rob;
- Banjir kiriman ; dan
- Puting beliung.

Kondisi hidrologi Kabupaten Pulang Pisau memiliki banyak sungai, secara umum pola sungainya adalah pola dendritik dimana salah satu sifat utamanya adalah apabila terjadi hujan merata di seluruh daerah aliran sungai (DAS) maka puncak banjirnya akan demikian tinggi sehingga



mempunyai potensi besar untuk menggenangi daerah-daerah yang ada disekitar aliran sungai, khususnya di bagian hilir sungai. Pada bulan Agustus tahun 2017 banjir terparah terjadi pada 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Banama Tingang dan Kecamatan Kahayan Tengah yang merendam 16 Desa dengan total rumah sebanyak 1.358 rumah penduduk serta berbagai fasilitas umum lainnya seperti sekolah, puskesmas pembantu, kantor pemerintahan desa serta fasilitas lainnya.

Kondisi perubahan iklim global meningkatkan sensitifitas Wilayah Kabupaten Pulang Pisau terhadap bencana. Bencana alam meteorologis dan klimatologis adalah adalah bencana alam yang terjadi karena perubahan iklim yang ekstrim. Bencana alam meteorologis yang paling sering terjadi adalah bencana kekeringan yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan saat musim kemarau dan bencana banjir rob pada saat musim hujan. Dua jenis bencana ini memiliki probabilitas yang tinggi terjadi di kabupaten Pulang Pisau. Pada tahun 2013 sampai tahun 2018, bencana kebakaran hutan terparah terjadi pada tahun 2015 pada bulan Juli s.d November dimana data titik Hotspot terpantau mencapai 4.074 titik dengan luasan tapak bakar mencapai 200.000 ha. Hal tersebut mengakibatkan penurunan kualitas udara PM₁₀ sampai pada level 2.341 mg atau lebih dari 400% dari batas ambang bahaya kualitas udara yang telah ditetapkan. Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Pulang Pisau terkonsentrasi di kecamatan Jabiren dan Kecamatan Kahayan Hilir khususnya di desa Garong dan Gohong yang memiliki kedalaman Gambut terbesar (terdalam) di wilayah Kabupaten Pulang Pisau dimana kedalaman gambut mencapai lebih dari 400 cm.



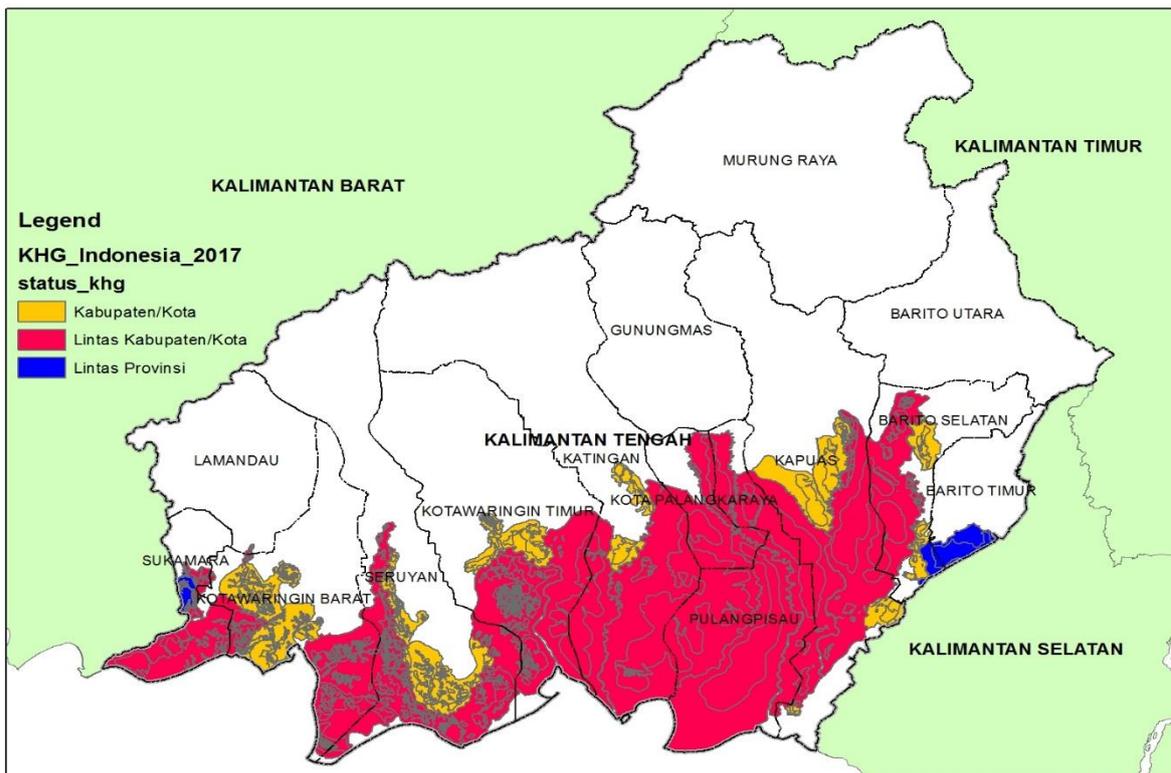
Beberapa indikator yang umum dipergunakan dalam mengukur tingkat kebakaran hutan dan lahan antara lain Titik Panas (*hotspot*) dan luasan tapak bakar (luas kebakaran hutan dan lahan). Pada tahun 2017 jumlah hotspot di Kabupaten Pulang Pisau mencapai 1.628 titik dengan luas tapak bakar mencapai 734,38 Ha. Secara lengkap jumlah *hotspot* dan luasan tapak bakar periode 2013-2017, Persebaran Ekosistem Gambut di Provinsi Kalimantan Tengah, dan Persebaran Hotspot Tahun 2015, 2016, dan 2017 Sebelum Pembangunan Sekat Kanal di Kecamatan Kahayan Hilir dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut berikut ini :

Tabel 2.16

Jumlah Hotspot dan Luas Tapak Bakar di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2017

Tahun	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Hot Spot (Titik)	485	773	4.074	68	1.628
Luas Kebakaran (Ha)	310	4,022.85	217,363	912.89	734.38

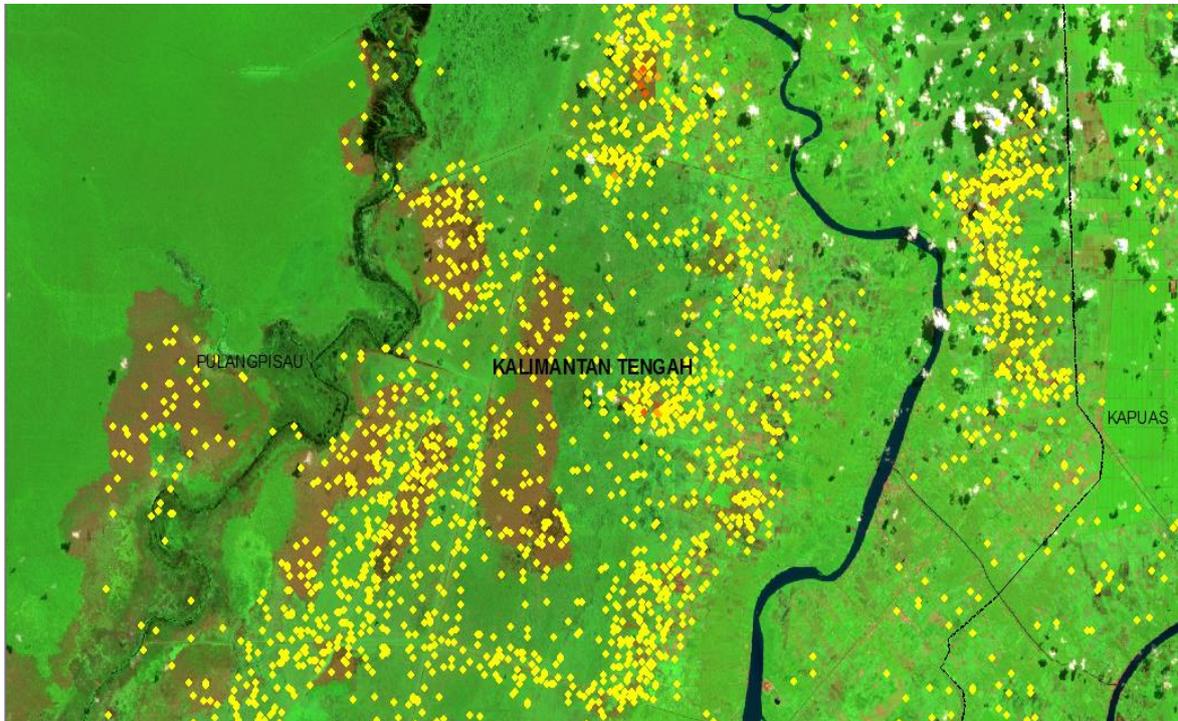
Sumber : Pusdatin BPBD Kab. Pulang Pisau. 2018



Gambar 2.4

Peta Persebaran Ekosistem Gambut di Provinsi Kalimantan Tengah

Sumber: Data USAID Lestari Pulang Pisau, 2018



Gambar 2.5

Persebaran Hotspot Tahun 2015 - 2017 Sebelum Pembangunan Sekat Kanal di Kecamatan Kahayan Hilir

Sumber: Data USAID Lestari Pulang Pisau, 2018

2.1.4. Demografi

Kondisi demografis suatu daerah secara umum tercermin melalui jumlah penduduk. Penduduk Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2017 sebanyak 126.181 jiwa yang terdiri atas 65.688 jiwa penduduk laki-laki dan 60.493 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2016, penduduk Pulang Pisau mengalami pertumbuhan sebesar 0,56 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2017 setiap 100 penduduk perempuan terdapat sekitar 109 penduduk laki-laki.



Kepadatan penduduk di Kabupaten Pulang Pisau tahun 2017 mencapai 14 jiwa/km² dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 4 orang. Kepadatan Penduduk di 8 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Kahayan Hilir dengan kepadatan sebesar 77 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Sebangau Kuala sebesar 2 jiwa/km².

Tabel 2.17
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk
Menurut Kecamatan di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2017

Kecamatan	Penduduk (Jiwa)					Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
	2013	2014	2015	2016	2017	2016 - 2017
Kahayan Kuala	20.265	20.321	20.508	20604	20710	0,51
Sebangau Kuala	8.062	8.081	8.156	8.195	8.236	0,51
Pandih Batu	20.245	20.301	20.487	20.582	20.689	0,51
Maliku	23.482	23.544	23.760	23.872	23.994	0,51
Kahayan Hilir	27.059	27.393	27.460	27.629	27.812	0,66
Jabiren Raya	7.986	8.083	8.103	8.154	8.207	0,66
Kahayan Tengah	7.572	7.592	7.661	7.698	7.737	0,51
Banama Tingang	8.607	8.700	8.710	8.750	8.796	0,51
Pulang Pisau	123.278	124.015	124.845	125.484	126.181	0,56

Sumber: Kabupaten Pulang Pisau Dalam Angka Tahun 2018

Sedangkan Laju pertumbuhan penduduk pada Tahun 2017 mencapai 0,56 persen, dengan *sex ratio* sebesar 109, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan, yang berarti bahwa di Kabupaten Pulang Pisau, setiap 10 penduduk perempuan terdapat sekitar 109 penduduk laki-laki.

Tabel 2.18
Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin
Menurut Kecamatan di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017

Kecamatan	Penduduk (jiwa)										Rasio Jenis Kelamin 2017
	Laki-laki					Perempuan					
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
Kahayan Kuala	10.304	10.297	10.385	10.479	10.590	9.871	9.868	9.936	10.029	10.120	105



Kecamatan	Penduduk (jiwa)										Rasio Jenis Kelamin 2017
	Laki-laki					Perempuan					
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
Sebangau Kuala	4.364	4.361	4.398	4.438	4.485	3.660	3.658	3.683	3.718	3.751	120
Pandih Batu	10.571	10.562	10.654	10.751	10.866	9.584	9.578	9.647	9.736	9.823	111
Maliku	12.064	12.054	12.158	12.268	12.399	11.310	11.304	11.386	11.492	11.595	107
Kahayan Hilir	13.870	14.137	14.179	14.211	14.405	12.943	13.194	13.214	13.249	13.407	107
Jabiren Raya	4.117	4.195	4.208	4.217	4.275	3.395	3.869	3.875	3.886	3.932	109
Kahayan Tengah	3.931	3.938	3.973	4.007	4.052	3.584	3.594	3.619	3.654	3.685	110
Banama Tingang	4.478	4.556	4.562	4.568	4.616	4.065	4.137	4.138	4.142	4.180	110
Total Kabupaten Pulang Pisau	63.699	64.100	64.517	64.939	65.688	58.812	59.200	59.498	59.906	60.493	109

Sumber: Kabupaten Pulang Pisau Dalam Angka Tahun 2018

Penduduk terbanyak pada 2017 berada di Kecamatan Kahayan Hilir sebanyak 27.812 jiwa atau 22,04 persen, diikuti dengan Kecamatan Maliku dan Kecamatan Kahayan Kuala masing-masing sebesar 19,02 persen dan 16,41 persen. Sedangkan Kecamatan yang paling sedikit penduduknya adalah Kecamatan Kahayan Tengah yaitu sebanyak 7.737 jiwa atau 6,13 persen.

Kepadatan penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Kahayan Hilir, yaitu sebesar 77 Jiwa/Km², diikuti oleh Kecamatan Maliku dan Kecamatan Pandih Batu masing-masing sebesar 58 jiwa/Km² dan 39 jiwa/Km². Sedangkan yang rendah tingkat kepadatan penduduknya yaitu Kecamatan Sebangau Kuala sebesar 2 jiwa/Km².

Tabel 2.19
Distribusi dan Kepadatan Penduduk
Menurut Kecamatan di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017

Kecamatan	Luas		Penduduk		Kepadatan Penduduk (Orang/Km)
	Km	%	Jumlah	%	
Kahayan Kuala	1.155,00	12,84	20.710	16.41	18
Sebangau Kuala	3.801,00	42,25	8.236	6,53	2
Pandih Batu	535,86	5,96	20.689	16.40	39
Maliku	413,14	4,59	23.994	19.02	58
Kahayan Hilir	360,00	4,00	27.812	22,04	77



Jabiren Raya	1.323,00	14,7	8.207	6.50	6
Kahayan Tengah	783,00	8,7	7.737	6.13	10
Banama Tingang	626,00	6,96	8.796	6.97	14
Total Kab. Pulang Pisau	8.997,00	100	126.181	100	14

Sumber: Kabupaten Pulang Pisau Dalam Angka Tahun 2018

Sedangkan bila ditinjau berdasarkan kelompok umur, maka penduduk Kabupaten Pulang Pisau paling banyak berumur 10-14 tahun yaitu 11.609 jiwa, diikuti dengan kelompok umur 0-4 tahun sebanyak 11.355 jiwa, sedangkan penduduk dengan kelompok terendah yaitu pada kelompok umur 75+ tahun keatas sebanyak 1.591 jiwa.

Tabel 2.20
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017

Kelompok Umur	Penduduk (orang)		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
0 – 4	5.918	5.437	11.355
5 – 9	5.675	5.519	11.194
10 – 14	6.054	5.555	11.609
15 -19	5.649	5.146	10.795
20 – 24	5.007	4.456	9.463
25 – 29	5.177	4.660	9.837
30 – 34	5.218	4.858	10.076
35 – 39	5.131	4.924	10.055
40 – 44	4.934	4.452	9.386
45 – 49	4.448	4.084	8.532
50 – 54	3.595	3.544	7.139
55 – 59	3.222	2.965	6.187
60 – 64	2.407	1.971	4.378
65 – 69	1.531	1.336	2.867
70 – 74	886	831	1.717
75+	836	755	1.591
Jumlah	65.688	60.493	126.181

Sumber: Kabupaten Pulang Pisau Dalam Angka Tahun 2018

Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2017 menunjukkan bahwa persentase penduduk yang aktif secara ekonomi (usia 15-59



tahun) meningkat dari 74,47 persen menjadi 74,71 persen dari tahun 2015 ke 2017. Data menunjukkan terdapat 1,62 persen pengangguran dengan tingkat pengangguran laki-laki sebesar 1,20 persen dan perempuan sebesar 2,29 persen. Data juga menunjukkan sebesar 38,95 persen dari total pengangguran dengan tingkat pendidikan SMA.

Jumlah Pencari Kerja Terdaftar di Kabupaten Pulang Pisau Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pulang Pisau pada Tahun 2017 sebanyak 1.093 orang dengan 703 laki-laki dan 390 perempuan. Proporsi terbesar pencari kerja yang mendaftar pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pulang Pisau berpendidikan terakhir SMA yaitu sebanyak 613 orang, diikuti lulusan SMK dan sarjana yaitu masing-masing sebanyak 168 dan 162 orang.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB

Indikator yang umum dipakai untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi makro suatu daerah adalah dengan melihat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah yang bersangkutan. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pulang Pisau dapat dilihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihitung dengan dua pendekatan harga yaitu harga berlaku dan harga konstan yang semakin meningkat.

Naik turunnya PDRB biasa juga disebut pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi dapat diketahui dari penyajian PDRB atas dasar harga konstan karena pengaruh naik turunnya harga telah dihilangkan atau dengan kata lain dengan mempergunakan harga konstan, pengaruh inflasi telah ditiadakan. Semakin tinggi kenaikan



PDRB, maka makin tinggi pula pertumbuhan ekonomi.

Tabel 2.21
PDRB Kabupaten Pulang Pisau Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017 (juta rupiah)

Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.125.263,6	1.288.171,2	1.431.220,6	1.516.942,8	1.652.66,5
Pertambangan dan Penggalian	14.384,7	16.601,9	18.742,5	21.670,4	24.667,4
Industri Pengolahan	210.698,4	248.493,6	280.130,3	317.459,5	357.978,9
Pengadaan Listrik dan Gas	947,2	1.114,4	1.964,3	2.304,5	3.083,4
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.827,3	2.027,0	2.276,5	2.537,3	2.796,9
Konstruksi	435.821,1	501.017,0	581.245,0	669.147,4	716.506,3
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	282.793,6	329.294,9	366.364,5	406.974,7	452.681,6
Transportasi dan Pergudangan	130.525,9	143.667,4	158.740,8	173.318,4	185.493,7
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	85.603,7	98.551,3	114.294,2	129.105,0	144.498,9
Informasi dan Komunikasi	37.237,1	42.433,7	48.179,9	53.287,7	59.356,0
Jasa Keuangan dan Asuransi	19.107,8	21.488,9	23.348,6	25.582,9	28.366,3
Real Estate	47.837,9	54.980,3	63.441,2	71.208,3	80.375,3
Jasa Perusahaan	2.033,0	2.145,9	2.457,7	2.769,4	3.130,7
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	137.793,5	160.603,9	193.741,1	219.823,4	249.920,0
Jasa Pendidikan	189.246,1	206.664,3	232.515,1	267.415,4	308.845,1
Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	73.226,5	80.752,7	99.182,4	113.311,3	130.322,2
Jasa lainnya	21.130,9	24.244,6	27.947,8	32.953,3	38.500,7
PDRB	2.815.478,2	3.222.252,9	3.649.808,1	4.029.811,8	4.438.889,8

Sumber: PDRB Kabupaten Pulang Pisau Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013 – 2017



Tabel 2.22
PDRB Kabupaten Pulang Pisau Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017 (juta rupiah)

Lapangan Usaha	2013	2014	2015*	2016*	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	186.354,8	196.272,9	207.837,5	220.992,0	1.094.150,9
Pertambangan dan Pengalihan	12.080,2	12.915,7	13.981,3	14.955,0	15.997,4
Industri Pengolahan	179.547,8	199.184,1	217.664,8	237.074,3	258.285,6
Pengadaan Listrik dan Gas	1.043,4	1.171,1	1.678,1	1.891,4	2.329,9
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.581,1	1.627,4	1.789,4	1.890,4	2.000,3
Konstruksi	360.407,8	390.574,2	437.689,7	472.288,2	489.121,5
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	240.793,6	261.405,9	279.599,9	299.827,7	322.075,5
Transportasi dan Pergudangan	105.224,9	108.568,6	112.148,5	117.264,1	120.684,3
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	69.049,8	74.788,6	81.707,8	88.772,8	96.570,6
Informasi dan Komunikasi	35.342,1	38.665,5	42.255,9	46.191,9	50.343,5
Jasa Keuangan dan Asuransi	16.568,1	17.599,5	17.949,0	18.727,7	19.677,0
Real Estate	41.704,2	44.882,5	49.104,6	53.497,1	57.571,1
Jasa Perusahaan	1.823,5	1.810,2	1.952,6	2.089,7	2.235,6
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	110.687,4	120.890,1	137.697,7	146.299,4	156.309,9
Jasa Pendidikan	162.933,7	170.349,0	179.269,9	196.996,5	212.127,7
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	61.513,5	63.317,4	75.339,9	79.873,1	86.438,9
Jasa lainnya	18.401,2	19.925,3	21.849,0	23.886,5	26.105,5
PDRB	2.322.634,9	2.490.475,6	2.682.506,7	2.845.084,9	3.012.025,2

Sumber: PDRB Kabupaten Pulang Pisau Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013 – 2017

Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Pulang Pisau Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013 sampai dengan 2017 didominasi oleh sektor pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang masih menjadi primadona dalam perekonomian sebagian masyarakat Kabupaten Pulang Pisau. Pada Tahun 2017 sektor pertanian, Kehutanan dan Perikanan menyumbang sebesar 37,22 persen, diikuti oleh sektor Kontruksi sebesar 16,14 persen dan



sektor perdagangan dan Resparasi Mobil sebesar 10,2 persen.

Tabel 2.23
Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Pulang Pisau Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017 (persen)

Lapangan Usaha	2013	2014	2015*	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	39,97	39,98	39,26	37,68	37,22
Pertambangan dan Penggalian	0,51	0,52	0,51	0,54	0,56
Industri Pengolahan	7,48	7,71	7,68	7,89	8,06
Pengadaan Listrik dan Gas	0,03	0,03	0,05	0,06	0,07
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Konstruksi	15,48	15,55	15,94	16,62	16,14
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,04	10,22	10,05	10,11	10,20
Transportasi dan Pergudangan	4,64	4,46	4,35	4,31	4,18
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,04	3,06	3,13	3,21	3,26
Informasi dan Komunikasi	1,32	1,32	1,32	1,32	1,34
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,68	0,67	0,64	0,64	0,64
<i>Real Estate</i>	1,70	1,71	1,74	1,77	1,81
Jasa Perusahaan	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,89	4,98	5,31	5,46	5,63
Jasa Pendidikan	6,72	6,41	6,38	6,64	6,96
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,60	2,51	2,72	2,81	2,94
Jasa lainnya	0,75	0,75	0,77	0,82	0,87
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: PDRB Kabupaten Pulang Pisau Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013 – 2017

Bila dilihat dari Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Pulang Pisau Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012 sampai dengan 2016, Sektor yang dominan adalah sektor Konstruksi. Pada tahun 2016 sektor Kontruksi menyumbang sebesar 16,60 persen. Sektor berikutnya yang mempunyai peranan cukup berarti dalam pembentukan



PDRB Kabupaten Pulang Pisau adalah sektor Perdagangan dan Resparasi Mobil sebesar 10,54 persen, dan Sektor Industri Pengolahan sebesar 8,33 persen.

Tabel 2.24
Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Pulang Pisau Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2016 (persen)

Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	39,26	38,92	38,65	37,68	36,68
Pertambangan dan Penggalian	0,51	0,52	0,52	0,52	0,52
Industri Pengolahan	7,17	7,73	8,0	8,1	8,3
Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,04	0,05	0,06	0,06
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Konstruksi	14,97	15,51	15,68	16,31	16,60
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,52	10,36	10,5	10,42	10,53
Transportasi dan Pergudangan	4,71	4,53	4,35	4,20	4,12
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,99	2,97	3,00	3,04	3,12
Informasi dan Komunikasi	1,48	1,52	1,55	1,57	1,62
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,72	0,71	0,71	0,67	0,65
<i>Real Estate</i>	1,83	1,79	1,80	1,83	1,88
Jasa Perusahaan	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,72	4,76	4,85	5,13	5,14
Jasa Pendidikan	7,1	7,01	6,84	6,68	6,92
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,85	2,65	2,54	2,8	2,8
Jasa lainnya	0,78	0,79	0,8	0,8	0,8
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: PDRB Kabupaten Pulang Pisau Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012 – 2016

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pulang Pisau tahun 2017 adalah sebesar 5,86 % melambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 6,06%.



Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh kategori pengadaan listrik dan gas sebesar 17,24 %, meskipun memiliki kontribusi yang kecil terhadap PDRB kabupaten Pulang Pisau. Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang merupakan penyumbang terbesar dalam perekonomian mampu meningkat sebesar 4,91% kategori Konstruksi mampu tumbuh sebesar 3,92%. Perdagangan Besar dan eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tumbuh sebesar 7,41% Kinerja yang bagus ditunjukkan oleh kategori Informasi dan Komunikasi serta Industri pengolahan karena mampu tumbuh sebesar 8,99% dan 8,95%.

Tabel. 2.25
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Pulang Pisau Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017

Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)	5,87	6,51	4,68	3,48	4,91
Pertambangan dan Penggalian (%)	7,63	6,92	8,25	7,04	6,90
Industri Pengolahan (%)	15,06	10,94	9,28	8,92	8,95
Pengadaan Listrik dan Gas (%)	8,47	12,23	43,3	17,24	18,42
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (%)	8,29	2,93	9,95	5,65	5,81
Konstruksi (%)	9,69	8,37	12,19	7,41	3,92
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (%)	5,22	8,56	6,96	7,25	7,41
Transportasi dan Pergudangan	2,61	3,18	5,54	4,16	1,11
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,24	8,31	9,25	8,65	8,78
Informasi dan Komunikasi	9,74	9,40	9,29	9,31	8,99
Jasa Keuangan dan Asuransi	5,01	6,23	1,99	4,34	5,07
Real Estate	4,56	7,62	9,18	8,96	7,82
Jasa Perusahaan	3,54	-0,73	7,87	7,02	6,98
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,67	9,22	13,90	6,25	6,84
Jasa Pendidikan	5,24	4,55	5,53	9,3	7,96
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-0,9	2,93	18,83	7,24	7,13



Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jasa lainnya	7,90	8,28	8,65	10.34,	9,29
PDRB	6,79	7,23	7,71	6,06	5.86

Sumber: PDRB Kabupaten Pulang Pisau Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013 – 2017

2.2.1.2. Laju Inflasi

Inflasi di suatu daerah adalah indikator penting untuk bahan analisis ekonomi karena menunjukkan kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang terjadi karena adanya kegiatan ekonomi dengan adanya permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*). Inflasi atau Indeks Harga Konsumen (IHK) di Provinsi Kalimantan Tengah dipantau oleh BPS di 2 Kabupaten/Kota yaitu Kota Palangkaraya dan Kota Sampit. Adapun inflasi yang terjadi di Kota Palangkaraya dan Kota Sampit dalam kurun waktu 2012-2016 mengalami peningkatan dan juga penurunan, dimana pada tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 0,28 semula 6,73 di tahun 2012 menjadi 6,45 di tahun 2013. Pada Tahun 2014 meningkat kembali menjadi 6,63 atau meningkat sebesar 0,18. Pada Tahun 2015 mengalami menjadi 4,20 atau menurun 2,43, dan di tahun 2016 menurun kembali menjadi 1,91 atau menurun 2,29. Begitu juga yang terjadi di Kota Sampit Indeks Gini mengalami Kota Sampit mengalami penurunan dan peningkatan.

Tabel 2.26

Inflasi di Kota Palangkaraya dan Kota Sampit Tahun 2013-2017

Uraian	Indeks dan IHK				
	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Inflasi Kota Palangkaraya	6,45	6,63	4,20	1,91	3,11



Uraian	Indeks dan IHK				
	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Inflasi Kota Sampit	7,25	7,90	5,72	2,46	3,29

Sumber: Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka Tahun 2018

2.2.1.3. PDRB Per kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah / wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Untuk memacu peningkatan PDRB perkapita, maka laju pertumbuhan ekonomi harus jauh lebih besar dari pada laju pertumbuhan penduduk. PDRB perkapita yang di sajikan tidak memperhitungkan pendapatan yang keluar atau masuk Pulang Pisau (*Net Factor Income From Abroad*), Sehingga pendapatan perkapita yang disajikan belum sepenuhnya menggambarkan pendapatan riil masyarakat.

Secara nominal, nilai PDRB per kapita Pulang Pisau Terus mengalami kenaikan hingga tahun 2017 mencapai 35,2 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB perkapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi. Sementara itu, PDRB per kapita atas dasar harga konstan tahun 2010 juga meningkat menjadi 23,9 juta, dengan laju pertumbuhan 5,01 persen. Jika diamati lebih jauh, pertumbuhan PDRB perkapita Pulang Pisau selalu positif setiap tahun. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat terus bertambah setiap tahunnya dalam kurun waktu lima tahun terakhir.



Tabel.2.27

PDRB Per Kapita Kabupaten Pulang Pisau Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2013-2017

No	PDRB Perkapita	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	ADHB (juta Rp)	27,76	30,89	34,19	37,63	35,2
2	ADHK (juta Rp)	22,67	23,76	24,89	26,11	23,9

Sumber: PDRB Kabupaten Pulang Pisau Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013- 2017

2.2.1.4. Indeks Gini

Indeks gini atau Koefisien Gini merupakan salah satu indikator yang dapat melihat ketimpangan pendapatan antar golongan penduduk. *Gini Ratio* Kabupaten Pulang Pisau masuk kategori ketimpangan sedang karena berada pada kisaran 0,3 sampai 0,5 , yaitu di tahun 2013 sebesar 0,271, di tahun 2014 sebesar 0,252, di tahun 2015 sebesar 0,365, tahun 2016 sebesar 0,340 dan tahun 2017 sebesar 0,295.

Tabel 2.28

Indeks Gini Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2017

Indikator	Indeks Gini				
	2013	2014	2015	2016	2017
Indeks Gini (<i>Gini Ratio</i>)	0,271	0,252	0,365	0,340	0,295

Sumber: Kabupaten Pulang Pisau Dalam Angka, Tahun 2018

2.2.1.5. Indeks Pembangunan Manusia

Kondisi umum kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pulang Pisau dapat dilihat dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai barometer indikasi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui



pendekatan tiga dimensi dasar, mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pulang Pisau mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 mengalami peningkatan. Pada Tahun 2013 IPM sebesar 64,76 dan Pada Tahun 2017 meningkat menjadi 67,00. Hal ini menggambarkan dari sisi pendidikan kesehatan dan daya beli masyarakat Kabupaten Pulang Pisau mengalami perbaikan dari tahun ke tahun.

Tabel.2.29

**Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2017**

Indikator	IPM				
	2013	2014	2015	2016	2017
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	64,76	65,00	65,76	66,49	67,00

Sumber: Kabupaten Pulang Pisau Dalam Angka, 2018

2.2.1.6. Persentase penduduk di atas garis kemiskinan

Indikator persentase penduduk diatas garis kemiskinan adalah indikator yang menggambarkan



rasio penduduk yang hidup berkecukupan dan yang tidak menurut standar tertentu yang berlaku secara nasional. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Pulang Pisau selama periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2015 mengalami puncaknya hal ini terjadi disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Pulang Pisau yang menyebabkan banyak penduduk yang mengalami gagal panen, tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 mengalami penurunan yang signifikan hal ini terjadi karena optimalisasi program pengentasan kemiskinan serta tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Pulang Pisau, untuk mengetahui lebih lanjut terkait angka kemiskinan dapat diperhatikan tabel sebagai berikut :

Tabel.2.30

**Angka Kemiskinan Kabupaten Pulang Pisau
Tahun 2013-2017**

No.	Indikator	Angka Kemiskinan (%)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Penduduk Miskin (ribuan jiwa)	6.730	6.650	7.040	6.880	6.540
2	Garis Kemiskinan	294.250	308.323	314.673	335.165	347.878
3	Persentase Penduduk Miskin	5,45	5,35	5,65	5,49	5,19

Sumber: Kabupaten Pulang Pisau Dalam Angka 2018

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Beberapa indikator yang bisa digunakan dalam mengukur kesejahteraan sosial antara lain meliputi Angka



Partisipasi Murni, Angka Partisipasi Kasar, Angka Melek Huruf, Angka Harapan Hidup, Rata-rata Lama Sekolah dan Rasio penduduk yang bekerja. Indikator ini mengalami perubahan pada setiap tahunnya, yang dipengaruhi oleh berbagai macam hal, salah satunya adalah kebijakan pemerintah.

2.2.2.1 Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Secara umum Angka Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Pulang Pisau pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mencapai 7,67 tahun atau mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya (7,66 tahun). Hal ini berarti bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Pulang Pisau baru mampu menempuh pendidikan sampai dengan kelas 2 SMP atau putus sekolah dikelas 3 SMP. Berikut data rata-rata lama sekolah tahun 2013 sampai dengan 2017:

Tabel.2.31
Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	7,55	7,58	7,59	7,66	7,67

Sumber: Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka Tahun 2018

2.2.2.2 Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum disuatu tingkat pendidikan. Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Angka



partisipasi kasar merupakan perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/ SMP/ SMA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa. Angka partispasi kasar merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Angka Partisipasi Kasar di Kabupaten Pulang Pisau cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar di Kabupaten Pulang Pisau disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel.2.32
Angka Partisipasi Kasar
Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
APK SD/MI	118,14	106,54	109,92	113,81	106,63
APK SMP/MTs	80,81	89,04	106,26	86,59	77,83
APK SMA/MA/SMK	57,90	61,94	86,52	90,18	81,13
Perguruan Tinggi	-	-	18,07	-	20,96

Sumber: Kabupaten Pulang Pisau dalam Angka Tahun 2018

2.2.2.3 Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka partisipasi murni adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. Angka partisipasi murni fungsinya hampir sama dengan APK, hanya saja APM merupakan indikator yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar dijenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.



Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Pulang Pisau cenderung mengalami penurunan dan Peningkatan dari tahun ke tahun. Perkembangan Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Pulang Pisau disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel.2.33
Angka Partisipasi Murni
Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
APM SD/MI	91,62	94,50	95,12	95,98	99,32
APM SMP/MTs	74,05	74,58	76,32	74,95	75,07
APM SMA/MA/SMK	39,22	52,40	64,58	51,73	54,16

Sumber: Kabupaten Pulang Pisau dalam Angka Tahun 2018

2.2.2.4 Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jumlah kematian bayi yang berusia kurang dari satu tahun di suatu wilayah tertentu selama satu tahun per 1.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan salah satu indikator yang sensitif terhadap kesediaan, pemanfaatan dan kualitas pelayanan perinatal. AKB di Kabupaten Pulang Pisau selama tahun 2013 – 2017 berfluktuatif atau jika dirata-ratakan 7,1 per 1000 kelahiran hidup. Apabila dilihat dari data AKB tahun 2015,2016 dan 2017 terdapat kenaikan yang cukup tinggi, ini menggambarkan masih rendahnya pelayanan kesehatan ibu hamil dan perinatal, namun jika dibandingkan dengan target nasional berdasarkan renstra Kemenkes tahun 2015 - 2019 sebesar 24 per 1000 kelahiran hidup, AKB Kabupaten Pulang Pisau sudah mencapai target nasional. Adapun Perkembangan kematian bayi di



Kabupaten Pulang Pisau disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel.2.34
Angka Kematian Bayi
Di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013 – 2017

No.	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Angka (Jiwa) Kelahiran Bayi	1993	2075	2.042	2.148	2.368
2.	Angka (Jiwa) Kematian Bayi	7	5	3	7	14

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018

2.2.2.5 Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) atau *Maternal Mortality Rate* (MMR) menunjukkan jumlah kematian ibu pada setiap 100.000 kelahiran hidup. Kematian ibu menurut definisi WHO adalah kematian selama masa kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya, tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan / cedera. Angka Kematian Ibu ini dipergunakan untuk menggambarkan status gizi dan kesehatan ibu, keadaan sosial ekonomi, kondisi kesehatan lingkungan serta fasilitas dan tingkat pelayanan prenatal. AKI di Kabupaten Pulang Pisau selama tahun 2013 – 2017 berfluktuatif, angka tertinggi pada tahun 2015 dengan angka 294 per 1000 kelahiran hidup. Kemudian mengalami penurunan drastis pada tahun 2015 dan mengalami peningkatan lagi pada tahun 2017, namun jika dibandingkan dengan target nasional berdasarkan renstra Kemenkes tahun 2015 -2019 sebesar 306 per 1000 kelahiran hidup, AKI Kabupaten Pulang Pisau sudah mencapai target nasional. Adapun



Perkembangan kematian ibu di Kabupaten Pulang Pisau disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel.2.35
Angka Kematian Ibu
Di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013 – 2017

No.	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Angka Kelahiran Hidup (Jiwa)	1993	2075	2042	2148	2368
2.	Angka Kematian Ibu (Jiwa)	200,7	241	294	93	169

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018

2.2.2.6 Angka Usia Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup mengindikasikan peluang bayi yang baru lahir akan mencapai angka harapan hidup hingga tahun tertentu. Tingkat kesehatan disuatu negara salah satunya dapat dilihat dari besarnya angka harapan hidup penduduknya. Angka Harapan Hidup Kabupaten Pulang Pisau dalam kurun waktu tahun 2013 sampai dengan 2017 semakin lama semakin meningkat, pada tahun 2014 Angka Harapan Hidup mencapai 67,44 terus meningkat sampai tahun 2017 yaitu 67,86. Angka ini berarti bahwa setiap bayi yang lahir pada tahun 2017 memiliki harapan untuk hidup hingga usia mencapai 67-68 tahun. Peningkatan Angka Harapan Hidup di Kabupaten Pulang Pisau ini karena sangat dipengaruhi beberapa faktor, antara lain semakin baik teraksesnya pelayanan kesehatan bagi semua kelompok masyarakat, perilaku hidup sehat oleh masyarakat luas dan disertai semakin baiknya kondisi sosial ekonomi masyarakat disertai dukungan peningkatan kesehatan lingkungan. Angka harapan hidup di Kabupaten Pulang Pisau dapat pada tabel berikut.



Tabel.2.36

Angka Harapan Hidup Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Angka Harapan Hidup (Tahun)	67,27	67,35	67,44	67,64	67,75

Sumber: Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka Tahun 2018

2.2.2.7 Gizi Buruk dan Stunting

Gizi buruk adalah kondisi terparah dari kekurangan gizi menahun. Stunting adalah masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu lama, umumnya karena asupan makan yang tidak sesuai kebutuhan gizi.

Perkembangan kasus gizi buruk di Kabupaten Pulang Pisau selama tahun 2013 – 2017 berfluktuatif, angka tertinggi pada tahun 2015 dengan 7 kasus, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2016 dimana tidak ada kasus gizi buruk yang ditemukan dan mengalami peningkatan lagi pada tahun 2017. Penyebab gizi buruk biasanya disertai penyakit kronis pada balita, sehingga perlu penanganan yang komprehensif antara perbaikan gizi dan penyembuhan penyakitnya. Dari kasus gizi buruk yang ada semuanya sudah ditangani 100%.

Prevalensi stunting pada baduta di Kabupaten Pulang Pisau pada tahun 2013 – 2017 mengalami penurunan karena penanganan yang baik dengan lintas sektor antara lain program sanitasi dari Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Permukiman, Bappeda selaku koordinator dan dukungan pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat pada program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).



Perkembangan gizi buruk dan stunting di Kabupaten Pulang Pisau pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 dapat diperhatikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel.2.37
Pravelensi Gizi Buruk dan Stunting Kabupaten Pulang Pisau
Tahun 2016-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Prevalensi Gizi Buruk (%)	0,04	0,01	0,06	0	0,03
Prevalensi Pendek dan sangat pendek (Stunting) pada Baduta (%)	46	47	49	32	35

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018

2.2.2.8 Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Kegiatan Selama Seminggu Yang Lalu dan Jenis Kelamin

Ketenagakerjaan merupakan bidang yang penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat karena dalam bidang ini akan terlihat kualitas sumber daya manusia sekaligus income rumahtangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Adapun perkembangan Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Kegiatan Selama Seminggu Yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pulang Pisau disajikan dalam tabel berikut:

Tabel.2.38
Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Kegiatan Selama Seminggu Yang Lalu dan Jenis Kelamin Tahun 2013-2017 (jiwa)

No.	Jenis Kegiatan	2013	2014	2015	2016	2017
A.	Angkatan Kerja	55.926	59.967	67.103	67.103	68.713
1	Bekerja	54.585	57.403	64.894	64.894	67.599
2	Pengangguran Terbuka	1.341	2.564	2.209	2.209	1.114
B.	Bukan Angkatan Kerja	-	-	22.996	22.993	23.249
1	Sekolah	-	-	6.717	-	6.297



2	Mengurus rumah tangga	-	-	12.441	-	15.201
---	--------------------------	---	---	--------	---	--------

Sumber: Kabupaten Pulang Pisau Dalam Angka Tahun 2018

2.2.2.9 Jumlah Group Kesenian

Keragaman budaya yang dimiliki oleh Kabupaten Pulang Pisau dimanfaatkan oleh kalangan seniman yang terdapat di Kabupaten Pulang Pisau untuk memelihara budaya yang ada. Para pekerja seni yang ada di Kabupaten Pulang Pisau umumnya mendirikan sanggar-sanggar seni sebagai wadah mengasah kemampuan seninya. Adapun jumlah group kesenian yang ada di Kabupaten Pulang Pisau tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.39

Jumlah Grup Kesenian di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017

No.	Nama Sanggar	Kecamatan
1.	Handep Hapakat (Rumah Pintar)	Kahayan Hilir
2.	Bukit Kahias	Kahayan Hilir
3.	Penyang Karuhei Tatau	Kahayan Hilir
4.	Sumbu Kurung	Kahayan Hilir
5.	Riwut Andau	Jabiren Raya
6.	Talenta Asi	Kahayan Tengah
7.	Putir Santang	Pandih Batu
8.	Basantan	Kahayan Kuala
9.	Lenggang Jaya	Kahayan Hilir
10.	Singo Mudo	Maliku
11.	Singo Kuda Bina Baru	Kahayan Hilir
12.	Turonggo Putro Budoyo	Maliku
13.	Jaranan Campur Sari Krido Turonggo	Pandih Batu
14.	Trisno Budoyo	Sebangau

Sumber: Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018

2.2.2.10 Jumlah Gedung Kesenian

Pembangunan bidang seni sangat erat kaitannya dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat di suatu daerah. Salah satunya ditunjukkan dengan



adanya gedung kesenian dalam rangka mendukung berkembangnya kesenian suatu daerah. Adapun Jumlah gedung yang ada di Kabupaten Pulang Pisau dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel.2.40**Jumlah Gedung Kesenian di Kabupatean Pulang Pisau Tahun 2017**

No.	Nama Gedung/Tempat Kesenian	Kecamatan
1.	Handep Hapakat (Rumah Pintar)	Kahayan Hilir
2.	Bukit Kahias	Kahayan Hilir
3.	Penyang Karuhei Tatau	Kahayan Hilir
4.	Sumbu Kurung	Kahayan Hilir
5.	Riwut Andau	Jabiren Raya
6.	Talenta Asi	Kahayan Tengah
7.	Putir Santang	Pandih Batu
8.	Basantan	Kahayan Kuala
9.	Lenggang Jaya	Kahayan Hilir
10.	Singo Mudo	Maliku
11.	Singo Kuda Bina Baru	Kahayan Hilir
12.	Turonggo Putro Budoyo	Maliku
13.	Jaranan Campur Sari Krido Turonggo	Pandih Batu
14.	Trisno Budoyo	Sebangau

Sumber: Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018

2.2.2.11 Jumlah Klub Olahraga

Jumlah klub olahraga merupakan indikator yang menjelaskan tolok ukur sejumlah kelompok kegiatan untuk mendukung aktivitas bidang olahraga. Indikator ini berguna untuk melihat perkembangan sumber daya manusia melalui kegiatan olahraga. Jumlah klub olahraga dihitung dalam satuan 10.000 penduduk.

Jumlah klub olahraga yang ada di Kabupaten Pulang Pisau pada tahun 2017 berjumlah 17 klub olahraga. Adapun Jumlah klub olahraga yang ada di Kabupaten Pulang Pisau disajikan pada tabel dibawah ini:



Tabel.2.41
Jumlah Klub Olahraga di Kabupaten Pulang Pisau 2017

No	Cabang Olahraga	Nama Klub Olahraga	Kecamatan
1	PASI	Runner Pulang Pisau	Kahayan Hilir
		MTSN Atletik	Kahayan Hilir
		SMAN 1 Atletik	Kahayan Hilir
		PGRI Runner	Kahayan Hilir
		Maliku Atletik	Maliku
2	PERBASI	Handep Hapakat	Kahayan Hilir
		SMAN 1 Basket Ball	Kahayan Hilir
		Cukai Basket Ball	Kahayan Hilir
3	FORKI	Lemkari Pulang Pisau	Kahayan Hilir
		Lemkari SMA 2 Pulang Pisau	Kahayan Hilir
4	PSSI	Gresik FC	Kahayan Hilir
		Deva 29 FC	Kahayan Hilir
		Bizero FC	Kahayan Hilir
		Adiyaksa FC	Kahayan Hilir
		Polres FC	Kahayan Hilir
		PLTU FC	Kahayan Hilir
		Lamunti FC	Kahayan Hilir
		Devor FC	Kahayan Hilir
5	AFK	Deva 29 FC	Kahayan Hilir
		Ratik Wara FC	Kahayan Hilir
		Dinasty FC	Kahayan Hilir
		O2 FC	Kahayan Hilir
		Devor FC	Kahayan Hilir
6	PBVSI	Maliku VB	Maliku
		Pandih Batu VB	Pandih Batu
		Kahayan Hilir VB	Kahayan Hilir
		Jabiren Raya VB	Jabiren Raya
		Bromo 08 Pulang Pisau	Kahayan Hilir
		Sigog	Kahayan Kuala
		Tunas Muda I Mantaren I	Kahayan Hilir
		Tunas Muda II Mantaren II	Kahayan Hilir
		Silva BTN Anjir Pulang Pisau	Kahayan Hilir
		Sebangau Kuala VB	Sebangau Kuala
		Gerakan Anjir Muara	Kahayan Hilir

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pulang Pisau 2018

2.2.2.12 Jumlah Gedung Olahraga

Gedung olahraga merupakan sarana pendukung kegiatan olahraga di suatu daerah. Indikator ini berguna untuk menjelaskan adanya potensi pendukung sarana dan prasarana pengembangan bidang olahraga. Jumlah gedung olahraga dihitung dalam satuan 10.000 penduduk.

Jumlah sarana olahraga pada tahun 2017 tercatat sebanyak 7 sarana, adapun jumlah gedung



olahraga yang ada di Kabupaten Pulang Pisau disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel.2.42

Jumlah Gedung Olahraga di Kabupatean Pulang Pisau 2017

No.	Jenis Gedung/Lapangan Olahraga	Kecamatan
1.	Lapangan Sepak Bola	Kahayan Hilir
2.	Lapangan Basket	Kahayan Hilir
3.	Lapangan <i>Volley Ball</i>	Kahayan Hilir
4.	Lapangan Futsal	Kahayan Hilir
5.	Lapangan Atletik	Kahayan Hilir
6.	Lapangan Takraw	Kahayan Hilir
7.	Lapangan Tenis	Kahayan Hilir

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pulang Pisau 2018

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Bagian aspek pelayanan umum berikut ini menjelaskan perkembangan kinerja yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, baik pada urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib yaitu di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan pemukiman, sosial, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, perpustakaan, kearsipan, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumberdaya mineral, perdagangan, perindustrian, perencanaan pembangunan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

2.3.1. Layanan Urusan Wajib

Urusan pelayanan wajib merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar maupun tidak terkait pelayanan dasar.



2.3.1.1. Pendidikan

a. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka Partisipasi sekolah memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Angka Partisipasi Sekolah menggambarkan penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah. Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013 sampai dengan 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel.2.43

Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2013-2017

No	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Sekolah Dasar (SD/MI)	95,15	98,08	98,4	98,98	99,32
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs)	84,83	87,07	87,71	94,77	91,40
3	Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK/MA)	50,23	53,00	62,3	74,41	61,34
4	Perguruan Tinggi	10,78	21,19	22,81	25,89	NA

Sumber: Kabupaten Pulang Pisau Dalam Angka Tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat jenjang sekolah usia SD dan SMP cenderung meningkat dari tahun ke tahun, untuk usia SMA terjadi fluktuasi pada tahun 2015 sampai dengan 2017, sedangkan untuk usia perguruan tinggi cenderung meningkat dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016.

**b. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Dasar dan Menengah**

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar dan menengah per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar dan menengah. Semakin rendah rasio ketersediaan sekolah, semakin baik pelayanan pendidikan suatu daerah. Hal ini dikarenakan peningkatan jumlah murid diimbangi dengan peningkatan jumlah sekolah. Sebaliknya, semakin tinggi rasio ketersediaan sekolah semakin buruk pelayanan pendidikan suatu daerah, karena jumlah sekolah menjadi kurang serta tidak seimbang dengan jumlah murid yang ada.

Berdasarkan data rasio murid SD terhadap gedung sekolah pada tahun 2015 sebesar 81, tahun 2016 sebesar 76 dan tahun 2017 sebesar 76. Sedangkan Rasio Murid SMP terhadap gedung sekolah pada tahun 2015 sebesar 129, tahun 2016 sebesar 119 dan tahun 2017 sebesar 120. Untuk Rasio Murid SMA terhadap gedung sekolah pada tahun 2015 sebesar 170, untuk tahun 2016 dan 2017 kewenangan Pendidikan jenjang SMA diambil alih oleh provinsi.

c. Rasio Murid Terhadap Guru Sekolah Dasar dan Menengah

Rasio murid terhadap guru adalah jumlah murid tingkat pendidikan menengah 10.000 per jumlah guru pendidikan menengah. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar.



Selain itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Angka Rasio Guru Terhadap Murid di Sekolah Dasar dan Menengah di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013 sampai dengan 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel.2.44**Rasio Murid Terhadap Guru Sekolah Dasar dan Menengah
Di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2017**

No	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Rasio Murid Terhadap Guru SD/MI	10	8	11	11	9
2	Rasio Murid Terhadap Guru SMP/MTs	11	9	13	13	10
3	Rasio Murid Terhadap Guru SMA/SMK/MA	13	10	15	14	10

Sumber: Kabupaten Pulang Pisau Dalam Angka Tahun 2018

d. Angka Putus Sekolah

Proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Adapun kelompok umur yang dimaksud adalah kelompok umur 7-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-18 tahun. Di Kabupaten Pulang Pisau Angka Putus Sekolah dari tahun 2013 sampai dengan 2017 disajikan pada tabel berikut :

Tabel.2.45**Angka Putus Sekolah SD/SMP Sederajat
Di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2017**

No	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Angka Putus Sekolah SD/MI (Kasus)	35	61	54	49	43



No	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
2	Angka Putus Sekolah SMP/MTs (Kasus)	37	40	20	31	NA

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018

2.3.1.2. Kesehatan

Sektor kesehatan merupakan salah satu hal prioritas yang sangat mempengaruhi berbagai macam hal lainnya dalam kehidupan masyarakat. Ketersediaan fasilitas kesehatan yang mampu menjangkau semua elemen masyarakat menjadi hal yang sangat penting. Di Kabupaten Pulang Pisau, fasilitas kesehatan yang tersedia beragam, antara lain rumah sakit, puskesmas, poskesdes, posyandu, maupun klinik/praktek dokter.

a. Rasio pos pelayanan terpadu (posyandu) per satuan balita

Posyandu merupakan wadah peran serta masyarakat untuk menyampaikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dasarnya, maka diharapkan pula strategi operasional pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini dapat dilakukan di setiap posyandu. Pembentukan Posyandu sebaiknya tidak terlalu dekat dengan Puskesmas agar pendekatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat lebih tercapai dan idealnya satu Posyandu melayani 100 balita. Kondisi dua tahun terakhir rasio Posyandu terhadap Balita di kabupaten Pulang Pisau adalah 68 pada tahun 2016 dan 67 pada tahun 2017 sehingga dapat disampaikan Rasio Posyandu terhadap Balita adalah sangat ideal lebih lanjut dapat disajikan tabel sebagai berikut :



Tabel.2.46

Rasio Jumlah Posyandu Terhadap Balita di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2017

No	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Posyandu (unit)	156	157	168	168	168
2	Jumlah Balita (jiwa)	11.827	11.714	11.676	11.514	11.355
	Rasio Posyandu terhadap Balita	75	74	69	68	67

Sumber: Kabupaten Pulang Pisau Dalam Angka Tahun 2013-2017

b. Rasio Puskesmas dan Pustu per Satuan Penduduk

Keberadaan puskesmas dan puskesmas pembantu merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Melalui puskesmas dan puskesmas pembantu, masyarakat baik di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan akan dengan mudah memperoleh berbagai pelayanan dan informasi kesehatan. Rasio puskesmas di Kabupaten Pulang Pisau pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 berkisar 11.407 sampai dengan 10.515 sedangkan untuk pustu sebesar 1.845 sampai dengan 1.800, angka ideal untuk puskesmas sebesar 1:30.000 dan angka ideal pustu sebesar 1: 10.000 sehingga dapat disampaikan bahwa keberadaan puskesmas dan pustu adalah sudah ideal.



Tabel.2.47

**Rasio Puskesmas dan Pustu di Kabupaten Pulang Pisau
Tahun 2013-2017**

No	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Penduduk (jiwa)	123.278	124.015	124.845	125.484	126.181
2	Puskesmas (unit)	11	11	11	12	12
	Rasio Puskesmas terhadap penduduk	11.207	11.274	11.349	11.457	10.515
3	Jumlah Penduduk (jiwa)	123.278	124.015	124.845	125.484	126.181
4	Puskemas Pembantu (unit)	N/A	76	75	70	70
	Rasio Pustu terhadap penduduk	N/A	1.631	1.664	1.792	1.802

Sumber: Pulang Pisau Dalam Angka Tahun 2018 (diolah)

c. Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit

Rumah sakit adalah suatu organisasi yang melalui tenaga medis profesional yang terorganisasi serta sarana kedokteran yang permanen menyelenggarakan pelayanan kesehatan, asuhan keperawatan yang berkesinambungan, Indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan fasilitas perawatan, peningkatan mutu dan sarana rumah sakit antara lain sebagai berikut:

Pemakaian Tempat Tidur / *Bed Occupancy Rate* (BOR) merupakan persentase pemakaian tempat tidur pada satu satuan waktu tertentu. Indikator ini dipergunakan untuk menilai kinerja rumah sakit dengan melihat persentase pemanfaatan tempat tidur rumah sakit. Angka BOR yang rendah menunjukkan kurangnya pemanfaatan fasilitas perawatan rumah sakit oleh masyarakat. Angka BOR yang tinggi (>85%) menunjukkan tingkat pemanfaatan tempat tidur yang tinggi, sehingga perlu pengembangan rumah sakit atau penambahan tempat tidur. BOR yang ideal untuk



suatu rumah sakit adalah antara 60% sampai dengan 80%. Rata-rata pemakaian tempat tidur (*Bed Occupancy Rate/BOR*) pada tahun 2013 - 2017 dari RSUD Pulang Pisau berfluktuatif, pada tahun 2013, 2014 dan 2016 Angka BOR ini tidak berada pada range ideal terkait dengan pemakaian tempat tidur, sedangkan pada tahun 2015 dan 2017 berada pada range ideal (BOR Ideal= 60%-80%).

Rata-rata Lama Rawat Seorang Pasien/ *Average Length of Stay (ALOS)*

Rata-rata lama rawat seorang pasien yang secara umum/ *Average Length of Stay (ALOS)* yang ideal adalah antara 6 – 9 hari. Rata-rata lama rawat seorang pasien (*Average Length of Stay /ALOS*) di Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau pada tahun 2016 dan 2017 mengalami penurunan bila dibandingkan nilai ALOS tahun 2015 sebesar 6,44 (berada pada range ideal).

Rata-rata Hari Tempat Tidur Tidak Ditempati / *Turn Of Interval (TOI)*

Angka Tempat Tidur Tidak ditempati (*Turn of Interval/TOI*) menunjukkan efisiensi penggunaan tempat tidur. Semakin besar TOI maka efisiensi penggunaan tempat tidur semakin jelek, dimana angka ideal untuk TOI adalah 1-3 hari. Angka TOI pada tahun 2013-2016 dari RSUD Pulang Pisau tidak berada pada range ideal, data ini menunjukkan bahwa pemanfaatan tempat tidur belum efisien, karena berada diluar dari kisaran TOI ideal, sedangkan pada tahun 2017 angka TOI sebesar 1,49 berarti berada pada range ideal,



sehingga dapat dikatakan penggunaan tempat tidur di RSUD Pulang Pisau semakin efisien.

Tabel.2.48

Indikator Kinerja Pelayanan di RSUD Pulang Pisau Tahun 2013-2017

No	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	<i>Bed Occupancy Rate</i> (BOR)	46,0	48,8	69,57	30,44	70,08
2.	<i>Average Length of Stay</i> (ALOS)	4,0	4,14	6,44	3,19	3,56
3.	<i>Turn Of Interval</i> (TOI)	4,7	4,39	3,29	7,47	1,49

Sumber: Profil Kesehatan Tahun 2013 - 2017

d. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan

Untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) salah satunya adalah dengan meningkatkan pertolongan persalinan oleh tenaga medis dan meningkatkan pelayanan neonatal, karena dapat mempengaruhi keselamatan ibu dan bayinya. Penolong persalinan yang ideal adalah tenaga medis karena mereka telah menerapkan proses persalinan yang memenuhi standar kesehatan. Oleh sebab itu, pemerintah selalu berupaya untuk memperluas akses, sarana pelayanan serta tenaga kesehatan dengan cara meningkatkan jumlah maupun kualitasnya, seperti meningkatkan pelayanan kebidanan dengan menempatkan bidan di desa-desa. Cakupan persalinan ditolong tenaga kesehatan di Kabupaten Pulang Pisau tahun 2017 sebesar 90,1% lebih meningkat dibandingkan dengan cakupan pada tahun 2015 dan 2016. Data cakupan mulai tahun 2013 sampai dengan 2017



secara keseluruhan di Kabupaten Pulang Pisau dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.49
Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Persalinan oleh Tenaga Kesehatan (jiwa)	2006	2087	2081	2155	2278
Jumlah Ibu Bersalin / Nifas (jiwa)	2116	2240	2613	2570	2529
Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan (%)	94,8	93,2	79,6	83,85	90,1

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018

e. Persentase Penemuan Pasien Baru TBC BTA Positif

Angka penemuan pasien baru TB BTA Positif atau *Case Detection Rate* (CDR) adalah persentase jumlah penderita baru TBC BTA yang ditemukan dan diobati dalam suatu wilayah kerja selama satu tahun berbagi dengan jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) di satu wilayah pada kurun waktu yang sama. Perkiraan jumlah pasien baru TB BTA positif diperoleh dari perhitungan insidens kasus TB paru BTA(+) dikali jumlah penduduk. Target CDR dalam Program Nasional TB minimal 70%. Persentase Penemuan Pasien Baru TBC BTA Positif di Kabupaten Pulang Pisau periode 2013 sampai dengan 2017 menunjukkan trend yang menurun dan masih berada jauh dibawah target nasional TB (minimal 70%). Rendahnya upaya penemuan penderita TB memang masih menjadi



persoalan kinerja petugas. Banyak variabel kinerja yang mempengaruhi diantaranya keterbatasan kemampuan, dan keterampilan petugas serta akses jangkauan program sebagai variabel internal. Sementara variabel eksternal adalah adanya hambatan informasi dan tingkat partisipasi masyarakat dalam memahami dan mengenal faktor risiko masyarakat. Untuk lebih jelasnya persentase penemuan pasien baru TBC BTA positif di Kabupaten Pulang Pisau periode 2013 sampai dengan 2017 dapat diperhatikan tabel dibawah ini:

Tabel 2.50

Persentase Penemuan Pasien Baru TBC BTA Positif di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Penemuan Pasien Baru TBC BTA Positif (%)	22,02	20,73	16,78	15,18	15,10

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018

f. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD adalah Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di suatu wilayah selama satu tahun berbagi dengan penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah pada kurun waktu yang sama. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD periode 2013 sampai dengan 2017 semuanya mencapai target yaitu 100%, untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan pada tabel sebagai berikut :



Tabel 2.51

**Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD
Di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2017**

No	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Penderita DBD Yang Ditangani Sesuai SOP (orang)	4	24	34	33	4
2	Jumlah Penderita DBD Yang Ditemukan (orang)	4	24	34	33	4
3	Cakupan Penderita DBD Yang Ditangani (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018

2.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**a. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik**

Peran dan fungsi jalan darat adalah sebagai sarana penghubung antar/lintas kota/kabupaten, serta kecamatan yang ada di Kabupaten Pulang Pisau. Jalan ini penting untuk meningkatkan kegiatan perekonomian di daerah dan memperlancar distribusi perdagangan barang dan jasa angkutan darat, serta orang/penumpang. Mengingat pentingnya jalan darat ini, perlu diketahui proporsi panjang jalan dalam kondisi baik. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah panjang jalan dalam kondisi baik dibagi dengan panjang jalan secara keseluruhan baik nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Informasi mengenai proporsi panjang jalan dalam kondisi baik dapat digunakan untuk mengidentifikasi kualitas jalan dari keseluruhan panjang jalan.

Panjang Jalan di Kabupaten Pulang Pisau pada tahun 2017 adalah 1.170,67 Km, dari seluruh jalan yang ada di Kabupaten Pulang Pisau, hanya



419,10 Km (35,80 persen) dalam kondisi baik, Jika dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya sedikit mengalami peningkatan. Adapun proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik yang ada di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013 – 2017 disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel.2.52

Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2017

Kondisi Jalan	2013	2014	2015	2016	2017
Panjang Jalan (Km)	1.017,47	1.087,75	1.154,32	1.160,12	1.170,67
Panjang Jalan Kondisi Baik (Km)	351,47	372,02	381,36	395,67	419,10
Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik (%)	34,54	34,2	33,03	34,11	35,80

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Pulang Pisau tahun 2018

b. Kondisi Jaringan Irigasi

Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Selanjutnya secara operasional dibedakan ke dalam tiga kategori yaitu jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier. Dari ketiga kelompok jaringan tersebut, yang langsung berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi ke dalam petakan sawah adalah jaringan irigasi tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter serta bangunan pelengkap. Adapun



Panjang Jaringan Irigasi yang ada di Kabupaten Pulang Pisau dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel.2.53
Persentase Irigasi Kabupaten Pulang Pisau Dalam Kondisi Baik Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Luas Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik (Ha)	51.161	52.788	54.282	56.736	58.434
Luas Irigasi Kabupaten (Ha)	100.156	100.156	100.156	100.156	100.156
Persentase Irigasi Kabupaten Pulang Pisau Dalam Kondisi Baik (%)	51,08	52,71	54,20	56,65	58,34

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Pulang Pisau tahun 2018

c. Rasio Permukiman Layak Huni

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Rasio Permukiman Layak Huni adalah perbandingan luas permukiman layak huni dengan luas wilayah permukiman secara keseluruhan. Indikator ini mengukur proporsi luas pemukiman yang dihuni terhadap keseluruhan luas permukiman.

Dari data pada tabel 2.51 berikut dapat dilihat bahwa ketersediaan data rasio permukiman layak huni di Kabupaten Pulang Pisau mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 disajikan pada tabel berikut ini :



Tabel.2.54

**Rasio Permukiman Layak Huni
di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2017**

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Luas permukiman layak huni (Ha)	N/A	N/A	54.026,40	60.695,13	65.962,47
Luas wilayah permukiman (Ha)	N/A	N/A	96.648,31	96.648,31	96.648,31
Rasio Permukiman Layak Huni	N/A	N/A	55,90	62,80	68,25

Sumber: Dinas Perkimtan Kabupaten Pulang Pisau tahun 2018

d. Panjang Jalan dilalui Roda Empat

Panjang jalan yang dilalui roda empat di Kabupaten Pulang Pisau pada tahun 2013 yang berupa permukaan aspal sepanjang 107,63 km dan permukaan tanah sepanjang 659,58 km. Pada tahun 2017 yang berupa permukaan aspal sepanjang 135,179 km dan permukaan tanah sepanjang 815,75 km.

Tabel.2.55

**Panjang Jalan Dilalui Roda Empat
di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2017**

No	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Permukaan Aspal (km)	107,63	107,44	110,88	119,92	135,79
2	Permukaan Tanah (km)	659,58	724,87	767,21	793,66	815,75

Sumber: Kabupaten Pulang Pisau Dalam Angka Tahun 2018

e. Panjang Jalan Yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran

Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran di Kabupaten Pulang Pisau tahun 2013 sepanjang 4,744 km, di tahun 2017 meningkat menjadi 8,357 Km. Panjang jalan yang memiliki



trotoar dan drainase/ saluran di Kabupaten Pulang Pisau dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel.2.56
Panjang Jalan Yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Panjang Jalan yang memiliki trotoar dan drainase /saluran (Km)	4,744	6,832	7,834	8,206	8,357

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Pulang Pisau tahun 2018

2.3.1.4. Perumahan dan Kawasan Pemukiman

a. Persentase Akses Air Bersih

Rumah tangga pengguna air bersih adalah rumah tangga yang memanfaatkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan hidup anggota rumah tangga. Ketersediaan dalam jumlah cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan utama dari program penyediaan air bersih yang terus diupayakan oleh pemerintah. Air bersih yang layak konsumsi di Kabupaten Pulang Pisau adalah air bersih yang dikelola oleh PDAM tahun 2017 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.57
Persentase Penduduk berakses Air Bersih Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017

No	Indikator	2017
1	Jumlah Penduduk (Jiwa)	125.484
2	Jumlah Penduduk berakses Air Bersih (Jiwa)	13.228
3	Persentase Penduduk berakses Air Bersih (%)	10,54

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018

**b. Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik**

Listrik merupakan salah satu kebutuhan rumah tangga maupun industri baik untuk penerangan maupun penunjang berbagai peralatan elektronik dan mesin-mesin. Menurut kelompok pelanggan, pengguna listrik terdiri dari pelanggan rumah tangga, industri, badan sosial, usaha dan pemerintah. Rumah tangga pengguna listrik adalah rumah tangga yang memanfaatkan listrik sebagai penerangannya.

Tabel.2.58**Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik Di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2014-2018**

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Rumah Tangga (KK)	31.659	31.817	32.056	32.234	32.216
Jumlah Rumah Tangga Pengguna Listrik (KK)	24.763	26.858	28.393	28.408	28.481
Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik (%)	78.21	84,41	88,57	88,13	88,41

Sumber : Kabupaten Pulang Pisau Dalam Angka Tahun 2018

2.3.1.5. Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**a. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk**

Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Jumlah polisi pamong praja dihitung dari jumlah aparatur pada satuan polisi pamong praja yang ditetapkan tugas pokok dan fungsinya



berdasarkan peraturan perundang-undangan. Satuan polisi pamong praja merupakan perangkat daerah yang dapat berbentuk dinas daerah atau lembaga teknis daerah.

Berdasarkan data yang ada, Rasio jumlah Polisi Pamong Praja Kabupaten Pulang Pisau sampai tahun 2017 adalah 1 : 1.855, artinya berdasarkan rasio standart (1 : 1500), jumlah anggota satpol PP di Kabupaten Pulang Pisau kurang mencukupi dan datanya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.59

**Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja
di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2017**

No	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Penduduk (jiwa)	123.278	124.015	124.845	125.484	126.181
2	Jumlah Satpol PP (orang)	39	40	52	51	63
3	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja	39/123.278	40/124.015	52/124.845	51/125.248	63/126.181

Sumber: Satpol PP Tahun 2018

b. Jumlah Linmas per 10.000 penduduk

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Satuan ini memiliki peran penting dalam ketertiban masyarakat secara luas. Rasio jumlah linmas menggambarkan kapasitas penda untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat adalah upaya mengkondisikan lingkungan yang kondusif dan demokratis sehingga tercipta kehidupan strata sosial yang interaktif.



Semakin besar rasio jumlah linmas maka akan semakin besar ketersediaan linmas yang dimiliki pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Jumlah Linmas per 10.000 penduduk adalah Jumlah Linmas dibagi dengan jumlah penduduk dikalikan 10.000. Berdasarkan data yang ada, Rasio jumlah anggota Linmas Kabupaten Pulang Pisau sampai tahun 2017 adalah 1 : 2000, artinya berdasarkan rasio standart (1 : 1500), jumlah anggota linmas di Kabupaten Pulang Pisau sudah mencukupi. Adapun Jumlah Linmas di Kabupaten Pulang Pisau disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.60
Rasio Jumlah Linmas
di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2017

No	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Linmas (orang)	550	579	592	622	650
2	Jumlah Penduduk (jiwa)	123.278	124.015	124.845	125.484	126.181
3	Rasio Jumlah Linmas per 10.000 penduduk	0,45	0,47	0,47	0,50	0,52

Sumber: Satpol PP dan Kesbangpolinmas Tahun 2018

c. Sistem Informasi Pelayanan Perizinan dan Administrasi Pemerintah

Sistem Informasi Pelayanan Perizinan telah digunakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau. Sistem Pelayanan Informasi Perizinan



secara Elektronik (SPIPSE) di Kabupaten di mulai pada tahun 2015 berdasarkan Perka BKPM Nomor 04 tahun 2014, Sistem Manajemen Perizinan (SISMANARI) di mulai pada tahun 2017, Online Single Submission (OSS) tahun 2018 berdasar Perpres No 24 tahun 2018 adapun rekapitulasi penerbitan izin dapat disajikan tabel sebagai berikut :

Tabel 2.61**Jumlah Izin Yang Diterbitkan di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2017**

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Izin Yang Diterbitkan	581	547	1140	1518	1345

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018

2.3.1.6. Sosial

Sasaran pelayanan urusan sosial adalah para PMKS yang merupakan seseorang, keluarga, atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, atau keterasingan dan kondisi atau perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan.

Urusan sosial ini ditunjukan oleh masih tingginya tingkat kemiskinan, pengangguran dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), dimana permasalahannya a). Masih rendahnya pendidikan



dan tingkat kompetensi angkatan kerja (b) belum optimalnya penanganan bencana sosial; (c) masih rendahnya penanganan kasus-kasus kekerasan anak, perempuan dan *trafficking*; (d) belum optimalnya penanganan PMKS melalui rehabilitasi sosial; (e) masih rentan terhadap konflik sosial.

Kabupaten Pulang Pisau tidak terlepas dari masalah PMKS. Masalah kesejahteraan sosial sendiri bisa diartikan sebagai kondisi yang dipandang oleh sejumlah orang dalam masyarakat sebagai sesuatu yang tidak diharapkan. Permasalahan sosial yang cukup signifikan yang menjadi persoalan di Kabupaten Pulang Pisau yaitu fakir miskin, penyandang cacat dan lanjut usia terlantar.

a. Jumlah PMKS Yang Memperoleh Bantuan

Indikator PMKS yang memperoleh bantuan sosial digunakan sebagai langkah dalam memetakan sejumlah masyarakat yang termasuk dalam PMKS. Jumlah PMKS di kabupaten Pulang Pisau pada tahun 2015 mengalami kenaikan yang sangat signifikan hal ini terjadi pada kelompok fakir miskin akibat dari kebakaran lahan yang menyebabkan gagal panen, penjelasan hal tersebut dapat diperhatikan table sebagai berikut :

Tabel.2.62

**Jumlah PMKS Yang Memperoleh Bantuan
Di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013- 2017**

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Kelompok fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya yang diberi bantuan (Kelompok)	793	340	2436	540	148



Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang dilatih (KK)	9	11	12	14	9

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018

2.3.1.7. Tenaga Kerja

Salah satu faktor terpenting dalam pembangunan adalah ketenagakerjaan. Komposisi dan jumlah tenaga kerja akan mengalami perubahan seiring dengan perubahan penduduk. Pada urusan Ketenagakerjaan indikator yang dijelaskan adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka.

a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menunjukkan persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Rasio ini menggambarkan partisipasi angkatan kerja pada tiap kelompok umur dan jenis kelamin. TPAK menurut kelompok umur biasanya memiliki pola huruf "U" terbalik. Pada kelompok umur muda (15-24) tahun, TPAK cenderung rendah, karena pada usia ini mereka lebih banyak masuk kategori bukan angkatan kerja (sekolah). Begitu juga pada kelompok umur tua (diatas 65 tahun), TPAK rendah dikarenakan mereka masuk pada masa purnabakti (pensiun). Tingkat



Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Pulang Pisau disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.63

**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2017**

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (persen)	67,31	67,34	74,48	N/A	74,72

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Pulang Pisau cenderung meningkat. Pada tahun 2013 sebesar 67,31 persen meningkat 0,03 persen, pada tahun 2014 menjadi 67,34 persen, kemudian pada tahun 2015 meningkat menjadi 74,48 persen. Untuk data tahun 2016 tidak tersedia diakibatkan survei BPS dilakukan hanya sampai tingkat Provinsi. Kemudian pada tahun 2017, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Pulang Pisau meningkat menjadi 74,72 persen.

b. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Angka pengangguran di Kabupaten Pulang Pisau dari tahun 2013 sampai dengan 2017 cenderung mengalami penurunan. Pada Tahun 2013 angka pengangguran di Kabupaten Pulang Pisau mencapai 2,40 persen, pada tahun 2017 turun menjadi 1,62 persen sebagaimana disajikan pada tabel berikut :



Tabel 2.64

**Tingkat Pengangguran Terbuka
di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2017**

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	2,40	4,28	3,29	N/A	1,62

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018

2.3.1.8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dalam pembangunan memegang peranan penting dan strategis seperti bidang parlemen, tenaga manajer, profesi, administrasi, teknis dan mendapat kesempatan dalam berbagai lapangan pekerjaan. Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender. Untuk mengetahui peran aktif perempuan dapat diukur dari partisipasi perempuan di lembaga pemerintah maupun swasta, besarnya angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Adapun data peran perempuan dalam pembangunan dapat diperhatikan pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.65
Jumlah Anggota Dewan di Kabupaten Pulang pisau**

Indikator	2015		2016		2017	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
Jumlah Anggota Dewan (orang)	18	7	18	7	18	7
Persentase Perempuan (%)	72	28	72	28	72	28

Sumber : Kabupaten Pulang Pisau Dalam Angka Tahun 2018



Tabel 2.66
Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Pulang Pisau

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Kasus KDRT terhadap Perempuan (kasus)	6	9	9	9	12

Sumber : Kabupaten Pulang Pisau Dalam Angka Tahun 2018

Pengarusutamaan gender atau disingkat **PUG** adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat dan negara), melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan, dalam hal ini Kabupaten Pulang Pisau dalam tahap penyusunan Pokja.

Kabupaten Layak Anak (KLA) adalah suatu sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, kondisi di Kabupaten Pulang Pisau masih dalam tahap inisiasi.

2.3.1.9. Pangan

Regulasi Ketahanan Pangan adalah ada/tidak peraturan tentang kebijakan ketahanan pangan dalam bentuk perda,perkada, dsb sedangkan Ketersediaan



pangan adalah tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan/atau sumber lain. Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya.

a. Ketersediaan Pangan

Ketersediaan Pangan di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013 sebanyak 977, 133 ton beras dan 1, 739 ton daging, meningkat ditahun 2014 sebanyak 1.316, 123 ton beras dan 1,773 ton daging, meningkat lagi pada tahun 2015 sebanyak 1.460,091 ton dan 1,839 ton daging, kemudian pada tahun 2016 ketersediaan pangan mengalami penurunan menjadi 1.280,450 ton beras dan 0,915 ton daging hal ini dikarenakan pada tahun 2016 ada undang-undang pelarangan pembukaan lahan dengan cara membakar sehingga berimbas pada penurunan produksi gabah, untuk ketersediaan daging juga mengalami penurunan karena adanya pelarangan pematangan betina produktif pada ternak sapi, hal ini juga masih mempengaruhi ketersediaan pangan pada tahun 2017 ketersediaan beras 1.246,272 ton dan daging masih stagnan 0,915 ton.

Ketersediaan pangan di Kabupaten Pulang Pisau dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel.2.67

Ketersediaan Pangan di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Beras (ton)	977,133	1.316,123	1.460,091	1.280,450	1.246,273



Daging (ton)	1,739	1,773	1,839	0,915	0,915
--------------	-------	-------	-------	-------	-------

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pulang Pisau 2018

2.3.1.10. Pertanian

Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan urusan pertanahan di Kabupaten Pulang Pisau adalah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah yang dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan Kantor Badan Pertanahan Nasional Pulang Pisau.

Permasalahan pertanahan erat kaitannya dengan surat atau bukti kepemilikan atas tanah tersebut, sehingga Kabupaten Pulang Pisau selalu berusaha untuk meningkatkan anggarannya untuk mensertifikatkan hak atas tanah yang dikuasai dan dimiliki pemerintah daerah. Namun kemauan pemerintah daerah terhalang atau terhambat dengan pihak lain yang memiliki kewenangan dalam menerbitkan sertifikat atau bukti kepemilikan atas tanah dengan alasan kapasitas dan kemampuannya yang terbatas.

a. Persentase Luas Lahan Bersertifikat

Persentase Luas Lahan Bersertifikat adalah proporsi luas lahan bersertifikat (HGB, HGU, HM, HPL), terhadap luas wilayah daratan. Indikator pertanahan ini bertujuan untuk mengetahui tertib administrasi sebagai kepastian dalam kepemilikan. Berdasarkan data pada Kantor Badan Pertanahan Pulang Pisau, luas lahan bersertifikat di Kabupaten Pulang Pisau tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 adalah 33,61 persen.



Persentase Luas Lahan Bersertifikat di Kabupaten Pulang Pisau disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.68
Persentase Luas Lahan Bersertifikat
Di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2017

Indikator			2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Luas Lahan Bersertifikat (%)			16,7	16,79	17,3	18,62	33,61

Sumber: BPN Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018

2.3.1.11. Lingkungan Hidup

Pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup merupakan tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai tempat kelangsungan hidup makhluk hidup yang didalamnya terdapat air, tanah dan udara yang harus bersih dan berada pada ambang batas minimal pengaruh pencemaran sehingga tidak berpengaruh buruk pada kesehatan dan aktivitas masyarakat.

a. Persentase Penanganan Sampah

Persentase Penanganan Sampah di Kabupaten Pulang Pisau didapat dari volume sampah yang ditangani dalam satuan m³ dibagi dengan volume produksi sampah dalam satuan m³ dikalikan 100. Persentase penanganan sampah di Kabupaten Pulang Pisau disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.69
Persentase Penanganan Sampah
Di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2017

Indikator			2013	2014	2015	2016	2017
Volume sampah yang ditangani (m3)/hari			6	8	29	35	43



Volume produksi sampah (m3)/hari	74,66	100,47	102,48	102,71	103,10
Persentase pembuangan persatuan penduduk (%)	tempat sampah 8%	8%	28%	34%	39%

Sumber: Buku Putih Sanitasi (PPSP) Kabupaten Pulang Pisau

b. Penegakan Hukum Lingkungan

Penegakan Hukum Lingkungan adalah jumlah kasus lingkungan yang dapat diselesaikan penda berbagi dengan jumlah kasus lingkungan yang ada. Persentase penegakan hukum lingkungan di Kabupaten Pulang Pisau disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.70

Persentase Penegakan Hukum Lingkungan Di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan Pemerintah Daerah (kasus)	0	0	0	3	4
Jumlah kasus lingkungan yang ada (kasus)	0	0	0	5	4
Persentase Penegakan Hukum Lingkungan (%)	0	0	0	65	100

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulang Pisau 2018

2.3.1.12. Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan administrasi kependudukan merupakan urusan yang sangat penting dalam tata pemerintahan nasional. Data administrasi kependudukan akan menjadi rujukan penting bagi kebijakan-kebijakan di sektor lain bidang politik, sosial dan ekonomi. Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi



kependudukan serta pendayagunaan yang hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

a. Rasio Penduduk ber KTP Satuan Penduduk

Kartu Tanda Penduduk merupakan salah satu kartu identitas yang wajib dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI). KTP akan memudahkan pemerintah dalam melakukan pendataan dan juga dapat digunakan sebagai syarat untuk membuat surat-surat tertentu seperti SKCK, akte, NPWP, SIM, dan sebagainya. KTP wajib dimiliki oleh warga negara Indonesia yang berusia >17 tahun. Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk didapatkan dari rumus formula jumlah penduduk usia >17 tahun yang ber-KTP dibagi dengan jumlah penduduk usia >17 atau telah menikah. Status kepemilikan KTP di Kabupaten Pulang Pisau dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.71

**Rasio Penduduk ber KTP Satuan Penduduk
Di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2017**

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Rasio penduduk ber-KTP satuan penduduk (%)	56,07	56,23	56,44	58,06	63,45

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2018

b. Pasangan Berakta Nikah

Pasangan berakta nikah yang ada di Kabupaten Pulang Pisau dalam periode tahun 2013 sampai dengan 2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel 2.72

**Pasangan Akta Nikah
Di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2017**

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Pasangan Berakta Nikah (pasangan)	6	7	556	770	748
Rasio pasangan berakte nikah	0,21	0,29	3,40	21,91	22,67

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2018

c. Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 Penduduk

Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk yang ada di Kabupaten Pulang Pisau dalam periode tahun 2013 sampai dengan 2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.73

**Kepemilikan Akta Kelahiran
Di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2017**

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Akta Kelahiran (buah)	2.132	2.819	7.721	8.322	43.135
Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk (%)	72,25	72,56	72,95	83,38	85,42

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk tahun 2013 sebesar 72,25 persen, sedangkan di tahun 2017 meningkat menjadi 85,42 persen.

d. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

Penerapan KTP Nasional berbasis NIK yang ada di Kabupaten Pulang Pisau dalam periode Tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 berstatus “Sudah” dilaksanakan.



e. Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kabupaten

Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten adalah ada atau tidaknya ketersediaan database kependudukan skala kabupaten. Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten di Kabupaten Pulang Pisau dari tahun 2013 sampai dengan 2017 sudah tersedia.

Tabel 2.74

Persentase Ketersediaan Database Kependudukan Di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten (ada/tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2018

2.3.1.13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa atau kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pengangguran. Rata-rata jumlah kelompok binaan LPM adalah banyaknya kelompok binaan LPM dalam 1 (satu) tahun dibagi dengan jumlah LPM. Semakin besar rata-rata jumlah kelompok binaan LPM menggambarkan keaktifan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah melalui LPM. Besarnya rata-rata jumlah kelompok binaan LPM juga menunjukkan besarnya pelayanan penunjang



yang dapat diciptakan oleh pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui pembentukan LPM, adapun data terkait LPM pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 dapat disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.75
Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	90	99	99	99	99

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2018

b. Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, serta sejahtera, maju dan mandiri, kesejahteraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan Lingkungan. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK adalah banyaknya kelompok binaan PKK dalam 1 (satu) tahun dibagi dengan jumlah PKK. Kelompok binaan PKK adalah kelompok-kelompok masyarakat yang berada di bawah Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan, yang dapat dibentuk berdasarkan kewilayahan atau kegiatan seperti kelompok dasawisma atau sejenis lainnya. Tim penggerak PKK adalah mitra kerja pemerintah dan



organisasi kemasyarakatan, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK.

Untuk menghitung jumlah PKK maka dihitung dari jumlah tim penggerak PKK dalam lingkup wilayah pemerintah daerah. Tim penggerak PKK beranggotakan warga masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, perorangan, bersifat sukarela, tidak mewakili organisasi, golongan partai politik, lembaga atau instansi, dan berfungsi sebagai perencana, pelaksana pengendali gerakan PKK.

c. Persentase PKK Aktif

Persentase PKK aktif adalah jumlah PKK aktif berbagi dengan jumlah PKK dikalikan 100 persen. Persentase PKK aktif di Kabupaten Pulang Pisau disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel. 2.76
Persentase PKK Aktif
Di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah PKK Aktif (kelompok)	99	99	99	99	99
Jumlah PKK (kelompok)	99	99	99	99	99
Persentase PKK Aktif (%)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2018

d. Jumlah BUMDES/BUMADES di Kabupaten Pulang Pisau

Jumlah BUMDES/BUMADES yang terdata di Kabupaten Pulang Pisau pada tahun 2018



berjumlah 70 Bumdes. Berdasarkan data desa yang berjumlah 95 Desa di Kabupaten Pulang Pisau maka masih terdapat 25 desa yang belum memiliki Bumdes. Secara lengkap jumlah Bumbes per kecamatan di Kabupaten Pulang Pisau per tahun 2018 disajikan pada tabel berikut :

Tabel. 2.77
Jumlah BUMDES/BUMADES
Di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018

Kecamatan	Jumlah BUMDES/BUMADES
1	2
Kahayan Hilir	7
Sebangau Kuala	7
Pandih Batu	9
Maliku	15
Kahayan Kuala	12
Jabiren Raya	6
Kahayan Tengah	13
Banama Tingang	1
Jumlah	70

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2018

e. Indeks Desa Membangun (IDM)

Dari 95 desa di Kabupaten Pulang Pisau hasil pemutakhiran status perkembangan Indeks Desa Membangun Tahun 2017, maka ditetapkan status desa-desa di Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana disajikan pada tabel berikut :



Tabel. 2.78
Status Desa Kabupaten Pulang Pisau
Berdasarkan Indeks Desa Membangun Tahun 2017

Kecamatan	Status Desa			
	Tertinggal	Berkembang	Sangat Tertinggal	Maju
1	2	3	4	5
Kahayan Hilir	-	6	-	1
Sebangau Kuala	1	5	2	-
Pandih Batu	5	11	-	-
Maliku	2	12	-	1
Kahayan Kuala	8	2	2	-
Jabiren Raya	4	4	-	-
Kahayan Tengah	12	1	1	-
Banama Tingang	10	2	3	-
Jumlah	41	43	8	2

2.3.1.14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Keluarga Berencana merupakan salah satu program dari pemerintah pusat dalam rangka mengendalikan populasi penduduk yang terus meningkat. Keluarga berencana itu sendiri memiliki arti gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Salah satu dari program keluarga berencana berupaya mengurangi tingkat kelahiran terutama melalui program penggunaan alat kontrasepsi secara konsisten dan berkesinambungan. Disamping itu program keluarga bertujuan untuk membangun keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. Akseptor KB dalam pembangunan memberikan kontribusi dalam rangka pengendalian jumlah penduduk agar ledakan penduduk dapat terkontrol dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat. Target dan realisasi akseptor baru cukup signifikan dalam pencapaiannya. Ini menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat dalam ber KB cukup baik. Untuk akseptor aktif masih perlu ditingkatkan pencapaiannya karena realisasi capaian belum mencapai target.

**a. Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga**

Salah satu indikator keberhasilan keluarga berencana adalah penurunan rata-rata jumlah anak perkeluarga. Perhitungan indikator ini adalah dengan cara membagi rasio anak seluruhnya dengan rasio keluarga. Rasio anak adalah rasio seluruh penduduk usia 0-18 tahun. Berikut rata-rata jumlah anak per keluarga di Kabupaten Pulang Pisau. Rata-rata jumlah anak per keluarga pada tahun 2013 samapai dengan tahun 2017 tidak mengalami perkembangan pada kisaran 2 sampai 3 anak.

Tabel 2.79**Rata rata Jumlah Anak per Keluarga
di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2017**

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Rata-rata jumlah anak per keluarga (anak)	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan KB dan Perlindungan Anak Tahun 2018

b. Cakupan Peserta KB Aktif

Cakupan Peserta KB Aktif adalah jumlah peserta program KB aktif berbagi dengan jumlah pasangan usia subur dikalikan 100. Adapun cakupan peserta KB Aktif yang ada di Kabupaten Pulang Pisau pada dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.80**Cakupan Peserta KB Aktif
Di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Peserta Program KB Aktif	17.046	21.740	N/A	N/A	N/A



Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Pasangan Usia Subur	24.026	22.915	N/A	N/A	N/A
Cakupan KB Aktif (persen)	70.94	94.87	N/A	N/A	N/A

Sumber: Dinas Kesehatan Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa cakupan peserta KB Aktif periode 2013 sampai 2014 di Kabupaten Pulang Pisau mengalami peningkatan mencapai 23.93 %.

c. Keluarga Prasejahtera

Keberhasilan program KB tidak terlepas dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan lembaga atau organisasi masyarakat lainnya yang secara bersama-sama mensukseskan program dimaksud yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan tahapan atau tingkatan kesejahteraan keluarga, maka setiap keluarga dapat dikelompokkan kepada 5 (lima) tahapan keluarga yaitu : Keluarga Prasejahtera, Keluarga Sejahtera Tahap I, Keluarga Sejahtera Tahap II, Keluarga Sejahtera Tahap III, dan Keluarga Sejahtera Tahap III plus.

d. Cakupan PPKBD di setiap desa/kelurahan

Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) merupakan salah satu unsur yang dibutuhkan dalam menyukseskan program KB. Gambaran mengenai PPKBD di setiap desa/kelurahan mulai 2013 sampai 2017 disajikan pada tabel dibawah.



Berdasarkan data series mulai 2013 sampai dengan 2017, cakupan PPKBD di setiap desa/kelurahan tidak berubah yaitu sebesar 97 %.

Tabel 2.81
Cakupan PPKBD di setiap desa/kelurahan
Tahun 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan PPKBD di setiap desa/kelurahan (%)	97	97	97	97	97

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan KB dan Perlindungan Anak Tahun 2018

2.3.1.15. Perhubungan

a. Jumlah Terminal Angkutan Umum

Terminal merupakan salah satu komponen prasarana dalam transportasi, terminal berfungsi sebagai titik tempat masuk dan keluarnya penumpang dan barang dalam sistem angkutan. Terminal dapat dibedakan menjadi dua yaitu terminal penumpang dan terminal barang. Terminal penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum. Sedangkan terminal barang merupakan prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan atau antar moda transportasi. Pada umumnya terminal penumpang dan terminal barang dijadikan satu lokasi terminal karena untuk memudahkan bagi penumpang yang bepergian dengan membawa barang bawaannya. Jenis dan Jumlah Terminal di Kabupaten Pulang



Pisau Tahun 2013-2017 disajikan pada tabel berikut.

Tabel.2.82
Jenis dan Jumlah Terminal
di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Terminal Kelas C	2	2	2	4	4

Sumber: Dinas Perhubungan Tahun 2018

b. Pemasangan Rambu-Rambu

Pemasangan rambu-rambu lalu lintas yang ada di Kabupaten Pulang Pisau mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 sebanyak 541 rambu lalu lintas jalan, 16 rambu sungai, 15 set rambu APILL untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan tabel sebagai berikut.

Tabel 2.83
Pemasangan Rambu
di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Rambu Lalu Lintas Jalan Terpasang (Unit)	335	335	335	541	541
Jumlah Rambu Sungai Terpasang (Unit)	16	16	16	16	16
Jumlah Rambu APILL Terpasang (Set)	NA	NA	10	15	15
Jumlah RPPJ Terpasang (Unit)	NA	NA	NA	NA	NA

Sumber: Dinas Perhubungan Tahun 2018

c. Rasio Izin Trayek

Izin Trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan/atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa



angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang. Banyaknya izin trayek di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013 sampai dengan 2017 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.84
Banyak Izin Trayek
di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Izin Trayek Perkotaan	NA	NA	NA	NA	NA
Izin Trayek Perdesaan	12	8	12	10	7

Sumber: Dinas Perhubungan Tahun 2018

2.3.1.16. Komunikasi dan Informatika

a. Keberadaan Website Milik Pemerintah Daerah

Keberadaan website milik pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Untuk Status Website di Kabupaten Pulang Pisau dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.85
Status Website Milik Pemerintah Daerah
di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Website Milik Pemerintah Daerah	(www.pulangpisaukab.go.id)	(www.pulangpisaukab.go.id)	(www.pulangpisaukab.go.id)	(www.pulangpisaukab.go.id)	(www.pulangpisaukab.go.id)

Sumber: Dinas Kominfostandi Tahun 2018



Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau telah memiliki website resmi milik pemerintah daerah dialamat **www.pulang.pisaukab.go.id**

2.3.1.17. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan. Usaha kecil adalah peluang usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Sedangkan Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

a. Persentase Koperasi Aktif

Pemberdayaan koperasi merupakan langkah strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian masyarakat, karena koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Koperasi



bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur.

Tabel 2.86**Persentase Koperasi Aktif
Di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2017**

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Koperasi Aktif (jumlah)	104	115	131	137	138
Jumlah Seluruh Koperasi (jumlah)	145	154	170	175	176
Persentase Koperasi Aktif (%)	71,72	74,68	77,06	78,29	78,41

Sumber: Disperindapkop UMKM Tahun 2018

b. Usaha Mikro dan Kecil

Usaha Mikro dan Kecil adalah jumlah usaha mikro dan kecil berbagi dengan jumlah seluruh UKM. Sasaran pengembangan koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) ke depan adalah meningkatnya kontribusi dalam perekonomian. Dengan adanya UMKM yang tersebar diseluruh pelosok daerah, membuat masyarakat kecil tidak perlu berbondong-bondong hijrah ke kota demi mendapatkan kehidupan yang layak. Berikut adalah data Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013 hingga Tahun 2017.

Tabel 2.87**Persentase Usaha Mikro dan Kecil
Di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2017**

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Usaha Mikro dan Kecil (jumlah)	3922	4051	5469	5939	6336



Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Seluruh UKM (jumlah)	4177	4353	5836	6355	6719
Persentase UKM (%)	93,90	93,06	93,71	93,45	94,30

Sumber: Disperindapkop UMKM Tahun 2018

2.3.1.18. Penanaman Modal

Penanaman Modal menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 memberikan pengertian penanaman modal sebagai segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) untuk melakukan usaha di Wilayah Negara Republik Indonesia. Alasan Kabupaten Pulang Pisau untuk melaksanakan penanaman modal adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperluas lapangan kerja di Kabupaten Pulang Pisau. Dengan penanaman modal dapat dicapai tujuan seperti mengembangkan industri substitusi import untuk menghemat devisa, mendorong ekspor non migas untuk menghasilkan devisa, alih teknologi, membangun prasarana dan pengembangan daerah tertinggal.

a. Jumlah Investor

Indikator ini digunakan untuk melihat jumlah investor berskala nasional yang berupa PMDN dan PMA, hal ini dilakukan karena semakin banyak jumlah investor maka akan semakin menggambarkan ketersediaan pelayanan penunjang yang dimiliki daerah berupa ketertarikan investor untuk meningkatkan investasinya di daerah. Adapun jumlah investor PMDN di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013



sampai dengan tahun 2017 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.88

**Jumlah Investor PMDN
Di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2017**

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah investor PMDN (unit)	N/A	N/A	2	22	11

Sumber: BPMTSP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018

b. Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN

Kenaikan atau Penurunan Nilai Realisasi PMDN adalah Realisasi PMDN tahun berkenaan diambil dengan realisasi PMDN tahun yang lalu berbadi dengan realisasi tahun berkenaan dikalikan 100. Adapun Kenaikan atau Penurunan Nilai Realisasi PMDN di Kabupaten Pulang Pisau dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.89

**Nilai Realisasi PMDN
Di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2017**

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1	Realisasi Tahun berkenaan (Rp)	N/A	N/A	44.050.000	173.287.444.588	822.894.574.572

Sumber: BPMTSP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018

2.3.1.19. Kepemudaan dan Olahraga

Organisasi pemuda adalah sekelompok pemuda yang bekerjasama dengan suatu perencanaan-perencanaan kerja dan peraturan-peraturan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jumlah organisasi pemuda dihitung dari jumlah organisasi pemuda yang aktif sampai



dengan tahun pengukuran. Organisasi olahraga adalah organisasi formal yang dibentuk oleh sekelompok masyarakat olahraga yang bekerjasama dengan suatu perencanaan kerja dan peraturan.

Kegiatan kepemudaan adalah kegiatan atau “*event*” kepemudaan yang diselenggarakan dalam bentuk pertandingan, perlombaan, dan upacara serta kejadian atau peristiwa sejenis. Jumlah kegiatan kepemudaan dihitung dari jumlah kegiatan kepemudaan dalam satu periode tahun. Kegiatan olahraga adalah kegiatan atau “*event*” olahraga yang diselenggarakan baik oleh pemerintah daerah, swasta dan masyarakat. Kegiatan olahraga dapat diselenggarakan dalam bentuk pertandingan dan perlombaan serta kejadian atau peristiwa sejenis. Jumlah kegiatan olahraga dihitung dari jumlah kegiatan atau “*event*” olahraga dalam satu periode tahun.

a. Jumlah Organisasi Pemuda

Jumlah organisasi pemuda pada tahun 2013 mencapai 13 organisasi pemuda dan mengalami peningkatan pada tahun 2015 menjadi 15 organisasi pemuda, kemudian menurun pada tahun 2016 menjadi 17 organisasi pemuda.

Berikut adalah tabel jumlah organisasi pemuda di Kabupaten Pulang Pisau tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 :



Tabel 2.90
Jumlah Organisasi Pemuda
Di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Organisasi Pemuda (unit)	13	13	15	17	17

Sumber: Dispora Kabupaten Pulang Pisau 2018

b. Jumlah Organisasi Olahraga

Jumlah Organisasi olahraga pada tahun 2013 mencapai 18 organisasi dan mengalami peningkatan pada tahun 2015 dan 2016 menjadi 25 organisasi olahraga.

Berikut adalah tabel jumlah organisasi olahraga di Kabupaten Pulang Pisau tahun 2013 sampai dengan tahun 2017

Tabel 2.91
Jumlah Organisasi Olahraga
Di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Organisasi Olahraga (unit)	18	18	25	25	25

Sumber: Dispora Kabupaten Pulang Pisau 2018

Seiring dengan perkembangan olahraga yang berkembang di masyarakat baik itu olahraga tradisional maupun olahraga prestasi maka diharapkan dapat meningkatkan jumlah organisasi olahraga di tahun-tahun yang akan datang.

c. Jumlah Kegiatan Pemuda

Jumlah kegiatan pemuda pada tahun pada tahun 2017 sebanyak 9 kegiatan. Berikut adalah tabel



jumlah kegiatan pemuda di Kabupaten Pulang Pisau tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.

Tabel 2.92
Jumlah Kegiatan Pemuda
Di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Kegiatan Pemuda (kegiatan)	5	7	8	8	9

Sumber: Dispora Kabupaten Pulang Pisau 2018

Guna meningkatkan partisipasi pemuda khususnya pemuda pelajar di Kabupaten Pulang Pisau maka diharapkan terjadi peningkatan jumlah kegiatan pemuda yang dapat diakomodir oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

d. Jumlah Kegiatan Olahraga

Jumlah kegiatan olahraga pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 sebanyak empat kegiatan. Berikut adalah tabel jumlah kegiatan olahraga di Kabupaten Pulang Pisau tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.

Tabel 2.93
Jumlah Kegiatan Olahraga
Di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Kegiatan Olahraga (kegiatan)	4	4	4	4	4

Sumber: Dispora Kabupaten Pulang Pisau 2018

**e. Jumlah Gelanggang/Balai Remaja**

Jumlah gelanggang /balai remaja tahun 2015 dan 2016 sebanyak 2 gelanggang/balai remaja. Berikut adalah tabel jumlah gelanggang / balai remaja di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013 sampai dengan tahun 2017;

Tabel 2.94
Jumlah Gelanggang/Balai Remaja
Di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Gelanggang/Balai Remaja (unit)	2	2	2	2	2

Sumber: Dispora Kabupaten Pulang Pisau 2018

f. Lapangan Olahraga

Jumlah lapangan olahraga pada tahun 2014 sebanyak 11 lapangan, meningkat di tahun 2015 dan 2016 menjadi 12 lapangan dan 14 lapangan. Berikut adalah tabel jumlah lapangan olahraga di Kabupaten Pulang Pisau tahun 2013 sampai dengan tahun 2017

Tabel 2.95
Jumlah Sarana Olahraga
Di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Sarana Olahraga (unit)	11	11	12	13	14

Sumber: Dispora Kabupaten Pulang Pisau 2018

2.3.1.20. Statistik**a. Buku Kabupaten Dalam Angka**

Indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan urusan statistik daerah



berdasarkan lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah ketersediaan dokumen perencanaan seperti Buku “Kabupaten Dalam Angka”

Dokumen tersebut ada di Kabupaten Pulang Pisau, disusun oleh Badan Pusat Statistik. Penyusunan buku tersebut penting kaitannya dengan keberadaan data yang digunakan sebagai rujukan dalam merancang kebijakan, dan penyusunan program kegiatan.

Tabel 2.96
Buku Kabupaten Dalam Angka
Di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Buku Kabupaten Dalam Angka (Dokumen)	1	1	1	1	1

Sumber: BPS Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018

b. Buku PDRB Kabupaten

Indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan urusan statistik daerah berdasarkan lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah ketersediaan dokumen perencanaan Buku “PDRB Kabupaten”

Dokumen tersebut ada di Kabupaten Pulang Pisau, disusun oleh Badan Pusat Statistik. Penyusunan buku tersebut penting kaitannya dengan keberadaan data yang digunakan sebagai rujukan dalam merancang kebijakan, dan penyusunan program kegiatan.



Tabel 2.97
Buku PDRB Kabupaten
Di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2017

No	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Buku PDRB Kabupaten (Dokumen)	1	1	1	1	1

Sumber: BPS Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018

2.3.1.21. Kebudayaan

a. Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Penyelenggaraan Festival seni dan budaya adalah jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya yang ada. Adapun jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kabupaten Pulang Pisau disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.98

Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya
Di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kegiatan)	1	1	1	1	1

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018

b. Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya

Sarana Penyelenggaraan seni dan budaya adalah jumlah Sarana Penyelenggaraan seni dan budaya yang ada. Adapun jumlah sarana Penyelenggaraan seni dan budaya di Kabupaten Pulang Pisau disajikan pada tabel dibawah ini :



Tabel 2.99

Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah penyelenggaraan sarana seni dan budaya (unit)	1	1	1	1	1

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018

c. Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan

Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan adalah jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan dibagi dengan total Benda, Situs dan Kawasan yang dimiliki daerah dikalikan 100 . Adapun persentase Benda, Situs dan Kawasan di Kabupaten Pulang Pisau disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.100

Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan Di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan (unit)	4	4	4	4	4
total Benda, Situs dan Kawasan yang dimiliki daerah (unit)	16	16	16	16	16
Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan (%)	25%	25%	25%	25%	25%

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018

2.3.1.22. Perpustakaan

Perpustakaan adalah suatu wadah atau tempat di mana di dalamnya terdapat bahan pustaka untuk masyarakat, yang disusun menurut sistem tertentu,



yang bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan. Jumlah perpustakaan dihitung berdasarkan jumlah perpustakaan umum yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat yang beroperasi di wilayah pemerintah daerah. Perpustakaan umum merupakan perpustakaan yang bertugas mengumpulkan, menyimpan, mengatur dan menyajikan bahan pustakanya untuk masyarakat umum.

Perpustakaan merupakan bagian yang sangat penting dan strategis dalam menunjang kualitas tingkat pendidikan di Kabupaten Pulang Pisau. Oleh karena itu, urusan perpustakaan diarahkan untuk meningkatkan pelayanan umum masyarakat di bidang perpustakaan dan kesadaran masyarakat terhadap arti pentingnya perpustakaan sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang gemar membaca dan cinta buku.

a. Jumlah Pengunjung Perpustakaan per tahun

Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun di Kabupaten Pulang Pisau dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.101

**Jumlah Pengunjung Perpustakaan
Di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2017**

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (orang)	2.300	2.300	7.016	3.546	1.818
Jumlah Orang Dalam Populasi Yang Harus Dilayani (orang)	2.815	7.920	9.240	10.560	13.200
Persentase Pengunjung Perpustakaan (%)	81,70%	29,04%	75,93%	33,58%	13,77%

Sumber: Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 2018



Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase jumlah pengunjung perpustakaan di Kabupaten Pulang Pisau sesuai realisasi dan terget yang telah ditetapkan mengalami penurunan dari tahun 2013 ke 2014 yaitu 52,66% kemudian tahun 2014 ke 2015 terjadi kenaikan sebesar 46,89% lalu ditahun 2016 persentasenya menjadi 33,58% dan terakhir ditahun 2017 turun lagi menjadi 13,77%.

b. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan Kabupaten Pulang Pisau dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.102

Koleksi Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (eksemplar)	9.306	9.306	9.306	9.394	10.541
Persentase Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (%)	355,60%	257,30%	181,90%	132,00%	87,00%

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2018

Sesuai tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah terlihat stagnan dari tahun 2013 sampai 2015 atau tidak terjadi penambahan jumlah koleksi buku, namun di tahun setelahnya terjadi penambahan jumlah koleksi buku yaitu tahun 2016 dan hingga terakhir ditahun 2017.



2.3.1.23. Kearsipan

Pengelolaan Arsip secara baku adalah pengelolaan arsip yang sesuai peraturan perundangan yang berlaku yang bertujuan:

1. menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perorangan, serta Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai penyelenggara nasional;
2. menyediakan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah;
3. mewujudkan pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan aturan yang ada;
4. melindungi kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya;
5. menciptakan penyelenggaraan kearsipan nasional yang dinamis sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu;
6. menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
7. menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa; dan
8. meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.



a. Persentase OPD Yang Mengelola Arsip Secara Baku

Persentase OPD yang mengelola arsip secara baku adalah jumlah OPD yang telah menerapkan arsip secara baku dibagi dengan jumlah OPD dikalikan 100. Adapun Penerapan pengelolaan arsip secara baku di Kabupaten Pulang Pisau dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.103

Persentase SKPD Yang Mengelola Arsip Secara Baku di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah SOPD yang Telah Menerapkan Arsip Secara Baku (unit)	28	28	27	28	27
Jumlah SOPD (unit)	36	36	36	36	36
Persentase SOPD Yang Mengelola Arsip Secara Baku (%)	78,90%	78,90%	76,92%	78,00%	75,00%

Sumber: Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Tahun 2018

b. Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan

Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan di Kabupaten Pulang Pisau dapat diakumulasikan berdasar pada kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pulang Pisau dan kegiatan yang diikuti baik kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi atau Arsip Nasional Republik Indonesia.

Tabel 2.104

Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
-----------	------	------	------	------	------



Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan (kegiatan)	2	2	2	3	6
--	---	---	---	---	---

Sumber: Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Tahun 2018

2.3.2. Layanan Urusan Pilihan

Urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah di Kabupaten Pulang Pisau. Urusan pilihan meliputi pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan.

2.3.2.1. Kelautan dan Perikanan

Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, mengamanatkan bahwa pengelolaan perikanan harus dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kebersamaan, kemitraan, kemandirian, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, kelestarian, dan pembangunan yang berkelanjutan.

Sasaran pembangunan kelautan dan perikanan adalah mencapai peningkatan produksi dan produktivitas perikanan dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi ikan, menyediakan bahan baku industri, meningkatkan pendapatan pembudidaya dan nelayan serta memperluas kesempatan berusaha dan kesempatan kerja. Potensi kelautan dan perikanan cukup besar dan masih terbuka peluang untuk pengembangannya.

a. Produksi Perikanan

Produksi Perikanan adalah jumlah produksi ikan dalam satuan ton berbagi target daerah dalam satuan ton dikalikan 100. Adapun persentase



produksi perikanan yang ada di Kabupaten Pulang Pisau dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.105
Produksi di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Produksi Perikanan (Ton)	23.469,82	23.731,99	22.249,55	23.058,02	23.493,99
Target Daerah (Ton)	18.147,94	21.099,21	25.050,64	27.275,53	29.500,42
Persentase Produksi Perikanan (%)	129,32%	112,48%	88,82%	84,54%	79,64%

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018

Data produksi perikanan tahun 2015 sampai dengan 2017 terjadi penurunan produksi disebabkan adanya larangan penggunaan alat tangkap ikan seperti lampara dasar untuk menangkap udang berdasarkan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan no 2 tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkap ikan pukat hela (Trawls) dan pukat Tarik (Sine Nets) yang tergolong ke lampara dasar.

b. Konsumsi Ikan

Konsumsi Ikan adalah jumlah konsumsi ikan dalam satuan kg berbagi dengan target daerah dalam satuan kg dikalikan 100. Adapun persentase konsumsi ikan yang ada di Kabupaten Pulang Pisau dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel.2.106
Konsumsi Ikan di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Konsumsi Ikan (Kg)	35,96	44,41	32,68	32,67	31,86
Target Daerah (Kg)	37,86	37,98	39,11	40,29	41,5



Persentase Konsumsi Ikan (Kg)	94,98%	116,93%	83,56%	81,09%	76,77%
-------------------------------	--------	---------	--------	--------	--------

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018

2.3.2.2. Pariwisata

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pariwisata merupakan industri jasa, berkaitan dengan transportasi, tempat tinggal, makanan, minuman, dan jasa lainnya seperti bank, asuransi, keamanan. Pariwisata menawarkan tempat istirahat, budaya, petualangan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah total nilai produksi barang dan jasa yang diproduksi dalam wilayah tertentu dan dalam waktu tertentu (satu tahun). Kabupaten Pulang Pisau sebagai bagian dari keindahan alam Indonesia selalu berusaha menggali dan mengembangkan potensi wilayah dalam bidang pariwisata.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan nasional dan penciptaan lapangan kerja dan kesempatan usaha masyarakat, destinasi pariwisata dapat dikembangkan dengan seluas-luasnya. Selain itu, pariwisata juga berperan dalam pemerataan pendapatan dan mendukung perkembangan dan pelestarian seni budaya dan keindahan alam di Kabupaten Pulang Pisau. Untuk mewujudkan hal tersebut Pemerintah Daerah telah berusaha mengeluarkan berbagai kebijakan di bidang Pariwisata untuk menarik turis datang, baik dari dalam negeri (turis domestik) maupun dari luar negeri (turis asing).



a. Kunjungan Wisata

Kunjungan Wisata menunjukkan total jumlah wisatawan per tahun yang ke Kabupaten Pulang Pisau. Kunjungan wisatawan yang datang ke Kabupaten Pulang Pisau merupakan barometer keberhasilan pariwisata Kabupaten Pulang Pisau. Wisatawan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu Wisatawan Manca Negara (Wisman) dan Wisatawan Nusantara (Winus). Adapun jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Pulang Pisau dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.107
Data Kunjungan Wisatawan
Di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2014-2016

Indikator	Tahun						Lama Tinggal
	2014		2015		2016		
	Wisman	Winus	Wisman	Winus	Wisman	Winus	
Jumlah Kunjungan Wisata Sandung Tamanggung Lawak Surajaya Pati (kunjungan)	495	600	125	1.283	300	2.010	1 hari
Jumlah Kunjungan Wisata Rumah Betang Buntoi (kunjungan)	25	411	25	411	50	50	1 hari
Jumlah Kunjungan Wisata Taman Nasional Sebangau (kunjungan)	98	2.637	26	85	41	41	1 hari
JUMLAH (kunjungan)	618	3.648	176	1.779	391	2.101	

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018

2.3.2.3. Pertanian

Pertanian merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Indikator yang digunakan untuk mengetahui urusan pilihan bagian pertanian salah satunya dengan



melihat Kontribusi sektor pertanian dari PDRB. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah total nilai produksi barang dan jasa yang diproduksi dalam wilayah tertentu dan dalam waktu tertentu (satu tahun). Dalam hal ini yang termasuk dengan sektor pertanian adalah tanaman pangan, palawija, kehutanan dan perkebunan.

a. Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Perhektar

Produktivitas padi atau pangan utama lokal lainnya perhektar adalah produksi tanaman padi atau bahan utama lokal lainnya dalam satuan ton berbagi dengan luas areal tanaman padi atau bahan utama lokal lainnya dalam satuan ha dikalikan 100. Adapun Produktivitas padi atau pangan utama lainnya di Kabupaten Pulang Pisau dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel.2.108

Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Perhektar di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Produksi Tanaman Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Perhektar	120.459	163.219	182.285	160.676	157.256
Luas Panen Padi/Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya (ha)	34.576	43.831	47.594	52.335	49.228
Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Perhektar (ton/ha)	3,48	3,72	3,83	3,07	3,19

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018

**b. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB**

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB di Kabupaten Pulang Pisau mencakup pertanian tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, dan jasa pertanian dan perburuan hewan yang ditujukan untuk dijual. Adapun kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB di Kabupaten Pulang Pisau dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel.2.109**Kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB
Di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2017**

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (Rp)	890.293,4	1,029.623,0	1.152.264,8	1.223.840,9	N/A
Jumlah Total PDRB (Rp)	2.815.478,2	3.222.252,9	3.645.792,4	4.025.848	4.438.889
Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (%)	31,6	32	31,6	30,4	30,4

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018

2.3.2.4 Kehutanan

Sumberdaya hutan merupakan salah satu penyangga kehidupan yang harus dikelola dengan bijaksana agar mampu memberikan kontribusi dan manfaat secara optimal dan lestari. Hutan rakyat dapat memberikan manfaat sebagai salah satu penyangga ekonomi masyarakat antara lain dalam bentuk pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan pengembangan wilayah.

Hutan sebagai suatu ekosistem tidak hanya menyimpan sumberdaya alam berupa kayu, tetapi



masih banyak potensi non kayu yang dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai ekosistem, hutan sangat berperan dalam penyediaan sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global.

Pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya. Hutan sebagai sumber daya nasional harus dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi masyarakat sehingga tidak boleh terpusat pada seseorang, kelompok, atau golongan tertentu. Manfaat yang optimal bisa terwujud apabila kegiatan pengelolaan hutan dapat menghasilkan hutan yang berkualitas tinggi dan lestari.

a. Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis

Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis adalah Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi berbagi dengan luas total hutan dan lahan kritis dikalikan 100 persen. Adapun Rehabilitasi hutan dan lahan kritis di Kabupaten Pulang Pisau dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.110
Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis
di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Luas Hutan dan Lahan Kritis Yang direhabilitasi (Ha)	350	300	150	NA	NA
Luas Total Hutan dan Lahan Kritis (Ha)	352	302	300	NA	NA



Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (%)	50,14	49,83	33.33	NA	NA
---	-------	-------	-------	----	----

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018

b. Kerusakan Kawasan Hutan

Kerusakan Kawasan Hutan adalah Luas kerusakan kawasan hutan dibagi dengan luas kawasan hutan dikalikan 100 persen. Adapun kerusakan kawasan hutan di Kabupaten Pulang Pisau dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel.2.111

**Luas Kerusakan Hutan dan Lahan (Karhutla)
di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2017**

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Luas Kerusakan Kawasan Hutan	662,747	662,941	706,459	710,111	713,334
Luas Kawasan Hutan	319,909	319,715	276,197	272,545	269,321
Persentase Kerusakan Kawasan Hutan	67.44	67.46	71.89	72.26	72.59

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018

c. Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB

Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan kehutanan meliputi kayu gelondongan (baik yang berasal dari hutan rimba maupun hutan budidaya), kayu bakar, rotan, bambu dan hasil hutan lainnya. Dicapuk juga dalam kegiatan kehutanan adalah jasa yang menunjang kegiatan kehutanan atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak termasuk kegiatan reboisasi hutan yang dilakukan atas dasar kontrak. Adapun Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB di Kabupaten Pulang Pisau dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel.2.112

Kontribusi sektor Kehutanan terhadap PDRB di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB (%)	6.53	6.31	6.05	NA	NA

Sumber: BPS Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018

2.3.2.4. Perdagangan

Perdagangan adalah proses tukar menukar barang dan jasa dari suatu wilayah dengan wilayah lainnya.

a. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB adalah jumlah kontribusi PDRB dari sektor perdagangan dibagi dengan jumlah total PDRB dikalikan 100 persen. Adapun kegiatan sektor perdagangan meliputi kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran (penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang-barang tersebut. Baik penjualan secara grosir (perdagangan besar) maupun eceran merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barang dagangan.

Adapun Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB di Kabupaten Pulang Pisau dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel.2.113

**Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB
di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2017**

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	5,22	8,56	6,96	7,25	7,41

Sumber: Kabupaten Pulang Pisau Dalam Angka Tahun 2018

2.3.2.5. Perindustrian**a. Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB**

Sektor industri merupakan sektor utama dalam perekonomian Indonesia yang memberikan kontribusi terbesar dalam pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pulang Pisau. Adapun kontribusi sektor Industri (Pengolahan) di Kabupaten Pulang Pisau dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel.2.114

**Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB
di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2017**

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%)	15,06	10,94	9,28	8,92	8,95

Sumber: Kabupaten Pulang Pisau Dalam Angka Tahun 2018

Tabel 2.115

**Persentase Pertumbuhan Industri
di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2012-2016**

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Kelompok Pengrajin yang mendapat bantuan (kelompok)	0	0	6	6	0
Jumlah Kelompok Pengrajin (kelompok)	33	48	50	62	63
Cakupan bina kelompok pengrajin (kelompok)	0	0	12	9,7	0

Sumber: Dinas Perindagkop UMKM Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018



2.3.2.6. Ketransmigrasian

Pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 terdapat 3.681 jiwa transmigran binaan, sedangkan pada tahun 2016 dan 2017 sudah tidak ada lagi transmigran binaan baik transmigrasi umum maupun transmigrasi swakarsa. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel.2.116
Jumlah Transmigran dan Persentase Transmigrasi Swakarsa
di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah transmigran (orang)	3.681	3.681	3.681	-	-
Persentase Transmigran Swakarsa (%)	0%	0%	0%	0%	0%

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pulang Pisau 2018

2.3.3. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2.3.3.1. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan Pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Dokumen perencanaan daerah Kabupaten Pulang Pisau terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berisi visi dan misi kepala daerah terpilih yang nanti akan dijabarkan dalam program kerja dan perencanaan



pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD). RPJMD akan dijabarkan dengan rencana tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

a. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA

Rencana pembangunan merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan secara periodik. Pembangunan jangka panjang merupakan acuan pelaksanaan pembangunan yang disusun dalam jangka waktu 20 tahun. Adanya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) sangat penting, agar pembangunan dapat mencapai visi dan misi daerah secara tepat dan dapat tergambar dengan jelas. Ketersediaan dokumen perencanaan RPJPD hendaknya tidak hanya dipahami secara administratif, sebagai sebuah kewajiban untuk memenuhi ketentuan normatif. Tersedianya dokumen perencanaan hendaknya dapat memenuhi fungsi substantifnya. Sebagai wujud untuk memaknai fungsi tersebut maka perhatian terhadap visi dan misi yang tertuang dalam RPJPD menjadi sangat penting. Adapun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pulang Pisau ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 12 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2006-2026.



Tabel 2.117
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2012-2016

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA (dokumen)	1	1	1	1	1

Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018

b. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA

Dokumen perencanaan RPJMD merupakan dokumen turunan dari RPJPD yang lebih substansial. Setiap RPJMD ditetapkan oleh Peraturan daerah/Peraturan Kepala Daerah. Adanya dokumen ini menjelaskan bahwa terdapat dokumen perencanaan yang telah dilegalkan melalui Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah yang kemudian memiliki konsekuensi yang jelas dan terarah dalam menentukan rangkaian pembangunan pada lima tahun ke depan. RPJMD merupakan dokumen pembangunan yang menjabarkan program-program selama 5 tahun dan berpedoman terhadap RPJPD. Ketersediaan RPJMD merupakan bentuk langkah-langkah pemerintah daerah di tiap 5 tahun untuk mencapai visi misi kepala daerah. RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan daerah/Peraturan Kepala Daerah selanjutnya digunakan sebagai acuan pembangunan dalam jangka menengah. Di dalam pelaksanaan pembangunan secara terus-menerus dan terarah ini maka dokumen yang menjadi dasar selanjutnya dalam penyusunan RKPD. Jaminan keberlanjutan program akan sangat terdukung oleh adanya



dokumen RPJMD. Konsistensi arah pembangunan menjadi lebih terjaga secara berkelanjutan, sehingga pencapaian visi dan misi lebih optimal. Adapun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pulang Pisau ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2018.

Tabel.2.118

Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA (dokumen)	1	1	1	1	1

Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018

c. Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yg telah ditetapkan dengan PERKADA

Operasionalisasi rencana pembangunan menjadi sebuah kebutuhan eksplisit. Dengan rencana yang lebih operasional maka menjadi mudah untuk direalisasikan. Pelaksanaan pembangunan selama jangka waktu tertentu perlu diturunkan ke dalam dokumen yang lebih teknis dan operasional. Dengan demikian pembangunan dapat berjalan secara eksplisit. RKPD disusun setiap tahun dengan menerjemahkan RPJMD yang telah ditetapkan oleh Perda. Ketersediaan RKPD memberikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan sehingga setiap Perangkat Daerah dapat bergerak secara terpadu dan terarah menuju



sasaran yang jelas dan memperjuangkan pencapaian visi misi dengan terkoordinasi satu sama lain. Dasar hukum berupa Peraturan Bupati dalam penetapan RKPD memberikan kekuatan hukum. Dari data di atas pemenuhan dasar hukum berupa peraturan kepala daerah yang selalu mengiringi RKPD memberikan kepastian hukum dan keabsahan, sehingga menjadi dasar bertindak untuk merealisasikan program-program pembangunan mencapai target secara kuantitas dan kualitas, dan mengantarkan pencapaian outcome yang diharapkan.

Tabel.2.119

Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA (dokumen)	1	1	1	1	1

Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018

d. Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD

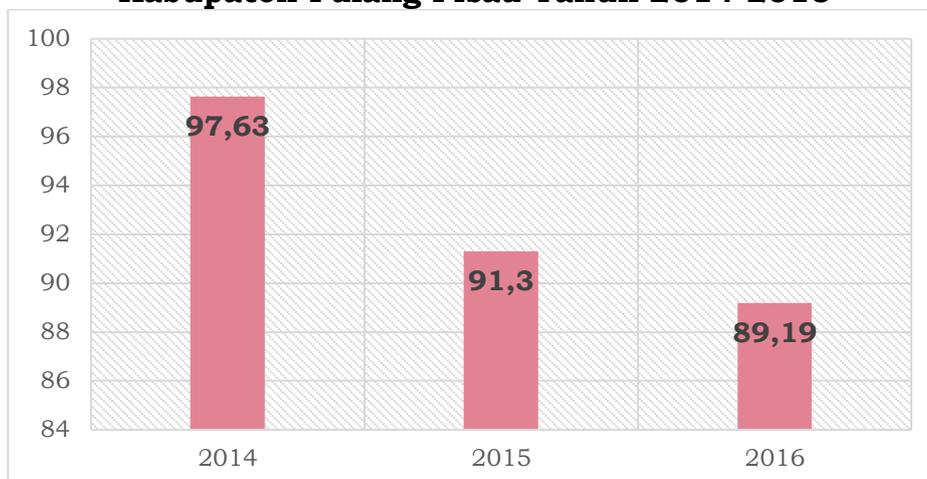
Kesinambungan dokumen pembangunan mutlak diperlukan agar terdapat proses pencapaian visi suatu daerah apabila dokumen pembangunan tidak saling selaras maka pencapaian visi suatu daerah akan sulit tercapai. RKPD merupakan penjabaran detail (dalam bentuk program) visi dan misi yang akan dicapai oleh suatu daerah. RKPD merupakan sebuah perencanaan tahunan yang berinduk kepada RPJMD. Untuk itulah RKPD merupakan bentuk turunan yang menerjemahkan RPJMD. Di samping itu keberadaan RKPD adalah bentuk



terbaru dari sebuah rencana untuk menampung perkembangan capaian setahun sebelumnya dan perkembangan tuntutan baru yang dihadapi pada tahun yang bersangkutan. Data terkait penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD didapatkan dengan cara menghitung jumlah program RKPD tahun berkenaan dibagi dengan jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun berkenaan dikalikan dengan bilangan 100.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah disusun setelah RPJMD disahkan dan berlaku selama satu tahun. Pada dasarnya RKPD dibuat dengan mengacu pada RPJMD. Dengan menghitung penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD maka akan diketahui capaian RKPD terhadap RPJMD. Menggunakan kesimpulan yang dibangun, maka Kabupaten Pulang Pisau memiliki cakupan penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD yang baik. Hal ini adalah sebuah prestasi dalam tata kelola pemerintahan yang perlu dipertahankan di masa mendatang.

Bagan 2.3
Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD
Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2014-2016



Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018



2.3.3.2. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

a. Jumlah LSM dan Ormas

LSM dan Ormas di Kabupaten Pulang Pisau dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik. Kegiatan yang dilakukan antara lain berupa pendaftaran, pendataan dan verifikasi organisasi masyarakat, organisasi sosial dan LSM sesuai Permendagri Nomor 33 Tahun 2012. Adapun jumlah LSM dan Ormas pada tahun 2017 di Kabupaten Pulang Pisau dapat disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.120
Jumlah LSM dan Ormas di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017

Indikator	Aktif	Tidak aktif	Jumlah
Jumlah LSM (unit)	4	10	14
Jumlah Ormas (unit)	13	3	16

Sumber: Kesbangpollinmas Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018

b. Kegiatan Pembinaan Politik Daerah

Kegiatan pembinaan politik daerah di Kabupaten Pulang Pisau juga dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan



ekonomi fdaerah, fasilitas wilayah dan infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi rumah tangga maka semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi rumah tangga per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk.

Selain itu, pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, dimana semakin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran maka semakin baik tingkat perekonomian penduduk. Pada kondisi pendapatan terbatas, pemenuhan kebutuhan makanan akan menjadi prioritas utama, sehingga pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah akan terlihat bahwa sebagian besar pendapatannya digunakan untuk membeli makanan.

b. Produktivitas Total Daerah

Produktivitas daerah dihitung untuk mengetahui tingkat produktivitas tiap sektor per angkatan kerja yang menunjukkan seberapa produktif tiap angkatan kerja dalam mendorong ekonomi daerah per sektor.



Produktivitas total daerah dapat diketahui dengan menghitung produktifitas daerah per sektor (17 sektor) yang merupakan jumlah PDRB dari setiap sektor dibagi dengan jumlah angkatan kerja dalam sektor yang bersangkutan.

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Fokus ini berusaha melihat sejauh mana upaya penyediaan sarana-prasarana yang sudah dilakukan pemerintah daerah untuk menarik sektor usaha agar mau menyelenggarakan kegiatan ekonomi di Kabupaten Pulang Pisau. Suatu fasilitas wilayah atau infrastruktur menunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaannya (*availability*) dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah.

1. Panjang Jalan

Dari Tahun 2011 hingga 2016, panjang jalan di Kabupaten Pulang Pisau selalu bertambah. Pada Tahun 2016, jalan di Kabupaten Pulang Pisau sepanjang 784.365 km.

2. Jumlah Angkutan Penyebrangan, Penumpang dan Barang

Volume Angkutan penyeberangan sungai di Kabupaten Pulang Pisau dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sehingga akses transportasi dari berbagai macam alat transportasi sudah mulai dirasakan masyarakat terutama dalam mempermudah akses keluar dan masuk Kabupaten Pulang Pisau, sebagaimana disajikan pada tabel berikut :



Tabel.2.121

**Banyaknya Angkutan Penyeberangan, Penumpang dan Barang
Di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2017**

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Dermaga (unit)	-	32	32	32	32
Kapal Ferry (unit)	-	37	37	40	42
Orang Melalui Dermaga (jiwa)	-	784	9.022	10.163	10.248

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018

3. Jumlah Bank dan Cabang

Bank di Kabupaten Pulang Pisau terdiri dari dua bagian. Bank Pemerintah dan Bank Milik Swasta, adapun Bank milik Pemerintah yaitu BRI dan BPD Kalteng, dimana BPD Kalteng berada di Kecamatan Kahayan Hilir dan Kahayan Kuala. Sedangkan BRI berada di Kecamatan Kahayan Hilir. Bank Swasta terdiri dari BNI dan Mandiri yang berlokasi di Kecamatan Kahayan Hilir, dimana secara totalitas mencapai empat unit bank.

4. Jumlah Penginapan

Di Kabupaten Pulang Pisau terdapat beberapa penginapan. Adapun penginapan tersebut yaitu penginapan Gemini, Losmen Ani, Losmen Reformasi dan lain-lain.

2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Fokus ini mengidentifikasi seberapa kondusif kondisi Kabupaten Pulang Pisau dalam rangka mendukung investasi riil masuk. Terdapat satu indikator yang tersedia untuk menilai tingkat iklim investasi, yaitu angka kriminalitas. Penjelasan hal tersebut akan dijabarkan sebagai berikut :

a. Angka Kriminalitas

Angka Kriminalitas adalah rata-rata kejadian kriminalitas dalam satu bulan pada tahun tertentu. Artinya dalam satu bulan rata-rata terjadi berapa tindak kriminalitas



untuk berbagai kategori seperti curanmor, pembunuhan, pemerkosaan, dan sebagainya. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat.

Upaya untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah. Pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga secara kuantitas dan kualitas tindak kriminalitas dapat diminimalisir, angka Kriminal di kabupaten Pulang Pisau paling besar terjadi di Kecamatan Kahayan Hilir sebanyak dua puluh tujuh (27) di tahun 2016 serta enam belas (16) di tahun 2017 untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan tabel sebagai berikut :

Tabel 2.122

Tingkat Kriminalitas Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2015-2017

Indikator	2015	2016	2017
Angka Kriminalitas (kejadian)	71	86	69

Sumber : Kabupaten Pulang Pisau Dalam Angka Tahun 2018

b. Lama Proses Perizinan

Investasi yang akan masuk ke suatu daerah berkaitan dengan daya saing investasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Pembentukan daya saing investasi, berlangsung secara terus menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya kemudahan perijinan. Kemudahan perijinan di adalah



proses pengurusan perijinan yang terkait dengan persoalan investasi relatif sangat mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama.

Penanaman Modal menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 memberikan pengertian penanaman modal sebagai segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) untuk melakukan usaha di Wilayah Negara Republik Indonesia. Alasan Kabupaten Pulang Pisau untuk melaksanakan penanaman modal adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperluas lapangan kerja di Kabupaten Pulang Pisau. Dengan penanaman modal dapat dicapai tujuan seperti mengembangkan industri substitusi impor untuk menghemat devisa, mendorong ekspor non migas untuk menghasilkan devisa, alih teknologi, membangun prasarana dan penembangan daerah tertinggal.

Selama periode tahun 2013 sampai tahun 2017 proses penerbitan izin investasi di Kabupaten Pulang Pisau relatif cepat dan lancar dengan mengacu pada ketentuan peraturan yang berlaku.

c. Jumlah Dan Macam Pajak Dan Retribusi Daerah

Jumlah dan macam pajak daerah dan retribusi daerah diukur dengan jumlah dan macam insentif pajak dan retribusi daerah yang mendukung iklim investasi. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku).



Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Sampai saat ini untuk pajak daerah dan retribusi daerah hanya di hasilkan dari wajib pajak losmen serta Restoran (rumah makan/warung makan) yang ada di Kabupaten Pulang Pisau. Selain itu pajak di hasilkan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) dan BPHTB. Sedang wajib retribusi hanya di hasilkan dari Retribusi jasa usaha seperti pasar, parkir, izin trayek dan retribusi lain yang sifatnya hasilnya sewaktu-waktu atau tidak menetap. Jumlah total Wajib Pajak di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2016 berjumlah 5,388 (Wajib Pajak , RM, Katering dll) dan untuk SPPT dan DHKP sektor pedesaan dan perkotaan di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017 dengan jumlah total SPPT 50,132 dan DHKP 159, jumlah pajak terhitung 1.191.584.513 (Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pulang Pisau).

2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Fokus ini berusaha melihat kesiapan sumber daya manusia dalam rangka mendukung agenda pembangunan daerah. Peningkatan kualitas SDM merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang



inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional.

a. Jumlah lulusan S1/S2/S3

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3.

Tabel 2.123

Jumlah lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
S1 (orang)	2.039	2.223	2.342	2.130	2.093
S2 (orang)	120	141	158	180	193
S3 (orang)	1	1	1	2	2

Sumber : BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018

b. Rasio Ketergantungan

Kualitas sumberdaya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator yang digunakan dan tersedia untuk mengukur hal tersebut adalah indikator rasio ketergantungan. Angka Beban Ketergantungan (*dependency ratio*) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase angka beban ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung



penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase angka beban ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Kondisi angka beban ketergantungan Kabupaten Pulang Pisau pada tahun 2017 sebesar 46,98 persen sehingga dapat diartikan bahwa dari 100 penduduk kabupaten Pulang Pisau diusia produktif (kerja) menanggung 47 orang yang tidak produktif.

Keseluruhan capaian pembangunan Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana telah diuraikan pada bab ini, disajikan pada tabel dibawah ini



Tabel 2.124

**Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2017**

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
1	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi						
1.1	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Harga Berlaku	Persen	6,76	6,73	5,16	4,10	4,06
1.2	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Harga Konstan	Persen	6,79	7,23	7,71	6,06	5,86
1.3	Laju inflasi (Palangkaraya dan Sampit)	Persen	6,45/7,25	6,63/7,90	4,20/5,72	1,91/2,46	3,11/3,29
1.4	PDRB per kapita (ADHB)	Juta Rp	27,76	30,89	34,10	37,63	35,2
1.5	PDRB per kapita (ADHK)	Juta Rp	22,67	23,76	24,89	26,11	23,9
1.6	Indeks Gini	Indeks	0,315	0,365	0,311	0,257	0,253
1.7	Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia	Persen	0,271	0,252	0,365	0,340	0,295
1.8	Persentase penduduk miskin	Persen	5,45	5,35	5,65	5,49	5,19
1.9	Angka kriminalitas yang tertangani	Persen	63	56	71	96	69
1.10	Indeks Pembangunan Manusia	indeks	64,76	65,00	65,76	66,49	67,00
2	Fokus Kesejahteraan Sosial						
2.1	Angka Melek Huruf	Persen	98,77	99,3	99,84	99,61	99,50
2.2	Angka Rata-rata lama sekolah	Tahun	7,55	7,58	7,59	7,66	7,67
2.3	APK SD	Persen	118,14	106,54	109,92	112,26	99,13
2.4	APK SMP/MTs	Persen	80,81	89,04	106,26	86,59	77,83
2.5	APK SMA/SMK/MA	Persen	83,01	67,02	77,67	75,24	52,03
2.6	Angka pendidikan yang	Persen	57,19	61,94	86,52	90,18	81,13



NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
	ditamatkan						
2.7	APM SD/SDLB/MI	Persen	91,62	94,5	95,2	95,08	99,32
2.8	APM SMP	Persen	74,05	74,58	76,31	74,21	75,07
2.9	APM SMA	Persen	39,22	52,4	69,58	51,73	54,16
2.10	Angka Kematian Bay	/1.000 KH	7	5	3	7	14
2.11	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	N/A	67,44	67,64	67,75	67,86
2.12	Jumlah Balita Gizi buruk	Persen	0	2	1	2	3
2.13	Prevelensi Stunting	Kasus	46	47	49	32	35
2.14	Rasio penduduk yang bekerja	Persen	96,61	94,18	94,77	94,03	98,38
3	Fokus Budaya dan Olahraga						
3.1	Jumlah Grup Kesenian	Buah	14	14	15	16	16
3.2	Jumlah Gedung Kesenian	Buah	0	0	0	0	2
3.3	Jumlah klub olahraga	Buah	14	19	21	25	30
3.4	Jumlah Gedung Olahraga	Buah	8	8	11	13	13
B.	ASPEK PELAYANAN UMUM						
1	Fokus Layanan Urusan Wajib						
1.1	Pendidikan						
1.1.1	Pendidikan Dasar						
1.1.1a	Angka partisipasi sekolah SD	Persen	95,15	98,08	98,4	98,89	99,32
1.1.1b	Angka partisipasi sekolah SMP	Persen	84,83	87,08	87,71	94,77	91,40
1.1.1c	Angka partisipasi sekolah SMA	Persen	50,23	53,00	62,13	74,41	61,34
1.1.1d	Rasio Guru terhadap murid per kelas rata-rata	Rasio	8	11	10,79	9,96	9
1.1.2	Pendidikan Menengah						
1.1.2c	Rasio Guru terhadap murid	Rasio	9,33	10,00	10,18	10,53	N/A
1.1.2d	Rasio Guru terhadap murid per kelas rata-rata	Rasio	9	13	13,12	12,71	10



NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.2h	Rasio guru terhadap murid	Rasio	10,73	8,80	10,25	10,25	N/A
1.1.2i	Rasio guru terhadap murid perkelas rata-rata	Rasio	10	15	13,68	14,79	10
1.1.5	Angka Putus Sekolah						
1.1.5a	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Persen	35	61	54	49	43
1.1.5b	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	Persen	37	40	20	31	NA
1.1.6	Angka Kelulusan						
1.1.6a	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Persen	98,20	99,15	100	100	104,75
1.1.6b	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Persen	98,64	99,11	99,79	99,60	120,51
1.1.6c	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	Persen	95,78	96,83	97,79	99,53	103,50
1.1.6d	Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Persen	78,21	78,79	79,43	79,59	101,51
1.1.6e	Angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTS ke SMA/SMK/MA	Persen	96,98	97,63	98,93	98,96	86,12
1.1.6f	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen	54,62	55,04	55,41	76,41	81,34
1.2	Kesehatan						
1.2.1	Rasio Posyandu per satuan balita	Rasio	1:75	1:74	1:69	1:68	1:67
1.2.2	Rasio Puskesmas, Persatuan Penduduk	Rasio/jumlah	1:11.207	1:11.274	1:11.349	1:11.457	1:10.515
1.2.3	Rasio Pustu satuan penduduk	Rasio/jumlah	N/A	1 : 1.631	1: 1.664	1 : 1.792	1 : 1802
1.2.4	<i>Bed Occupancy Rate</i> (BOR)	Rasio	46,0	48,8	69,57	30,44	70,08
1.2.6	Cakupan komplikasi	Persen	58,80	63,51	56,06	90,61	97,74



NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
	kebidanan yang ditangani						
1.2.7	Jumlah pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Jumlah	2006	2087	2081	2155	2278
1.2.8	Cakupan Balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan	Persen	100	100	100	100	100
1.2.9	Persentase penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	22,02	20,73	16,78	15,18	15,10
1.2.10	jumlah penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	kasus	4	24	34	33	4
1.2.13	Cakupan desa/kelurahan <i>Universal Children Immunization</i>	Persen	94,90	72,70	69,70	71,70	81,80
1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
1.3.1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	11,18	29,06	27,58	16,79	17,27
1.3.2	Rasio Jaringan Irigasi	Rasio	N/A	N/A	N/A	N/A	112,9
1.3.3	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	Buah	0,39	0,40	0,39	0,41	0,42
1.3.6	Persentase Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk	Persen	8	8	28	34	39
1.3.8	Rasio permukiman layak huni	Rasio	N/A	N/A	55,90	62,80	68,25
1.3.9	Panjang Jalan dilalui roda empat (permukaan aspal/km)	Km	107,63	107,44	110,88	119,92	135,79
1.3.10	Panjang Jalan dilalui roda empat (permukaan tanah/km)	Km	659,58	724,87	767,21	793,66	815,75
1.3.13	Panjang jalan kabupaten	Persen	37,00	33,04	35,00	35,81	36,00



NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
	dalam kondisi baik (>40 km/jam)						
1.3.14	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	km	4,744	6,832	7,834	8,206	8,357
1.3.15	Prosentase akses air minum di wilayah Perkotaan	Persen	33,76	34,12	34,78	35,54	36,08
1.3.16	Prosentase akses air minum di wilayah Pedesaan	Persen	3,90	4,19	4,43	4,88	5,01
1.3.17	Prosentase akses air minum dengan jaringan perpipaan	Persen	22,56	23,78	25,11	26,83	28,87
1.3.18	Prosentase akses air minum dengan jaringan non perpipaan	Persen	3,16	3,45	4,11	4,62	5,01
1.4	Perumahan dan Kawasan Pemukiman						
1.4.2	Persentase rumah tangga pengguna listrik	persen	68,69	78,21	84,41	88,57	93,59
1.5	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat						
1.5.1	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	rasio	1/3.160	1/3.100	1/2400	1/2460	1/2003
1.5.2	Jumlah Linmas per 10.000 penduduk	rasio	N/A	N/A	N/A	1/185	1/194
1.5.3	Rasio pos kamling per jumlah desa/kelurahan	rasio	98,17	98,17	98,17	98,17	98,17
1.5.5	Sistem informasi pelayanan perizinan dan administrasi pemerintah	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.5.6	Persentase penegakan PERDA	persen	100	100	100	100	100



NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.7	Jumlah izin yang diterbitkan	Jumlah	581	547	1140	1518	1345
1.5.8	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketrentaman, keindahan) di kabupaten	persen	100	100	100	100	100
1.5.9	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten	Jumlah	788	793	804	924	774
1.5.10	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	Persen	N/A	N/A	30,77	30,77	30,77
1.5.11	Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Menit	20	20	20	20	20
1.6	Sosial						
1.6.1	Jumlah Kelompok fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya yang diberi Bantuan (Kelompok)	Jumlah	793	340	2436	540	148
1.6.2	Jumlah PMKS yang dilatih (KK)	Jumlah	9	11	12	14	9
1.6.3	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	Unit	3	3	3	3	3
2	Fokus Layanan Urusan Wajib Non Dasar						
1	Tenaga Kerja						
1.1	Tingkat Partisipasi angkatan kerja	Persen	67,31	67,34	74,48	N/A	98,38
1.2	Tingkat pengangguran terbuka	Persen	2,40	4,28	3,29	N/A	1,62
1.3	Rasio Lulusan S1/S2/S3	Orang	1,75	1,91	2,00	1,84	1,81



NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
2.1	Proporsi Kursi Yang diduduki Perempuan di DPR	Persen	N/A	N/A	25	25	25
2.2	Jumlah KDRT	JUMLAH	6	9	9	9	12
2.3	Partisipasi angkatan kerja perempuan	persen	N/A	94,37	96,54	93,58	97,71
2.4	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	persen	100	100	100	100	100
3	Pangan						
3.1	Ketersediaan Pangan Utama						
	- Beras	Kg/ Thn	792,48	1.061,26	1.169,52	1.020,41	987,69
	- Daging	Kg/ Thn	1,12	1,43	1,47	0,73	0,73
3.4	Regulasi Ketahanan Pangan	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.10	Pertanahan						
1.10.1	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	Persen	16,7	16,79	17,3	18,62	33,61
1.11	Lingkungan Hidup						
1.11.1	Persentase penanganan sampah	Persen	8	8	28	34	39
1.11.7	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	Persen	N/A	N/A	64,98	59,66	40,00
1.12	Kependudukan dan Catatan Sipil						
1.12.1	Persentase penduduk ber KTP per satuan penduduk	persen	N/A	N/A	69	77,34	97,46
1.12.2	Persentase bayi berakte	persen	N/A	N/A	61	41,11	75,08



NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
	kelahiran						
1.12.3	Pasangan berakte nikah	persen	N/A	N/A	48	8,83	10,73
1.12.6	Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten	ada/tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.12.7	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	sudah/belum	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
1.13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
1.13.1	Jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Jumlah	90	99	99	99	99
1.13.2	Jumlah kelompok binaan PKK	jumlah	99	99	99	99	99
1.13.5	Persentase PKK aktif	Persen			100	100	100
1.13.6	Rata-rata jumlah anak per keluarga	jumlah	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3
1.14	Pengendalian Peduduk dan Keluarga Berencana						
1.14.1	Rata-rata jumlah anak per keluarga	rata-rata	N/A	N/A	2,89	2,7	2,82
1.14.3	Cakupan peserta KB aktif	Persen	70,94	94,87	N/A	N/A	N/A
1.14.5	Cakupan PUS yang istrinya dibawah 20 tahun	Persen	7,97	9,97	11,76	13,92	15,97
1.14.6	Cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif	Persen	74,00	75,50	82,15	78,08	78,33
1.14.7	Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (<i>Unmeet need</i>)	Persen	27,72	24,56	23,81	21,71	21,78
1.14.8	Cakupan bina keluarga balita (BKB) ber KB	Persen	N/A	65,53	65,53	65,53	65,53



NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1.14.9	Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber KB	Persen	N/A	70	23,33	23,33	67,64
1.14.10	Cakupan PLKB/PKB disetiap desa/kelurahan	Persen	8,07	6,83	4,35	3,73	4,35
1.14.12	Cakupan PPKBD di setiap desa/kelurahan	Persen	97	97	97	97	97
1.15	Perhubungan						
1.15.2	Jenis dan Jumlah terminal angkutan umum (kelas c)	Jumlah	NA	2	2	4	4
1.15.3	Jumlah angkutan darat	Jumlah	3	2	2	1	
1.15.5	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	Menit	N/A	N/A	1	1	1
1.15.6	Pemasangan rambu-rambu	Unit	335	335	335	541	541
1.15.8	Jumlah ijin trayek Pedesaan	jumlah	12	8	12	10	7
1.16	Komunikasi dan Informatika						
1.16.1	Jumlah jaringan komunikasi	jaringan	4	4	4	4	4
1.16.3	Jumlah surat kabar nasional	eksemplar	1	1	1	1	1
1.16.4	Jumlah surat kabar daerah	eksemplar	4	6	6	8	8
1.16.5	Jumlah penyiaran radio	jumlah	0	2	2	1	1
1.16.6	Keberadaan website milik Pemerintah Daerah	ada/tidak	-	-	ada	ada	ada
1.17	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah						
1.17.1	Persentase koperasi aktif	persen	71,72	74,68	77,06	78,29	78,41
1.17.2	Persentase Usaha Mikro dan kecil	persen	93,90	93,06	93,71	93,45	94,30



NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1.17.3	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	jumlah	N/A	N/A	1630	1630	44831
1.17.4	Jumlah BPR/LKM	jumlah	N/A	N/A	24	28	30
1.18	Penanaman Modal						
1.18.1	Jumlah Investor berskala nasional (PMDN)	jumlah	N/A	N/A	2	22	11
1.18.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN)	Rupiah	N/A	N/A	44.050.000	173.287.444.588	822.894.574.572
1.19	Kepemudaan dan Olahraga						
1.19.1	Jumlah organisasi pemuda	Jumlah	13	13	15	17	17
1.19.2	Jumlah Organisasi olahraga	Jumlah	18	18	25	25	25
1.19.3	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	Jumlah	2	2	2	2	2
1.19.4	Jumlah Kegiatan Olahraga	Jumlah	4	4	4	4	4
1.19.5	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	Jumlah	2	2	2	2	2
1.19.6	Lapangan Olahraga	Jumlah	11	11	12	13	14
1.20	Statistik						
1.20.1	Buku Kabupaten Dalam Angka	ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.20.2	Buku PDRB Kabupaten	ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.21	Kebudayaan						
1.21.1	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	Jumlah	1	1	1	1	2
1.21.2	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Jumlah	1	1	1	1	1



NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1.21.3	Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Persen	25	25	25	25	25
1.22	Perpustakaan						
1.22.2	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	2.300	2,300	7.016	3.546	1.818
1.22.3	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Jumlah	9.306	9.306	9.306	9.394	10.541
1.23	Kearsipan						
1.23.1	Persentase SOPD yang mengelola arsip secara baku	Persen	78,90	78,90	76,92	78,00	75,00
1.23.2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	jumlah kegiatan	2	2	2	3	6
2	Fokus Layanan Urusan Pilihan						
2.1	Kelautan dan Perikanan						
2.1.1	Produksi Perikanan	ton/tahun	23.469,82	23,731,99	22,249,55	23,058,02	23.493,99
2.1.2	Konsumsi ikan	kg/kapita/thn	35,96	44,41	32,68	32,67	31,86
2.2	Pariwisata						
2.2.1	Jumlah Kunjungan wisata	Persen	N/A	4.266	1.955	2.492	2.597
2.3	Pertanian						
2.3.1	Produktifitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Ton/ha	3,48	3,72	3,83	3,07	4,02
2.3.2	Kontribusi sektor pertanian	Persen	31,6	32	31,6	30,4	30,4



NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
	terhadap PDRB						
2.4	Kehutanan						
2.4.1	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	Persen	50,14	49,83	33,33	NA	NA
2.4.2	Kerusakan Kawasan Hutan	Persen	67,44	67,46	71,89	72,26	72,59
2.4.3	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	Persen	6,53	6,31	6,05	NA	NA
2.5	Energi dan Sumberdaya Mineral						
2.5.2	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	Persen	9,28	9,63	9,35	9,01	8,53
2.6	Perdagangan						
2.6.1	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Persen	5,22	8,56	6,96	7,25	7,41
2.7	Perindustrian						
2.7.1	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Persen	15,06	10,94	9,28	8,92	8,95
2.7.2	Jumlah Industri Rumah Tangga	Jumlah	33	48	50	62	63
2.7.3	Persentase pertumbuhan industri	Persen	N/A	12	9,7	9,9	11,21
2.7.4	Cakupan bina kelompok pengrajin	Persen	0	0	12,	97	97
2.8	Ketransmigrasian						
2.8.1	Jumlah transmigrasi	Jumlah	3.681	3.681	3.681	NA	NA
3	Fungsi Penunjang dan						



NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pendukung Urusan Pemerintahan						
3.1	Perencanaan						
3.1.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda	Jumlah Dokumen	1	1	1	1	1
3.1.2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda	Jumlah Dokumen	1	1	1	1	1
3.1.3	Tersedianya dokumen perencanaan RKPd yang telah ditetapkan dengan Perkada	Jumlah Dokumen	1	1	1	1	1
3.1.4	Persentase keselarasan penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPd	Persen	100	100	100	100	100
3.2	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri						
3.2.1	Jumlah LSM,	Jumlah	9	11	12	14	14
3.2.2	Jumlah Ormas	Jumlah	10	12	13	14	16
3.2.3	Petugas perlindungan masyarakat	Jumlah	N/A	N/A	804	924	924
C.	ASPEK DAYA SAING DAERAH						
1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah						
1.1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita	Juta	N/A	N/A	77.11	81.21	107.94
1.2	Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita	ribu rupiah	N/A	N/A	4.274.892	4.555.344	6.160.296
1.3	Produktivitas Total Daerah :						
	- Pertanian	Juta/ Jiwa	24.55	26.15	22.00	22.79	29.94



NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Industri	Juta/ Jiwa	99.8	108.16	89.73	96.46	61.94
	- Jasa	Juta/ Jiwa	40.74	43.22	90.22	97.38	63.17
4	Fokus Sumber Daya Manusia						
4.1	Jumlah lulusan S1/	orang	2.039	2.223	2.342	2.130	2.093
4.2	Jumlah Lulusan S2	Orang	120	141	158	180	193
	Jumlah lulusan S3	Orang	1	1	1	2	2